

BAGIAN KEDUA

MODEL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI PEDESAAN

Repository University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

 Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB V PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pada masa lalu pembangunan lebih banyak terfokus di perkotaan, sehingga pedesaan terasa terabaikan dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan industri yang merupakan ekonomi perkotaan dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi di pedesaan (sektor pertanian). Sudah waktunya pembangunan dimulai dari desa melalui pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian harus menjadi basis untuk pengembangan industri di pedesaan.

A. Sumberdaya dalam Pengembangan Agribisnis

Agribisnis dalam arti luas mempunyai peranan yang cukup berarti dalam perekonomian nasional. Selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP) pada pemerintahan orde baru, ekspor barang industri Indonesia sebagian besar adalah ekspor barang agroindustri, maka masa reformasi peluang itu akan semakin besar karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangan ekspor non migas Indonesia, terutama bersumber dari sektor pertanian. Ini merupakan peluang yang dibuka oleh pemerintah yang bersifat kelembagaan.

Kalau diperhatikan peningkatan permintaan komoditas pertanian yang bermutu tinggi akan mendorong perusahaan besar untuk bergerak di bidang usaha agribisnis dengan ciri-ciri sebagai berikut, antara lain: 1) Menghasilkan nilai tambah tinggi per hektar; 2) Tidak perlu terlalu luas untuk mencapai skala ekonomi minimum (jenis usaha yang tidak *land intensive*); dan 3) Dimungkinkan penggunaan teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor alam dan untuk meningkatkan produktivitas.

Ada beberapa alasan dipilihnya pengembangan agribisnis dan agroindustri sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan pertanian, antara lain: 1) Agribisnis dan agroindustri dalam struktur perekonomian merupakan perekat antara sektor pertanian dan sektor lainnya, sehingga dimungkinkan untuk mengalokasikan sumberdaya secara efisien; 2) Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ekonomi Pembangunan

agribisnis dan agroindustri maka suatu komoditi dapat dikelola secara efisien dengan kualitas (segar maupun olahan) tinggi; 3) Dengan kegiatan yang saling berantai maka agribisnis dan agroindustri akan meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan, sehingga merupakan peluang bagi petani untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi; dan 4) Agribisnis dan agroindustri menyangkut berbagai aspek yang dapat menumbuhkan kegiatan yang saling terkait, sehingga dengan rekayasa pengembangan yang tepat kegiatan agribisnis dan agroindustri berpotensi besar untuk menampung tenaga kerja yang lebih banyak atau mendorong terciptanya kesempatan kerja baru.

Diharapkan agribisnis dan agroindustri menjadi suatu sektor yang akan memimpin pada masa datang dengan alasan sebagai berikut: 1) Agroindustri mempunyai keterkaitan (*linkages*) yang besar dengan sektor ekonomi lainnya; 2) Produk-produk agroindustri, terutama agroindustri pengolah umumnya memiliki nilai elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk pertanian dalam bentuk segar atau bahan mentah; 3) Kegiatan agroindustri umumnya bersifat *resource base* industri. Sehingga dengan dukungan potensi sumberdaya alam, akan semakin besar kemungkinan untuk memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pasar dunia, di samping dapat memiliki pasar domestik yang cukup terjamin; 4) Kegiatan agroindustri pada umumnya menggunakan input yang *renewable*, sehingga keberlangsungan (*sustainability*) kegiatan ini dapat terjamin; 5) Agroindustri merupakan sektor yang telah dan akan terus memberikan sumbangan yang besar bagi sektor non migas; dan 6) Agroindustri yang memiliki basis di pedesaan akan mengurangi kecendrungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota.

Dalam menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah pedesaan untuk masa mendatang, ada beberapa faktor yang perlu dikaji dan dikembangkan supaya sasaran pengembangan agribisnis tersebut tercapai; antara lain: 1) sumberdaya lahan; 2) sumberdaya manusia; 3) teknologi; dan 4) investasi.

1. Sumberdaya Lahan

Adanya peningkatan kegiatan di sektor pertanian merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan kegiatan sektor-sektor perekonomian lainnya



yang ada di daerah. Kegiatan transportasi, perdagangan, industri dan kegiatan lainnya muncul mengiringi aktifitas pada sektor pertanian. Adanya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor lainnya mengakibatkan pola pengembangan perekonomian daerah masih berorientasi pada sektor pertanian (Almasdi Syahza, 2002).

Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian daerah Riau. Pengaruh tersebut tampak dalam pendapatan masyarakat dan juga dalam penyerapan tenaga kerja. Terutama di pedesaan sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dan merupakan tumpuan utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Dukungan yang diberikan oleh sektor pertanian ini tidak hanya sebagai mata pencarian pokok, namun merupakan pendukung utama bagi perkembangan sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, transportasi dan industri, terutama di daerah Batam dan sekitarnya. Di samping itu sektor pertanian merupakan andalan bagi perekonomian Riau.

Penurunan luas lahan dan produksi di subsektor tanaman pangan disebabkan karena terbatasnya lahan pertanian yang tersedia dan adanya perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan perkebunan. Untuk itu terbuka peluang dikembangkannya suatu teknologi yang dapat menunjang pertumbuhan produksi yang tinggi pada lahan yang terbatas.

2. Sumberdaya Manusia

Perspektif pembangunan pertanian merupakan integral dari pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang mempunyai kemampuan fisik dan daya nalar yang prima sehingga pengembangan pertanian mengarah pada industrialisasi pertanian. Sumberdaya manusia terbesar adalah petani. Pada struktur masyarakat Indonesia unit terkecil pendukung ketangguhan perekonomian pedesaan adalah rumah tangga, maka grup sasaran terkecil dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini hendaknya dengan penekanan yang diarahkan pada pembinaan rumah tangga petani.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia, di satu pihak pendidikan meningkatkan produktivitas kerja, di lain pihak pendidikan merupakan indikator tingkat kemiskinan. Begitu juga penambahan pengetahuan kepada para petani akan membuat para petani berkecakapan atau berkemampuan untuk mengusahakan usahataniya lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mempertinggi pendapatannya.

Karena itu peluang meningkatkan pendapatan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan petani dapat ditingkatkan. Di samping itu banyaknya tenaga kerja yang tersedia di daerah Riau dengan tingkat upah yang masih relatif murah akan membuka peluang yang besar untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri.

3. Pemanfaatan Teknologi

Untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan dan membangun masyarakat desa guna memenuhi kebutuhan akan pangan dan komoditas pertanian lainnya secara berkesinambungan pemanfaatan teknologi merupakan salah satu yang dianggap tepat. Menurut Soekartawi (1993) untuk pembangunan pertanian perlu memperhatikan beberapa aspek yakni: (1) Pemanfaatan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan; (2) Pemanfaatan teknologi yang senantiasa berubah; dan (3) Pemanfaatan kelembagaan yang saling menguntungkan; dan (4) Pemanfaatan budaya untuk keberhasilan pembangunan pertanian.

Setiap penemuan teknologi baru, tentu akan membawa konsekuensi, bagaimana menyediakan sarana produksi sehingga dapat diterapkan. Pada hakekatnya penerapan teknologi baru yang dilaksanakan oleh para petani yang tersebar letak usahanya. Oleh karena itu timbul masalah bagaimana caranya agar sarana itu dapat tersedia disatu tempat. Selanjutnya agar petani benar-benar bersedia menggunakan sarana itu, masih perlu adanya unsur-unsur penunjang, seperti mutu, harga terjangkau, cara penyediaan harus menarik dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah ini perlu dikembangkan teknologi agroindustri, karena agroindustri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan petani.



Semakin berkembangnya agribisnis dan agroindustri di daerah Riau akan menuntut perkebanganan teknologi yang dapat mengimbangi perkembangan agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan pendapatan petani.

Investasi

Investasi dalam bidang agribisnis dan agroindustri akan terjadi dengan sendirinya sejalan dengan melimpahnya bahan baku pertanian dan berkembangnya permintaan akan bahan olahan produk pertanian di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan *over invesment* dan *over capacity* yang merugikan diperlukan transparansi pasar, data base pertanian yang lengkap dan akurat. Di samping itu, perlu adanya koordinasi rencana investasi dengan semua instansi terkait.

Bila diperhatikan lima tahun terakhir ini pihak investor telah mulai tertarik untuk penanaman investasinya di daerah Riau, apakah di sektor pertanian atau di sektor non pertanian. Hal ini terlihat dari pesatnya pembangunan untuk sektor industri dan sektor pertanian, khususnya perkebunan.

Dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Riau tidak perlu diragukan lagi untuk mendapatkan investasi dari pihak investor. Hal ini disebabkan Riau termasuk pusat pertumbuhan ekonomi yang sekarang digalakkan dengan negara tetangga. Dengan demikian, peluang untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri akan menjadi terbuka lebar.

Peluang untuk pengembangan investasi khususnya disektor pertanian mulai digalakkan. Dilihat secara garis besar peluang investasi di sektor pertanian di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Agribisnis perannya sebagai pengembangan penyediaan sarana/input untuk sektor pertanian; (2) Agribisnis pengembangan budidaya komoditi pertanian; dan (3) Agribisnis sebagai pemasaran barang dan jasa.

B. Peluang Pengembangan Agribisnis Di Pedesaan

Memasuki abad XXI akan terjadi perubahan yang cukup besar dalam pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendidikan dan globalisasi gaya hidup. Perubahan ini mempunyai dampak positif maupun negatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dampak positif adalah meningkatnya konsumsi barang-barang konsumsi termasuk produk-produk yang berasal dari komoditas pertanian. Dampak negatif adalah perubahan struktur persediaan angkatan kerja yang dapat diserap oleh sektor pertanian. Perubahan pola hidup akan semakin meningkatkan urbanisasi dan menimbulkan keengganan bagi angkatan kerja baru untuk terjun ke sektor pertanian.

Di samping itu, di masa akan datang akan terjadi peningkatan pendapatan per kapita sedemikian rupa yang akan menimbulkan peningkatan kebutuhan barang konsumsi secara drastis, dari sisi lain terjadi perubahan komposisi berbagai barang konsumsi. Dalam pembangunan di masa lalu, konsumsi penduduk pedesaan lebih didominasi oleh barang-barang kebutuhan pokok, sedang barang-barang mewah lebih banyak dibutuhkan di daerah perkotaan. Pada masa datang akan terjadi perubahan, yaitu barang-barang mewah akan juga dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan dari sektor pertanian (agribisnis).

Barang-barang yang berasal dari komoditas pertanian berupa komoditas pertanian yang bernilai tinggi kebutuhannya akan meningkat, terutama produk hortikultura dan komoditas pertanian yang diproses lebih lanjut. Dengan adanya prospek semacam itu akan menunjang ekonomi petani melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri di masa datang. Produk pertanian yang diproses lebih lanjut akan menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut akan mendorong peningkatan pendapatan petani dan sektor pertanian akan berkembang.

Agribisnis dalam arti luas mempunyai peranan yang cukup berarti dalam perekonomian nasional. Selama PJP I ekspor barang industri Indonesia sebagian besar adalah ekspor barang agroindustri, maka di masa datang peluang itu akan semakin besar karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangan ekspor non migas Indonesia, terutama bersumber dari sektor pertanian. Ini merupakan peluang yang dibuka oleh pemerintah yang bersifat kelembagaan.

Di lain pihak, peningkatan pendapatan yang disertai dengan perubahan pola hidup, terutama yang akan dialami oleh penduduk di perkotaan besar dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, jelas akan menciptakan peluang-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

peluang usaha yang lebih besar dalam berbagai bidang, antara lain buah-buahan dan sayur-sayuran bermutu tinggi, bersih dan tidak tercemar. Dapat diperkirakan bahwa porsi buah-buahan dan sayur-sayuran bermutu tinggi yang saat ini masih kecil, akan meningkat secara berarti. Demikian pula pasar bunga akan lebih berkembang lagi dengan globalisasi *set it with flowers*.

Dengan meningkatnya permintaan komoditas pertanian terutama untuk sayur-sayuran, tanaman hias, buah-buahan dan ikan segar, maka dapat diperkirakan terjadi perubahan pola komoditas agribisnis dalam kurun waktu mendatang. Oleh sebab itu, ada dua peluang besar bagi perusahaan agribisnis yang akan diraih, yaitu: (1) Di bidang hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan ikan segar); dan (2) Di bidang agroindustri yaitu pengolahan lanjut dari komoditas pertanian untuk kebutuhan berbagai industri.

Globalisasi akan semakin deras di masa datang yang dapat menyebabkan pasar internasional bagi produk-produk pertanian akan semakin terbuka, sehingga tingkat persaingan di pasar internasional akan semakin ketat.

Salah satu syarat agar produk itu mampu bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara lain adalah efisiensi yang tinggi dalam mengusahakan komoditas yang bersangkutan dengan kualitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Namun demikian mengingat kondisi sumberdaya yang terbatas dan beragam, untuk melaksanakan kegiatan produksi seperti yang disyaratkan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dasar yang dapat mendorong terjadinya alokasi sumberdaya secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. Khusus untuk produk pertanian melalui agribisnis dan agroindustri merupakan salah satu jalan pemecahannya.

Untuk dapat mengembangkan agribisnis dan agroindustri diperlukan pelaku-pelaku pembangunan pertanian yang tangguh. Keterampilan dan keahlian harus diupayakan oleh semua pihak dan sistem pendidikan harus mampu menyediakan tenaga-tenaga profesional dan manajer yang sekaligus menjadi entrepreneur. Petani Indonesia diharapkan menjadi petani yang kuat dan tangguh yang berani menerima teknologi baru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dari kenyataan dapat dilihat bahwa perkembangan agribisnis dan agroindustri mengarah kepada agribisnis dan agroindustri skala besar terutama di daerah Riau yang diperkirakan mempunyai dampak penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah yang tinggi.

Dari segi lain, hal yang sangat mendukung prospek pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Riau di masa mendatang adalah: (1) Penduduk yang semakin bertambah dengan kebutuhan kualitas menu makan yang semakin baik; (2) Kemungkinan terjadinya diversifikasi di sektor pertanian karena semakin sempitnya lahan pertanian; (3) Semakin meningkatnya perkembangan industri di daerah Riau terutama Batam dan sekitarnya, sehingga dituntut penyediaan bahan baku dan makanan dari sektor pertanian sebagai penunjang industri tersebut; (4) Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai akibat berkembangnya sektor industri di daerah Riau, (5) Adanya peluang masuknya investasi asing ke daerah Riau, sehingga tidak tertutup kemungkinan penyerapan tenaga kerja asing yang membutuhkan kualitas menu yang tinggi terutama menu yang menyangkut dengan sektor pertanian; dan (6) Peluang untuk menampung tenaga kerja yang semakin bertambah.

Dengan demikian kegiatan agribisnis dan agroindustri di daerah Riau akan mempunyai peluang dan arti yang besar untuk dikembangkan. Di samping itu perkembangan sektor agribisnis dan agroindustri di Riau dapat menumbuhkan sektor ekonomi lain yang mempunyai dampak positif terhadap perubahan perekonomian masyarakat Riau di antaranya; (1) Kegiatan agribisnis dan agroindustri dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian regional daerah Riau, karena mempunyai efek ganda terhadap sektor ekonomi lainnya; (2) Perkembangan agribisnis dan agroindustri akan memberikan sumbangan terbesar di samping sektor migas; (3) Produktivitas sektor pertanian mempunyai peluang besar untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan yang terjadi pada seluruh sub sektor yang ada; (4) Di samping memberikan hasil yang jelas bagi petani dan telah menimbulkan perubahan pola pikir dalam pengelolaan usahatani; (5) Perkembangan agribisnis dan agroindustri akan meningkatkan laju pertumbuhan di sektor pertanian, di samping dapat menunjang pertumbuhan di sektor lainnya; dan (6) Majunya perkembangan sektor agribisnis dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

agroindustri akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat antara sektor pertanian dan non pertanian. (7) Agribisnis dan agroindustri yang memiliki basis di pedesaan akan mengurangi kecenderungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota.

Sasaran Pengembangan Agribisnis

Pengembangan agribisnis dan agroindustri memperoleh perhatian serius sejak awal tahun 1980-an, dan pada saat ini telah menunjukkan hasil-samping itu, potensi dan sejumlah kendala pengembangan khususnya yang menyangkut industri pengolahan hasil pertanian telah dapat pula diidentifikasi. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah pedesaan memiliki beberapa sasaran sebagai berikut: 1) Menarik pembangunan sektor pertanian; 2) Menciptakan nilai tambah; 3) Menciptakan lapangan pekerjaan; 4) Meningkatkan penerimaan devisa negara; 5) Memperbaiki pembagian pendapatan; dan 6) Meningkatkan pengetahuan petani melalui usahatani.

1. Menarik Pembangunan

Peranan Agribisnis dan agroindustri dalam menarik pembangunan sektor pertanian dapat ditinjau dari keterkaitan antara sektor pertanian dan agribisnis. Keterkaitan itu dapat ditinjau dari dua indikator yaitu kaitan harga (keterpaduan pasar) dan kaitan komoditas. Kaitan harga menunjukkan hubungan harga bahan baku (hasil pertanian) dengan harga produk agribisnis dan agroindustri. Apabila pasar di tingkat petani terpadu baik dengan pasar barang olahan maka keduanya saling membutuhkan. Sementara itu kaitan komoditas adalah keserasian jumlah, mutu, dan waktu antara penyediaan bahan baku yang dihasilkan petani dan yang dibutuhkan agroindustri (Simatupang, 1990).

Dengan adanya agribisnis dan agroindustri ini tentu diharapkan pembangunan pertanian di pedesaan dapat meningkat, petani yang selama ini kurang meminati bertani menjadi berminat, dan ladang yang selama ini kurang diurus menjadi lebih diperhatikan oleh petani itu sendiri karena adanya harapan pendapatan dapat meningkat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Untuk pengembangan agribisnis maupun agroindustri di daerah Riau akan mempunyai prospek yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang sudah mulai dikelola secara intensifikasi dan diversifikasi termasuk peluang pasar untuk pengembangannya baik regional maupun internasional.

Di lain pihak dengan adanya peningkatan kegiatan di sektor pertanian merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan kegiatan sektor perekonomian lainnya yang ada di daerah. Kegiatan transportasi, perdagangan, industri dan kegiatan lainnya muncul mengiringi aktivitas pada sektor pertanian. Adanya keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor lainnya mengakibatkan pola pengembangan perekonomian daerah masih berorientasi pada sektor pertanian (Almasdi Syahza, 2001).

2. Nilai Tambah

Dengan adanya agribisnis dan agroindustri ini dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian tersebut, sehingga petani juga ikut merasakan kenaikan pendapatan yang diterimanya.

Bila diperhatikan selama ini sebagian besar produksi buah-buahan, seperti nenas dan rambutan dikirim ke daerah Sumatera Barat dalam bentuk segar, yang tak jarang terjadi masalah kelebihan produksi sehingga harga di daerah pemasaran menjadi turun dan apalagi buah nenas merupakan buah-buahan yang tidak tahan lama. Sedangkan pisang, kecil kemungkinannya untuk dikirimkan secara komersil ke Sumatera Barat, karena Sumatera barat juga sebagai penghasil pisang dalam jumlah lebih banyak dan mutu yang lebih baik.

Oleh sebab itu, dengan adanya agroindustri akan dapat membantu petani meningkatkan pendapatannya. Apalagi untuk daerah pemasaran di Riau sangatlah baik, karena banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Riau, di samping itu Riau juga dipersiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan dikembangkannya segitiga pertumbuhan ekonomi tersebut maka pangsa pasar di daerah Riau, terutama Batam dan sekitarnya, mempunyai prospek yang baik.

3. Lapangan Pekerjaan

Apabila agribisnis dan agroindustri ini dikembangkan di daerah Riau tentu saja perhatian petani akan tercurah untuk memproduksi hasil pertanian,



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan petani tidak menjadikan tanaman, seperti buah-buahan, sebagai usaha sampingan malahan menjadi usaha utama yang dapat merubah nasib petani. Dengan adanya perubahan atau peningkatan produktivitas melalui peningkatan produksi pertanian akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani.

Petani yang selama ini kurang berminat bisa mengembangkan usahatani dari hasil yang diperolehnya, apalagi di daerah Riau lahan untuk usahatani masih berpeluang untuk diperluas. Selama ini curahan tenaga kerja terpusat pada usahatani padi, perkebunan, dan ladang berpindah akan mendorong petani untuk mengembangkan suatu usahatani dan agroindustri. Penduduk yang selama ini pergi ke kota untuk mencari pekerjaan akan tertarik untuk berusahatani. Semakin berkembangnya pertanian melalui agribisnis dan agroindustri akan semakin terbuka pula lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada di daerah Riau.

4. Devisa Negara

Sejak awal tahun 1980-an peningkatan ekspor non migas menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini disebabkan sektor minyak dan gas sulit untuk dijadikan andalan utama sumber penerimaan negara karena merosotnya harga minyak bumi dunia sejak tahun 1980. Komoditas primer yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan devisa dari sektor non-migas juga mengalami penurunan harga di pasaran dunia pada waktu yang sama. Oleh karena itu untuk memperbaiki neraca pembayaran luar negeri pemerintah berpaling pada peningkatan ekspor industri pengolahan hasil pertanian.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah yang mempunyai peluang untuk pengembangan.

5. Pembagian Pendapatan

Pembagian pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian nilai tambah antara pekerja dan pemilik modal. Nilai tambah yang diterima pekerja adalah nilai upah yang dibayar perusahaan. Sedangkan nilai tambah yang diterima pemilik modal adalah keuntungan perusahaan. Begitu juga



Ekonomi Pembangunan

dengan petani sendiri dengan adanya industri pengolahan hasil pertanian maka petani akan memperoleh nilai tambah dari hasil penjualan produksi usahatannya.

Melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri akan menciptakan distribusi pendapatan masyarakat sektor pertanian dan non pertanian. Tentunya pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut harus bersifat pengembangan industri hulu dan industri hilir di daerah tersebut. Dilain pihak dengan berkembangnya agribisnis dan agroindustri akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya seperti sektor transportasi serta perdagangan.

6. Pengetahuan

Untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan dan membangun masyarakat desa guna memenuhi kebutuhan akan pangan dan komoditas pertanian lainnya secara berkesinambungan maka langkah strategis yang patut dilakukan adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Di sisi lain, penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada para petani dapat meningkatkan kemampuan petani atau keterampilan untuk mengusahakan usahatani yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mempertinggi pendapatannya.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah sektor pertanian yang tangguh sehingga dapat mendukung sektor industri. Sasaran untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja serta meratakan pembangunan. Dengan majunya sektor pertanian dapat merangsang pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Supaya sektor pertanian berperan penting dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, salah satu cara yang terbaik adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Melalui agribisnis dan agroindustri produk pertanian dapat memberikan nilai tambah tinggi yang dapat diperoleh petani, di samping dapat memberikan efek multiplier terhadap sektor perekonomian lain. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem pengembangan industri hilir dan industri hulu.



Di daerah sebagian besar rakyat adalah petani, karena itu menjadi tugas semua anasir yang terkait untuk mengadakan perbaikan lahan dan menyiapkan rencana pembangunan pertanian. Keberhasilan rencana bergantung kepada seberapa jauh produktivitas petani dapat ditingkatkan. Peningkatan produksi pertanian adalah penting untuk memenuhi bahan mentah keperluan industri, untuk melestarikan swasembada pangan, mengendalikan harga, memperbesar sumber untuk keperluan pembangunan pemanfaatan secara efektif dan efisien atas sumber tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan terutama di daerah pedesaan.

Pada awal tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang industri mencapai 11 persen sedangkan di bidang pertanian 3 persen. Sementara di daerah pada pertengahan tahun 1990an pertumbuhan sektor industri mencapai 14,8 persen sementara sektor pertanian sebesar 4,79 persen. Hal ini merupakan ketimpangan yang harus diperhatikan, dalam bentuk hambatan produktivitas, hambatan dalam tenaga terampil dan hambatan dalam akses teknologi.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan perhatian dalam bidang pertanian terutama yang menyangkut waktu, sarana dan prasarana, investasi dan teknologi yang menyokong bidang pertanian. Walaupun terjadi penekanan yang semakin besar dalam industri, namun pada saat ini pertanian masih merupakan sektor ekonomi potensial dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing daerah.

Agar sasaran pembangunan pertanian yang dimaksudkan tetap mampu memberikan sumbangan nyata pada perekonomian daerah Riau, maka berbagai upaya perlu dikembangkan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1) Tetap memperhatikan prinsip keunggulan komparatif; 2) Terus meningkatkan keterampilan masyarakat setempat; 3) Terus meningkatkan produksi bahan baku yang berkesinambungan; dan 4) Mengembangkan diversifikasi dan intensifikasi pertanian.

Dari keempat upaya ini, maka dimasa datang sektor pertanian mampu berperan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam bentuk sumbangan terhadap hasil pertanian, pangsa pasar dari hasil pertanian, faktor produksi pertanian atau lainnya, dan devisa yang semakin besar. Perhatian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
https://eprints.uiriau.ac.id/



Ekonomi Pembangunan

dalam menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri sangat besar sekali faedahnya terutama bagi sektor pertanian di daerah pedesaan. Pada saat ini sektor pertanian bagi pemerintah daerah Riau mendapat prioritas karena sumbangan sektor pertanian tersebut dalam perekonomian daerah memegang peranan penting.

Petani sebagai titik tolak pembangunan pertanian, dan orang yang mempunyai bidang usaha pembudidayaan pertanian mempunyai tiga aspirasi dasar atau sasaran usaha yaitu: (a) Meningkatkan pendapatan, dengan usaha itu petani ingin menjadi lebih banyak penghasilannya; (b) Peningkatan konsumsi, diharapkan konsumsinya dapat meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; dan (c) Pemupukan modal agar usahanya dapat berkembang lebih baik. Petani ingin memperoleh kemakmuran dari barang-barang yang lebih banyak untuk memenuhi kepuasan hidupnya.

Petani sebagai produsen komoditas pertanian melakukan serangkaian kegiatan ekonomi dalam suatu usahatani. Cabang-cabang kegiatan ekonomi dalam usahatani itu bisa berupa peternakan, perikanan, persawahan, perkebunan ataupun peme-liharaan bunga, sayur-mayur maupun buah-buahan dalam pekarangan rumah. Kesemua cabang usaha itu dipadukan dalam usahatani yang optimal dalam mencapai ketiga sasaran usaha tersebut di atas. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Ke depan masyarakat petani di pedesaan diharapkan menjadi pendukung pertanian tangguh yang diharapkan, yakni, terciptanya pertanian yang dinamik yang dapat mempertahankan swasembada pangan, mendukung sektor industri, meningkatkan ekspor non-migas, memberikan lapangan kerja yang lebih luas, mempertahankan sumberdaya alam dan lingkungan, serta mendukung pembangunan desa. Dengan kata lain pertanian tangguh juga dapat digambarkan sebagai: Pertanian yang dinamik yang bisa terjadi bila didukung oleh adanya petani yang berfikir maju dan mandiri, berorientasi permintaan pasar, dan efisiensi. Pertanian yang tangguh itu tercipta bila para petani memiliki kedudukan tawar menawar (*bargaining position*) dan memiliki daya beli yang kuat.

Pembangunan pedesaan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional ditopang oleh pembangunan pertanian yang bertujuan



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

menciptakan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Peranan penelitian dan pengembangan yang disertai dengan penyuluhan dan pendidikan di bidang pertanian tetap diperlukan guna menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian peranan penyuluhan pertanian sangat penting artinya guna meningkatkan kemampuan masyarakat tani dalam mengelola dan pengembangan usahatani. Produktivitas lahan yang dikelola dapat lebih ditingkatkan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatannya.

Pada hakekatnya untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri adalah petani, tentu saja peran ini sangat strategis kedudukannya karena menyangkut kelompok masyarakat terbanyak di daerah Riau. Oleh karena usaha-usaha yang dilakukan di sektor pertanian ini di samping meningkatkan produktivitas juga harus dapat meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen. Peningkatan dan perubahan pendapatan akan dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu produksi yang diperoleh dari usahatani yang dikelolanya dan tingkat harga komoditas yang diterima petani.

Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan pemanfaatan faktor-faktor produksi optimum mungkin serta melalui diversifikasi dan intensifikasi produk pertanian. Sedangkan peningkatan harga dapat dilakukan dengan perbaikan mutu, perluasan pasar, spesialisasi produk pertanian serta melalui pengolahan lebih lanjut produk pertanian melalui agroindustri.

Selanjutnya peluang pengembangan agribisnis dan agroindustri tidak terlepas dari tujuan pembangunan pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri di era mendatang yaitu: 1) Meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi pertanian dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian yang berwawasan lingkungan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian yang berdaya saing tinggi; 2) Meningkatkan kualitas konsumsi gizi masyarakat melalui diversifikasi konsumsi dan diversifikasi penyediaan pangan dan gizi dari sector pertanian; 3) Mendorong dan meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan melalui pemanfaatan keterkaitan ekonomi sektoral dan sistem agribisnis; dan 4) Mendorong peningkatan pertumbuhan industri dan penerimaan devisa melalui penyediaan bahan baku yang cukup dan peningkatan nilai ekspor hasil pertanian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sejalan dengan strategi ini, untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam dekade mendatang usaha-usaha pokok pembangunan pertanian meliputi; 1) Pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pertanian; 2) Peningkatan rehabilitasi sumberdaya pertanian; dan 3) Pengembangan demokrasi ekonomi di sektor pertanian. Ketiga usaha pokok tersebut merupakan kerangka meningkatkan citra pertanian dan kualitas sumberdaya manusia pertanian.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, maka pertanian perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sumberdaya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganeekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dan terpadu, serta penggunaan teknologi, penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan demikian usaha pertanian berskala besar dengan sistem pertanian modern yang menghasilkan produksi pertanian yang mampu bersaing di pasar internasional terus dikembangkan dan diintensifkan dengan tetap memperhatikan kaitannya yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan pertanian rakyat.

Perspektif pengembangan agribisnis dan agroindustri merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang mempunyai kemampuan fisik dan daya nalar yang prima sehingga pengembangan pertanian mengarah pada industrialisasi pertanian. Pada struktur masyarakat daerah Riau unit terkecil pendukung ketangguhan perekonomian pedesaan adalah rumah tangga, maka kelompok sasaran terkecil dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini penekanan hendaknya diarahkan pada pembinaan rumah tangga petani.

Untuk menunjang pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri adalah menciptakan lapangan kerja di daerah yang relatif padat



tenaga kerjanya dan mengusahakan pemanfaatan sumberdaya alam seoptimal mungkin sehingga tujuan pembangunan ekonomi melalui pembangunan pertanian dapat tercapai.

Pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut diperlukan agar terciptanya keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga proses transformasi struktur perekonomian berjalan seimbang dan efisien dari dominasi sektor pertanian menjadi dominasi sektor industri.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB VI KENDALA PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Ketimpangan pembangunan pada masa lalu lebih memihak kepada sektor ekonomi perkotaan yaitu industri dan jasa, sementara ekonomi pedesaan yakni pertanian terabaikan. Tidak bisa dipungkiri, sejak krisis ekonomi tahun 1998 sektor pertanian memperlihatkan perubahan ekonomi di pedesaan menjadi lebih baik karena ditopang oleh komoditi yang berorientasi ekspor.

Pembangunan ke depan tidak bisa mengabaikan pembangunan pedesaan melalui pengembangan sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain: 1) Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan



Ekonomi Pembangunan

kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) Perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Harapan masa depan sektor pertanian tersebut tidak bisa diraih dengan begitu mudahnya. Keberhasilan sektor pertanian juga tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan agribisnis sebagai investasi dan penggerak pasar, dan partisipasi masyarakat tani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Selain dari ketiga komponen tersebut, di lapangan ditemukan kendala yang dihadapi oleh pelaku usahatani berupa adanya mafia pemasaran produk pertanian. Apakah produk usahatani skala kecil maupun skala besar. Pada skala kecil di pedesaan ditemukan mafia pemasaran hasil pertanian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul (istilah pedesaan toke) tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Mereka ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga di tingkat petani dengan berbagai dalih/alasan. Sementara di tingkat skala besar bentuk mafia pemasaran lebih penekanan kepada kekuatan modal dan kekuasaan pasar dan kartel produk pertanian (Almasdi Syahza, 2011b).

A. Kendala dalam Pembangunan Ekonomi di Pedesaan

Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80%) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan salah satu prioritasnya adalah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agribisnis. Untuk jenis agribisnis skala besar seperti perkebunan boleh dikatakan tidak banyak kendala karena sektor perkebunan yang dikembangkan selama ini berorientasi ekspor yang dikelola oleh perusahaan besar. Namun yang jadi masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usahatani skala kecil yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.



Dalam pengembangan sektor pertanian skala kecil tersebut masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Almasdi Syahza, 2011b): *Pertama*, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat pedesaan masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat desa (petani) terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah di pedesaan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi di pedesaan itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian di pedesaan merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
http://repositori.unsri.ac.id



Ekonomi Pembangunan

yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (*top down*) dan panyaluran inspirasi (*bottom up*) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dan harapan dalam pelaksanaan program pengetasan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan disajikan pada Tabel 6.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 6.1. Permasalahan dan Harapan pada Masyarakat Pedesaan

Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan
Kurangnya budaya kewirausahaan	Pertanian yang berorientasi pasar
Belum berfungsinya lembaga ekonomi pedesaan (koperasi)	Tersedianya pelayanan lembaga ekonomi pedesaan yang memadai bagi masyarakat
rendahnya kemampuan sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi
tingkat penguasaan ilmu dan teknologi yang rendah	Peningkatan ilmu dan penguasaan teknologi yang bisa mendukung inovasi.
Kurangnya informasi/penguasaan pasar	Peningkatan sistem manajemen informasi dan perluasan pangsa pasar
Keterbatasan modal untuk investasi dan modal kerja	Kecukupan modal guna pengembangan usaha dan kelanjutan usaha
Belum memiliki bentuk organisasi dan manajemen yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat	Terbentuknya organisasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat dan manajemen yang profesional
Masih dirasakan adanya budaya lebih menyukai produk impor oleh sebagian konsumen	Adanya budaya cinta produk nasional
Masih kurangnya <i>political will</i> pemerintah	Adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani

Sumber: Almasdi Syahza (2011c)

B. Kendala Dalam Pemasaran Produk Pertanian

Pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Pemasaran bertujuan untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke industri pengolah atau ke tangan konsumen akhir. Pemasaran produk pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Khusus untuk beberapa komoditi terutama komoditi yang berorientasi ekspor seperti komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, pinang, gambir dan lain sebagainya) sering dihadapi dengan kendala pemasaran, terutama di daerah pedesaan. Bagi petani keterbatasan pengetahuan dan ketidak jelian pasar justru dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis di daerah (yang dikenal dengan toke). Pelaku ini sering

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
http://repository.uiriau.ac.id
Chalcia Alita Universitas Riau



Ekonomi Pembangunan

memanfaatkan kondisi di pedesaan untuk mempermainkan harga, sehingga pihak petani selalu berada pada posisi tawar menawar yang rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu harga hanya ditentukan sepihak oleh para toke, akibatnya petani sebenarnya menghadapi pasar monopsonistic. Sebagai catatan toke adalah pedagang pengumpul hasil pertanian di pedesaan dengan memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana serta modal yang kuat. Pada waktu tertentu petani diberi pinjaman uang untuk kebutuhan harian tanpa tanggungan. Namun imbalannya adalah hasil pertanian harus dijual kepada toke. Pada kondisi ini si toke mempunyai kekuatan menawar dengan harga yang rendah. Dari sisi lain peluang si toke (kalau boleh disebut mafia pemasaran) memanfaatkan kelemahan pemasaran sektor pertanian di pedesaan.

Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen). Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, (antara lain Almasdi Syahza, 2011c):

1. Kesenambungan produksi

Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu: *Pertama*, volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil (*small scale farming*). Pada umumnya petani melakukan kegiatan usahatani dengan luas lahan yang sempit, yaitu kurang dari 0,5 ha. Di samping itu, teknologi yang digunakan masih sederhana dan belum dikelola secara intensif, sehingga produksinya belum optimal. *Kedua*, produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan pada saat musim produksi yang dihasilkan melimpah sehingga harga jual produk tersebut cenderung menurun. Sebaliknya pada saat tidak musim produk yang tersedia terbatas dan harga jual melambung tinggi, sehingga pedagang-pedagang pengumpul harus



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

menyediakan modal yang cukup besar untuk membeli produk tersebut. Bahkan pada saat-saat tertentu produk tersebut tidak tersedia sehingga perlu didatangkan dari daerah lain. *Ketiga*, lokasi usahatani yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Hal ini disebabkan karena letak lokasi usahatani antara satu petani dengan petani berjarau dan mereka selalu berusaha untuk mencari lokasi penanaman yang sesuai dengan keadaan tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman yang diusahakan. Kondisi tersebut menyulitkan pedagang pengumpul dalam pengumpulan dan pengangkutan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan produk yang dihasilkan petani. Kondisi tersebut akan memperbesar biaya pemasaran. *Keempat*, sifat produk pertanian yang mudah rusak, berat dan memerlukan banyak tempat. Hal ini menyebabkan ada pedagang-pedagang tertentu yang tidak mampu menjual produk pertanian, karena secara ekonomis lebih menguntungkan menjual produk industri (agroindustri). Ketidak senambungan produksi pertanian merupakan celah bagi mafia pemasaran di pedesaan, baik waktu membeli hasil pertanian maupun waktu menjual kebutuhan petani di pedesaan terutama kebutuhan harian sebagai pendukung aktifitas di pedesaan.

2. Kurang memadainya pasar

Kurang memadainya pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Ada tiga cara penetapan harga jual produk pertanian yaitu: sesuai dengan harga yang berlaku; tawar-menawar; dan borongan. Pemasaran sesuai dengan harga yang berlaku tergantung pada penawaran dan permintaan yang mengikuti mekanisme pasar. Penetapan harga melalui tawar-menawar lebih bersifat kekeluargaan, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka transaksi terlaksana. Praktek pemasaran dengan cara borongan terjadi karena keadaan keuangan petani yang masih lemah. Cara ini terjadi melalui pedagang perantara. Pedagang perantara ini membeli produk dengan jalan memberikan uang muka kepada petani. Hal ini dilakukan sebagai jaminan terhadap produk yang diingini pedagang bersangkutan, sehingga petani tidak punya keberanian untuk menjualnya kepada pedagang lain, karena ada rasa tanggung jawab pada janji yang telah disepakati antara petani dengan pedagang bersangkutan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Panjangnya saluran pemasaran

Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan (margin pemasaran yang tinggi) serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Hal tersebut cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan memperbesar biaya yang dibayarkan konsumen. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditandai dengan jumlah pedagang perantara yang harus dilalui mulai dari petani sampai ke konsumen akhir.

4. Rendahnya kemampuan tawar-menawar

Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Berdasarkan keadaan tersebut, maka yang meraih keuntungan besar pada umumnya adalah pihak pedagang. Keterbatasan modal tersebut berhubungan dengan: *Pertama*, sikap mental petani yang suka mendapatkan pinjaman kepada tengkulak dan pedagang perantara. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan petani yang tinggi pada pedagang perantara, sehingga petani selalu berada dalam posisi yang lemah; *Kedua*, fasilitas perkreditan yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain belum tahu tentang prosedur pinjaman, letak lembaga perkreditan yang jauh dari tempat tinggal, tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di samping itu khawatir terhadap risiko dan ketidakpastian selama proses produksi sehingga pada waktunya tidak mampu mengembalikan kredit. Ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang masalah perkreditan masih terbatas, serta tingkat kepercayaan petani yang masih rendah.

5. Berfluktuasinya harga

Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek yaitu per bulan, per minggu bahkan per hari atau dapat pula terjadi dalam jangka panjang.

Untuk komoditas pertanian yang cepat rusak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan pengaruh perubahan permintaan pasar kadang-kadang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sangat menyolok sekali sehingga harga yang berlaku berubah dengan cepat. Hal ini dapat diamati perubahan harga pasar yang berbeda pada pagi, siang dan sore hari. Pada saat musim produk melimpah harga rendah, sebaliknya pada saat tidak musim harga meningkat drastis. Keadaan tersebut menyebabkan petani sulit dalam melakukan perencanaan produksi, begitu juga dengan pedagang sulit dalam memperkirakan permintaan.

Kurang tersedianya informasi pasar

Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana dan untuk siapa produk dijual dengan keuntungan terbaik. Oleh sebab itu informasi pasar yang tepat dapat mengurangi resiko usaha sehingga pedagang dapat beroperasi dengan margin pemasaran yang rendah dan memberikan keuntungan bagi pedagang itu sendiri, produsen dan konsumen. Keterbatasan informasi pasar terkait dengan etak lokasi usahatani yang terpencil, pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data yang masih kurang dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan pendidikan formal masyarakat khususnya petani masih sangat rendah menyebabkan kemampuan untuk mencerna atau menganalisis sumber informasi sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan usahatani dilakukan tanpa melalui perencanaan yang matang. Dari pihak pemasaran, justru memanfaatkan kondisi ini untuk menekan harga jual demi mendapatkan keuntungan yang besar.

7. Kurang jelasnya jaringan pemasaran

Produsen dan/atau pedagang dari daerah sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada di daerah lain karena pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pemasaran tersebut dan tempat kegiatan berlangsung tidak diketahui. Di samping itu, tidak diketahui pula aturan-aturan yang berlaku dalam sistem tersebut. Hal ini menyebabkan produksi yang dihasilkan mengalami hambatan dalam hal perluasan jaringan pemasaran. Pada umumnya suatu jaringan pemasaran yang ada antara produsen dan pedagang memiliki suatu kesepakatan yang membentuk suatu ikatan yang kuat. Kesepakatan tersebut merupakan suatu rahasia tidak tertulis yang sulit untuk diketahui oleh pihak lain.



8. Rendahnya kualitas produksi

Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena penanganan kegiatan mulai dari pra panen sampai dengan panen yang belum dilakukan dengan baik. Masalah mutu produk yang dihasilkan juga ditentukan pada kegiatan pasca panen, seperti melalui standarisasi dan *grading*. Standarisasi dapat memperlancar proses muat-bongkar dan menghemat ruangan. *Grading* dapat menghilangkan keperluan inspeksi, memudahkan perbandingan harga, mengurangi praktek kecurangan, dan mempercepat terjadinya proses jual beli. Dengan demikian kedua kegiatan tersebut dapat melindungi barang dari kerusakan, di samping itu juga mengurangi biaya angkut dan biaya penyimpanan.

Namun demikian kedua kegiatan tersebut sulit dilakukan untuk produksi hasil pertanian yang cepat rusak. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi antara lain mutu produk dapat berubah setelah berada di tempat tujuan, susut dan/atau rusak karena pengangkutan, penanganan dan penyimpanan. Hal ini menyebabkan produk yang sebelumnya telah diklasifikasikan berdasarkan mutu tertentu sesuai dengan permintaan dapat berubah sehingga dapat saja ditolak atau dibeli dengan harga yang lebih murah.

9. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari prapanen sampai ke pascapanen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Di samping itu, pembinaan petani selama ini lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktek pemasaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan petani tentang pemasaran tetap saja kurang, sehingga subsistem pemasaran menjadi yang paling lemah dan perlu dibangun dalam sistem agribisnis.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di perkotaan, yaitu kemampuan para pedagang perantara juga masih terbatas. Hal ini dapat diamati dari kemampuan melakukan negosiasi dengan mitra dagang dan mitra usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



yang bertarif modern (swalayan, *supermarket*, restoran, hotel) masih langka. Padahal pasar modern merupakan peluang produk pertanian yang sangat bagus karena memberikan nilai tambah yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Terutama yang terkait dengan pemasaran produk pertanian. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Untuk memperkuat tawar menawar di tingkat petani, petani harus bersatu dalam satu wadah kepentingan bersama dalam bentuk organisasi ekonomi atau badan usaha di tingkat desa melalui kelompok-kelompok usaha seperti koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh petani dapat teratasi.

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Dalam koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perbankan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya usahatani pertanian melalui

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
https://repositori.uin-ar.id/handle/123456789/123456789



Ekonomi Pembangunan

sistem agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui pembentukan koperasi agribisnis di pedesaan, maka mafia pemasaran di level bawah secara bertahap akan dapat dihilangkan.

C. Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan. Pembangunan ekonomi terutama di pedesaan dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat, martabat masyarakat pedesaan sebagai upaya mewujudkan program pengetasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang mobilitas barang dan penduduk desa-kota. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan ketiga aspek tersebut.

1. Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan)

Program pengetasan kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi, oleh karena sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi namun memberikan konsekwensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dalam kehidupannya kurang bermarwah.

Khusus untuk daerah tertinggal pemilikan aset produktif seperti lahan sangat tidak adil, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dari hasil pengamatan terlihat penguasaan aset produktif (lahan) di pedesaan lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan orang kota. Dampak dari semuanya ini terhadap mekanisme pasar yang dipengaruhi secara signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Masyarakat lebih banyak berhadapan dengan pasar yang bersifat monopsoni.



2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan)

Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM sangat menentukan perubahan dan percepatan pembangunan disuatu daerah. Apabila kualitas SDM rendah, maka masyarakat akan sulit menerima perubahan, mereka tidak mampu mengikuti perubahan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kemajuan ekonomi. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan penguasaan teknologi. Individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitasnya yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan dapat mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar wilayah kabupaten/kota, serta antara pedesaan dengan perkotaan. Semuanya ini akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat di daerah pedesaan karena eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

D. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta usaha mikro lainnya, harus dikembangkan guna terwujudnya struktur perekonomian yang



Ekonomi Pembangunan

kuat dengan didukung oleh ekonomi rakyat yang tangguh. Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk: 1) memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/ partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan; 2) melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera (3 ha/KK); 3) melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan *forestry* (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan; 4) mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan; 5) mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah; 6) meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang; 7) mendorong upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan; 8) memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAB VII MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS AGRIBISNIS

Guna memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, salah satu caranya adalah mengembangkan sektor pertanian berbasis agribisnis. Kegiatan agribisnis akan dapat menciptakan nilai tambah. Secara sinergi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dengan aktivitas agribisnis tersebut.

A. Potensi Ekonomi Pedesaan

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup mengembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/ kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil (Pemda Riau dalam Almasdi Syahza, 2001a).

Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) usaha pertambangan; 6) sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan (Almasdi Syahza, 2003b).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah (Bustanul Arifin, 2001).

Faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis di Daerah Riau untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat (Almasdi Syahza, 2002a).

Menurut Bungaran Saragih (2001a), sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi



pertanian (Bungaran Saragih, 2001b). Organisasi bisnis di pedesaan ini berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian.

D. Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, dan petani tradisional (subsisten).

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpertanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial (Almasdi Syahza, 2002b).

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya, sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Ekonomi Pembangunan

menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain.

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Almasdi Syahza, 2003c).

Untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain: dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

C. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda saat ini telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijakan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan pertanian dan industri yang berbasis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap goncang-goncang mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2003a).

Dalam mengatasi krisis ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis akan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani. Pertanian merupakan mata pencarian pokok masyarakat pedesaan karena di pedesaan memang sesuai untuk kegiatan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, gambir, kakau, dan lainnya. Dari sektor perkebunan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan petani, karena dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan keluarga. Namun sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan perkebunan kehidupannya sangat memprihatinkan, karena keterbatasan sumberdaya yang mereka



Ekonomi Pembangunan

memiliki, antara lain: modal, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pemasaran produk pertanian. Dari sisi lain juga masih banyaknya daerah terisolir dan terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat petani untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah (Almasdi Syahza, 2001c).

Guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan tersebut, maka perlu ditemukan suatu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani pedesaan. Dengan cara ini akan dapat membuka daerah pemasaran produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

D. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

Sistem Agribisnis adalah semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan usahatani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi: 1) subsistem pengadaan sarana produksi; 2) subsistem produksi; 3) subsistem pengolahan hasil; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem kelembagaan. Agar semua subsistem itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, maka perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga yang mendukung.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis, antara lain: 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung ekonomi pedesaan tersebut disajikan pada Gambar 7.1.

1. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) melalui lembaga penelitian, atau pusat penelitian sangat memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran PT ini memiliki tiga dimensi kekuatan. Dimensi pertama PT harus dapat menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM),



1. Ditinjau dari segi sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan daerah. Dimensi kedua mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga merupakan perumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Di samping itu sebagai lembaga independen, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis pedesaan.

2. Ditinjau dari segi sumberdaya manusia (SDM) termasuk ketersediaan tenaga kerja, keterampilan, pendidikan, pelatihan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Ditinjau dari segi sumberdaya modal (SDM) termasuk ketersediaan modal, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Ditinjau dari segi sumberdaya teknologi (SDM) termasuk ketersediaan teknologi, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

5. Ditinjau dari segi sumberdaya lingkungan (SDM) termasuk ketersediaan lingkungan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

6. Ditinjau dari segi sumberdaya kelembagaan (SDM) termasuk ketersediaan kelembagaan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

7. Ditinjau dari segi sumberdaya informasi (SDM) termasuk ketersediaan informasi, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

8. Ditinjau dari segi sumberdaya komunikasi (SDM) termasuk ketersediaan komunikasi, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

9. Ditinjau dari segi sumberdaya organisasi (SDM) termasuk ketersediaan organisasi, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

10. Ditinjau dari segi sumberdaya manajemen (SDM) termasuk ketersediaan manajemen, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

11. Ditinjau dari segi sumberdaya kepemimpinan (SDM) termasuk ketersediaan kepemimpinan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

12. Ditinjau dari segi sumberdaya kewirausahaan (SDM) termasuk ketersediaan kewirausahaan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

13. Ditinjau dari segi sumberdaya inovasi (SDM) termasuk ketersediaan inovasi, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

14. Ditinjau dari segi sumberdaya kreativitas (SDM) termasuk ketersediaan kreativitas, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

15. Ditinjau dari segi sumberdaya daya kritis (SDM) termasuk ketersediaan daya kritis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

16. Ditinjau dari segi sumberdaya daya juang (SDM) termasuk ketersediaan daya juang, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

17. Ditinjau dari segi sumberdaya daya tahan (SDM) termasuk ketersediaan daya tahan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

18. Ditinjau dari segi sumberdaya daya pantang (SDM) termasuk ketersediaan daya pantang, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

19. Ditinjau dari segi sumberdaya daya optimis (SDM) termasuk ketersediaan daya optimis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

20. Ditinjau dari segi sumberdaya daya realistis (SDM) termasuk ketersediaan daya realistis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

21. Ditinjau dari segi sumberdaya daya pragmatis (SDM) termasuk ketersediaan daya pragmatis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

22. Ditinjau dari segi sumberdaya daya rasional (SDM) termasuk ketersediaan daya rasional, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

23. Ditinjau dari segi sumberdaya daya emosional (SDM) termasuk ketersediaan daya emosional, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

24. Ditinjau dari segi sumberdaya daya intuitif (SDM) termasuk ketersediaan daya intuitif, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

25. Ditinjau dari segi sumberdaya daya灵感 (SDM) termasuk ketersediaan daya灵感, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

26. Ditinjau dari segi sumberdaya daya直觉 (SDM) termasuk ketersediaan daya直觉, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

27. Ditinjau dari segi sumberdaya daya顿悟 (SDM) termasuk ketersediaan daya顿悟, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

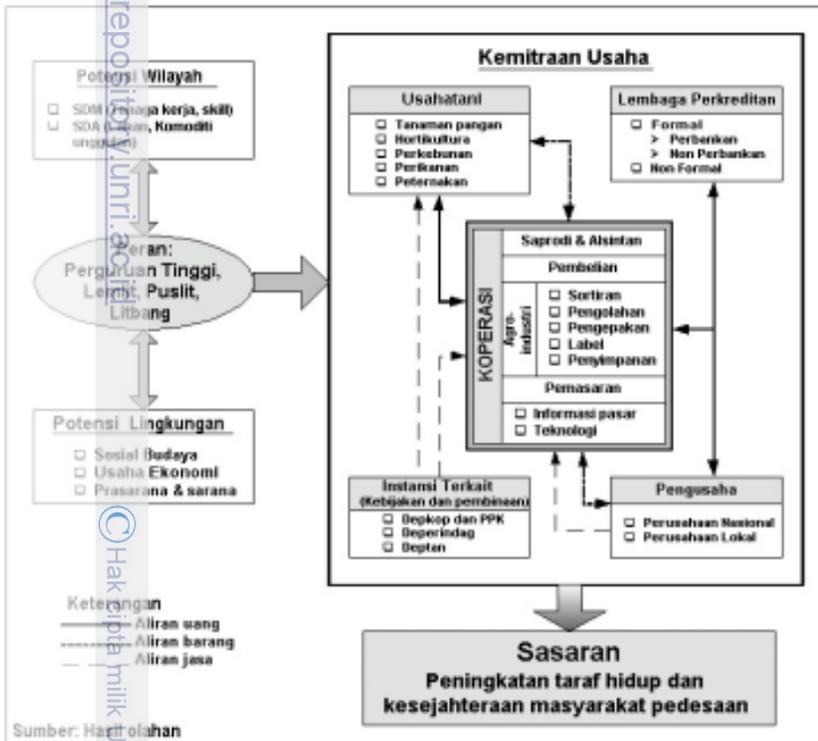
28. Ditinjau dari segi sumberdaya daya顿悟 (SDM) termasuk ketersediaan daya顿悟, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

29. Ditinjau dari segi sumberdaya daya顿悟 (SDM) termasuk ketersediaan daya顿悟, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

30. Ditinjau dari segi sumberdaya daya顿悟 (SDM) termasuk ketersediaan daya顿悟, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan daerah. Dimensi kedua mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga merupakan perumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Di samping itu sebagai lembaga independen, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis pedesaan.

Pada kelompok mitra usaha agribisnis terlibat lima kelompok pelaku agribisnis, yaitu; lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah. Kelima kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan agribisnis.



Gambar 7.1 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat/mesin pertanian, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan agribisnis di pedesaan. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk pertanian yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, swalayan, restoran, hotel, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

3. Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasis agribisnis ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

4. Pengusaha tani (petani)

Kurang berkembangnya kegiatan pertanian yang berbasis agribisnis di pedesaan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: tingkat pengetahuan petani, pemilikan modal, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi semuanya ini harus melalui suatu organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah



Ekonomi Pembangunan

pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Pada koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakekatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolahan produk pertanian (agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikian konsep agroestet di pedesaan dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002a).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Koperasi sebagai unit usaha dibidang agribisnis, secara umum mencakup bidang-bidang usaha yang sangat luas yang pada prinsipnya dapat dikelompokkan kepada lima komponen utama, yaitu; 1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat-alat dan mesin-mesin pertanian; 2) bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian; 3) bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri); 4) bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian; dan 5) bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, atau penyimpanan (Almasdi Syahza, 2003b).

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pada hakekatnya agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository University of Riau
https://repository.uiniraqi.ac.id
Hak Cipta Dilindungi Universitas Riau

BAB VIII MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN AGROESTATE KELAPA SAWIT

Kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat di pedesaan, karena kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memberi harapan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan subsektor yang lain. Tingginya minat masyarakat terhadap tanaman kelapa sawit disebabkan karena adanya jaminan pasar dari tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani. Begitu juga pendapatan petani kelapa sawit jauh lebih tinggi dari pendapatan usahatani yang lain.

A. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup mengembirakan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 35,63 % (tahun 2008 tanpa migas), namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan, kecuali pendapatan petani kelapa sawit, yakni Rp 40.200.000 per tahun pada tahun 2009 (Almasdi Syahza, 2009b).

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR) dan kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas (Almasdi Syahza, 2003c).

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan Daerah Riau memungkinkan dikembangkan



Ekonomi Pembangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perkebunan kelapa sawit. Kondisi Daerah Riau yang relatif datar akan memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanam kelapa sawit akan membuat produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama IMS-GT dan IMT-GT, tentu saja akan membuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 1999).

Karena alasan di atas maka kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat diluar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepatnya di daerah Riau.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas mencapai 1.119.798 ha pada akhir tahun 2001, maka pada saat ini daerah Riau mempunyai kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit (Almasdi Syahza, 2003a). Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu saja akan diikuti oleh produksi tandan buah segar (TBS). Hal ini akan menuntut munculnya industri pengolah dari TBS tersebut. Karena itu untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan perlu difikirkan strategi pembangunan yang berbasis pedesaan, khususnya pembangunan perkebunan kelapa sawit dan industri hilirnya.



Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara nyata, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Bustanul Arifin (2001) pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat ditekan. Secara teoritis salah satu sebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan adalah kurangnya kepemilikan terhadap faktor produksi dan keterampilan yang mengakibatkan rendahnya kemampuan berproduksi dan rendahnya pendapatan keluarga

B. Tujuan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Pembangunan merupakan suatu upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka memacu pembangunan di Riau, khususnya pembangunan perkebunan rakyat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi pedesaan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidaklah mudah, karena pembangunan harus memperhatikan tiga aspek (kelayakan), yaitu kelayakan teknis, kelayakan usaha, kelayakan sosial ekonomi dan budaya. Begitu juga pembangunan perkebunan rakyat yang direncanakan di daerah pedesaan harus memperhatikan ketiga aspek tersebut. Secara spesifik pembangunan tersebut bertujuan, antara lain: 1) mendukung perekonomian lokal dan pembangunan daerah; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;



Ekonomi Pembangunan

3) membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya bagi masyarakat tempatan dan sekitarnya; 4) turut meningkatkan pendapatan asli daerah nasional melalui produksi perkebunan.

Sebagai salah satu aktivitas ekonomi, kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit di pedesaan tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya atau memberikan pengaruh eksternal, terutama lingkungan sosial ekonomi. Pengaruh eksternal terhadap lingkungan sosial ekonomi wilayah dapat diidentifikasi dari adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam upaya peningkatan fungsi pelayanan, terutama bagi daerah pedesaan.

Sebagaimana dengan aktivitas pembangunan sektor lain, pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat diperkirakan akan memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi masyarakat pedesaan dan sekitarnya. Manfaat kegiatan tersebut terhadap aspek sosial ekonomi antara lain adalah: 1) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan sekitarnya; dan 3) memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung akan memberikan dampak terhadap komponen sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar antara lain: 1) Kegiatan pembinaan masyarakat desa dan di masyarakat sekitar perkebunan; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan pembangunan perkebunan akan memerlukan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan. Kegiatan pembangunan perkebunan ini sangat memungkinkan banyak menyerap tenaga kerja langsung, disamping itu kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan secara manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.



Dengan adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan rakyat, khususnya pengadaan sarana prasarana akan menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Disamping itu kebutuhan hidup masyarakat di *base camp* proyek perkebunan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat setempat dalam pengadaan kebutuhan perusahaan, merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

Pengusahaan perkebunan kelapa sawit melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses pembangunan (*backward linkages*) serta kegiatan ekonomi pada waktu pasca pembangunan (*foreward linkages*). *Backward linkages* yang diperkirakan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja, bahan dan material yang dibutuhkan dalam pengusahaan perkebunan. Sedangkan *foreward linkages* yang muncul adalah jasa angkutan, perdagangan.

Apabila dikaji dari struktur biaya pembangunan perkebunan rakyat yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar, yakni diperkirakan rata-rata sebesar $\pm 64\%$ dari total pembiayaan tahunannya (Almasdi Syahza, 2003c). Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa memberikan *multiplier effect*, terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan dan lapangan berusaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sebagai bahan perbandingan pada Tabel 8.1 disajikan perkiraan penyerapan tenaga kerja pada kegiatan perkebunan mulai dari persemaian sampai tanaman belum menghasilkan (TBM) pada umur 3 tahun.

Tabel 8.1: Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja Per Ha pada Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

No	Uraian Kegiatan	Tenaga Kerja Per Ha Per Tahun		
		Tenaga Kerja Lepas	Tenaga Kerja Terampil	Mandor
1	Tahap Persemaian ¹⁾	196	-	12
2	Pembukaan lahan ²⁾	25	4	1
3	Penanaman, pemeliharaan (TBM-0)	76	-	9
4	Pemeliharaan (TBM-1)	74	-	3
5	Pemeliharaan (TBM-2)	82	-	3
6	Pemeliharaan (TBM-3)	61	-	3

Sumber: Almasdi Syahza, 2003g

Keterangan: 1) Perhitungan untuk 3 bulan

2) Tenaga terampil termasuk tenaga operator dozer 1 orang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif dapat diindikasikan oleh peningkatan pendapatan per kapitanya. Salah satu parameter yang paling mudah dilihat secara kuantitatif adalah penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan pendapatan dari upah tenaga kerja. Dalam analisis ini, diasumsikan upah tenaga kerja sebesar Rp 18.000,- per hari kerja. Dengan asumsi jumlah hari kerja selama 25 hari per bulan, maka peningkatan pendapatan dari upah ini sebesar Rp 450.000,- per bulan atau sekitar Rp 5.400.000,- per tahun. Disamping memperoleh pendapatan dari upah tenaga kerja, kegiatan usahatani masyarakat setempat masih dapat dilaksanakan sehingga nilai tersebut merupakan tambahan dari pendapatan yang sudah ada dari kegiatan pertaniannya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat adanya aktivitas perkebunan rakyat ini tidak seluruhnya dapat dinilai secara kuantitatif. Peningkatan fasilitas sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat umum (sarana pendidikan, kesehatan, ibadah), bimbingan dan penyuluhan juga



dapat dinilai sebagai suatu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Perkebunan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan devisa bagi daerah maupun pemerintah pusat. Pembangunan perkebunan akan sangat membantu peningkatan pendapatan daerah. Kegiatan pembangunan perkebunan yang dilakukan di daerah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memenuhi kebutuhan baku bagi pabrik kelapa sawit (PKS) serta menjamin kehidupan petani secara berkesinambungan.

Begitu juga investasi pada pembangunan perkebunan rakyat di pedesaan akan memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan wilayah dan menyediakan *investible surplus* untuk mendukung investasi sektor perkebunan maupun sektor lainnya.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana proporsi keuangan yang berasal dari pembayaran kewajiban finansial perusahaan lebih besar untuk pemerintah daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan PAD setempat secara nyata sehingga pembangunan perkebunan rakyat di daerah pedesaan akan membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Model Pembangunan Agroestate Kelapa Sawit

Model yang disajikan dalam konsep ini dimaksudkan untuk mencoba menetralsir dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani plasma dengan perusahaan inti, disamping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit atau disebut agroestate



Ekonomi Pembangunan

kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Khusus untuk daerah Riau bentuk kegiatan ini sangat sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001, dimana pada pasal 12 ayat 6 dinyatakan hak petani peserta yaitu; memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS perusahaan inti.

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak sawit. Keterkaitan antara sumber penghasil bahan baku dan agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan. Konsep model agroestate ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahataniya maupun pabrik pengolahannya.

Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efisiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis, dimana kelebagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu: pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri.

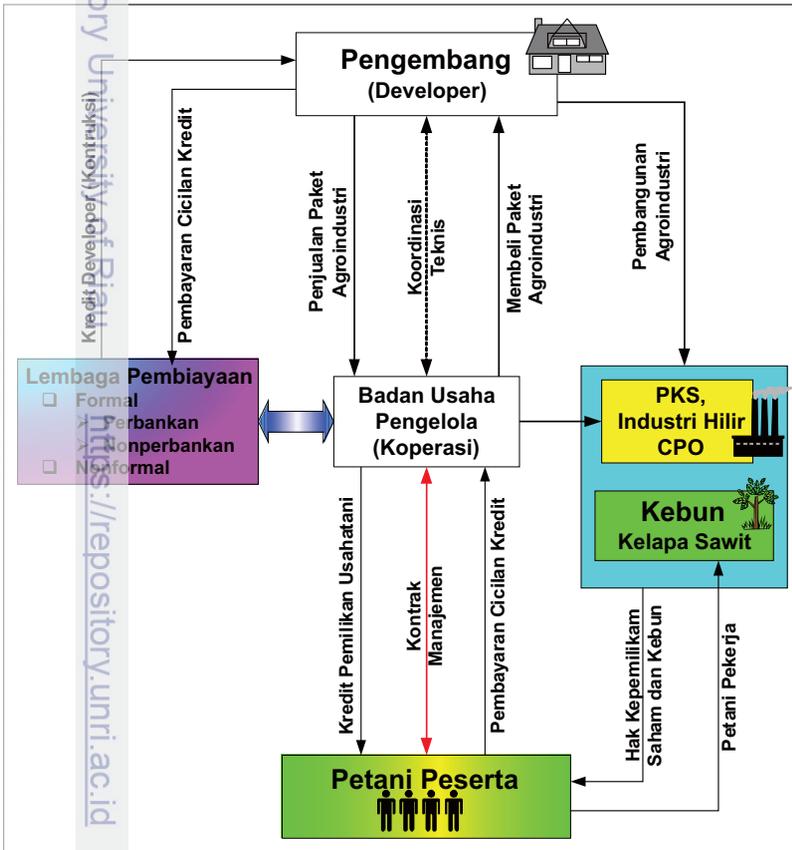
Secara singkat konsep model agribisnis kelapa sawit yang akan melibatkan masyarakat pedesaan disajikan pada Gambar 8.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 8.1. Skema Konseptual Mitra Usaha Agroestate Kelapa Sawit di Pedesaan (Almasdi Syahza, 2003g)

Untuk lebih jelasnya model agroestate tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Perusahaan (developer) kebun dan pabrik yang sudah dibangun dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.
- c. Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen yang telah disepakati. Perusahaan jasa manajemen akan mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik dan profesional.
- d. Kepemilikan saham PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 8.2.



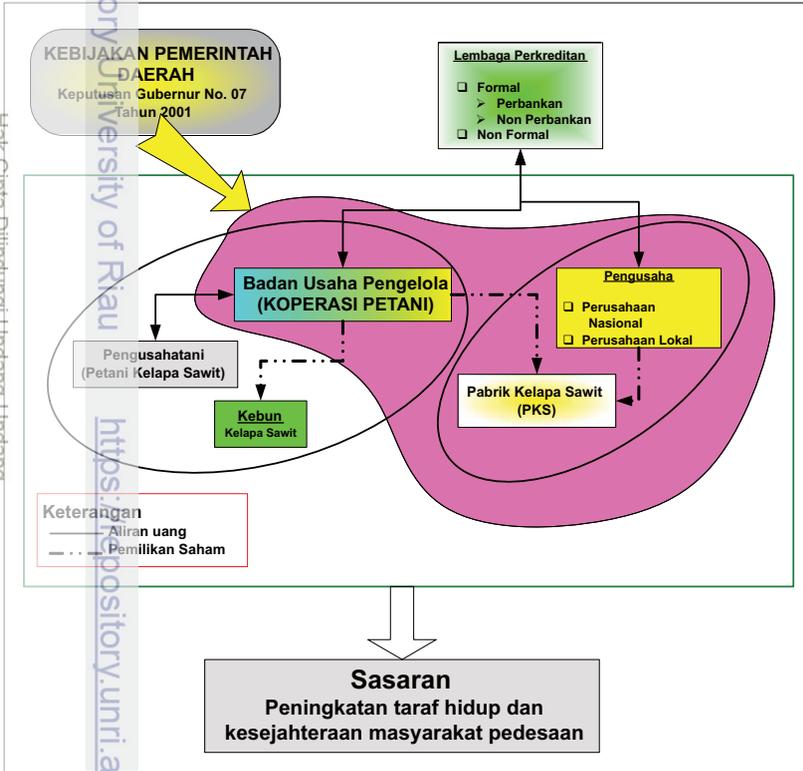
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 8.1 Model Mitra Usaha Kepemilikan Modal pada Pembangunan Agroestate Kelapa Sawit di Pedesaan (Almasdi Syahza, 2003g)

- e. Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.
- f. Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja dan dividen saham pabrik. Keuntungan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.

Lingkup kewenangan kerja dan tanggung jawab pelaku atau aktor pembangunan agroestate kelapa sawit dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perusahaan Pengembang atau Developer

- (1) Melakukan survey/penelitian lapangan yang meliputi aspek kesesuaian lahan, teknologi yang dipakai, transportasi, komoditi yang dikembangkan, produk yang dihasilkan, keuangan atau sumber dana dan pemasaran.
- (2) Membuat studi kelayakan pembangunan agroestate kelapa sawit meliputi pembangunan usahatani dan pabrik pengolah untuk petani peserta.
- (3) Mempresentasikan studi kelayakan kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada perbankan atau sumber dana, instansi pemerintah, calon konsumen dan lain-lainnya.
- (4) Melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan tentang kebutuhan dana dengan pihak perbankan atau sumber dana yang meliputi kredit untuk pembangun agroestate (usahatani, pabrik) dan kredit untuk petani peserta berupa usahatani dan saham pabrik yang telah dibangun oleh developer dengan bunga (interest) yang layak usaha (finansial).
- (5) Membangun agroestate yang meliputi usahatani dan pabrik pengolahan (industri) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- (6) Merawat usahatani sampai usahatani tersebut menghasilkan.
- (7) Melakukan pemasaran (penjualan) unit usahatani, saham pabrik secara paket kepada masyarakat konsumen calon petani peserta.
- (8) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Pengelola (koperasi) dalam hal ini koperasi untuk memberlakukan persyaratan teknis dan administrasi dalam proses perawatan maupun penjualan paket unit usahatani, saham pabrik pengolah (industri).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

(9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Badan Usaha Pengelola (Koperasi)

- (1) Secara umum mengikat kontrak manajemen dengan petani peserta yang di dalamnya memuat antara lain peraturan dan persyaratan sebagai berikut: a) Badan Usaha Pengelola akan mengelola agroestate secara profesional untuk kemajuan agroestate dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi petani peserta; b) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan (fee) untuk Badan Usaha Pengelola; c) Aturan-aturan pemutusan hubungan kontrak antara Badan Usaha Pengelola dengan petani peserta; d) Perpindahan kepemilikan unit usahatani dan saham pabrik pengolahan (industri) harus sepengetahuan dan persetujuan Badan Usaha Pengelola; e) Petani peserta tidak diperkenankan merubah jenis tanaman pokok, kecuali persetujuan Badan Usaha Pengelola; f) Petani peserta menjual hasil panen usahatannya kepada pabrik pengolahan (industri) melalui Badan Usaha Pengelola; g) Petani peserta akan membayar cicilan kredit sesuai jadwal melalui Badan Usaha Pengelola; dan h) Petani peserta mengikuti pola perawatan usahatani dan tata cara panen sesuai dengan arahan Badan Usaha Pengelola.
- (2) Susunan organisasi Badan Usaha pengelola (Koperasi) secara teknis menyangkut dengan lingkup kerja Badan Usaha Pengelola adalah: a) Melaksanakan koordinasi dengan developer tentang pembangunan usahatani, perawatan usahatani, dan penjualan unit usaha; b) Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen usahatani; c) Menjadikan dan mendistribusikan sarana produksi; d) Mengatur tata cara panen, transportasi hasil panen ke pabrik; e) Mengatur, membimbing dan membina keterampilan teknis perawatan dan panen usahatani; f) Menampung, memproses dalam pabrik hasil usahatani, dan memasarkan produk akhir; g) Memberlakukan dan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pabrik yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan peningkatan nilai tambah (*value added*) berdasarkan *zero defect*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. **Lebaga Pembiayaan**

- (1) Menyediakan dana konstruksi kepada developer untuk pembangunan usahatani dan pabrik kelapa sawit.
- (2) Menyediakan kredit usahatani dan saham pabrik kepada petani peserta.
- (3) Membuat dan melaksanakan administrasi individual tabungan petani peserta, baik untuk cost of living, tabungan peremajaan dan tabungan petani peserta lainnya.
- (4) Melakukan pengawasan pengembalian kredit baik kredit usahatani maupun pemilikan saham PKS.

d. **Petani Peserta**

- (1) Membeli paket agroestate yang terdiri dari unit usahatani dan saham pabrik pengolahan (industri).
- (2) Memanfaatkan dan mengembalikan kredit usahatani, saham pabrik pengolahan (industri) yang disediakan bank yang telah ditunjuk oleh pengembang (developer).
- (3) Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pengelola dan oleh instansi pemerintah terkait.
- (4) Mengikat kontrak manajemen dengan Badan Usaha Pengelola dan mentaati peraturan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.
- (5) Menjual hasil usahatani kepada pabrik melalui Badan Usaha Pengelola (Koperasi) dengan harga yang telah ditetapkan bersama.
- (6) Merawat usahatani dan lingkungan permukiman dengan semangat kerja keras dan berdasarkan bimbingan teknis dari Badan Usaha Pengelola.
- (7) Menunjuk wakil untuk menjadi komisaris di Badan Usaha Pengelola.

D. Mekanisme Kerja Agroestate Kelapa Sawit

Dalam model perusahaan agroestate terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama* kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik



industri yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer), sedangkan yang *kedua* adalah bisnis mengolah kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasil olahannya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola (koperasi), yaitu suatu badan usaha jasa manajemen pengelola sebagai operator atau administrator kebun dan pabrik).

Pembangunan agroestate kelapa sawit banyak pihak yang terlibat dalam bisnis pengembangan dan pengelolaan usaha agroestate tersebut, antara lain: developer, badan usaha pengelola, petani peserta, lembaga pembiayaan dan pihak yang terkait lainnya. Supaya kegiatan ini lancar maka diperlukan pengaturan mekanisme kerja yang baku/standar yang menjadi pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis agroestate, antara lain: a) mekanisme penjualan dan pembayaran paket; b) penjualan paket agroestate (usahatani modal penyertaan pabrik); c) pembayaran paket bagi petani; d) pemotongan cicilan paket untuk petani; e) pembayaran hasil usaha; f) pemanenan, sortasi dan penimbang; g) pengangkutan; h) pemeliharaan kebun; i) penetapan harga; j) supervisi internal; dan k) mekanisme rapat umum peserta tahunan (RUPT).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB IX

KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Hasil kajian memnunjukkan pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi, khususnya untuk daerah pedesaan. Pengaruh ini terlihat dari indikator, antara lain: *multiplier effect* ekonomi; indek kesejahteraan masyarakat; dan indek Kesenjangan Ekonomi.

A. Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 8,40%, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pedesaan Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2% sementara sektor industri melaju sebesar 14 persen. Namun pada tahun 2002 sektor pertanian sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan sebesar 6,06 persen, sedangkan sektor industri 12,47 persen. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan sektor pertanian cukup baik yaitu sebesar 6,79. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian karena ditunjang oleh tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sebagainya (Almasdi Syahza, 2007a).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini secara kuantitatif cukup menggembirakan, yaitu dengan rataan pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 6,79%. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan pembangunan Daerah Riau melalui program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa). Sampai saat ini kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat Riau.

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2002). Untuk lebih jelasnya perkembangan luas areal komoditi unggulan perkebunan di Daerah Riau disajikan pada Tabel 9.1.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

Tabel 9.1 Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan di Propinsi Riau Tahun 2002–2011 (dalam ha)

Tahun	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet
2002	1.312.661	622.796	566.130
2003	1.340.306	633.157	547.123
2004	1.392.232	639.340	544.735
2005	1.486.989	550.052	543.783
2006	1.530.150	546.927	528.697
2007	1.612.382	557.022	532.901
2008	1.673.551	542.749	528.655
2009	2.056.008	542.332	528.288
2010	2.103.174	525.398	499.490
2011	2.256.538	521.019	498.907
Pertumbuhan (%)	6,20	-1,96	-1,39

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2012

Tulisan ini mencoba mengidentifikasi dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. Dampak dari pembangunan tersebut akan terlihat dari beberapa indikator, antara lain:

- Angka *multiplier effect* ekonomi yang diciptakan dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di pedesaan
- Indeks kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- Indeks kesenjangan ekonomi antar golongan dan antar wilayah



B. Multiplier Effect Ekonomi

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit, tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti: membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, erta jasa perbankan. Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari sisi lain menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan masyarakat akan meningkat pula (Almasdi Syahza, 2007a).

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan utama pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah 1) menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 2) menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya serta industri penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

meningkatkan daya saing dan nilai tambah CPO dan produk turunannya (Almasdi Syahza, 2003).

Dari potensi yang ada, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Almasdi Syahza, 2007a).

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Selain besaran jumlah pendapatan pada masing-masing rumah tangga petani kelapa sawit, hal yang perlu dicermati dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu



Ekonomi Pembangunan

kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan.

Walaupun tidak semua kegiatan perkebunan memberikan atau menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tergantung kepada jenis investasi perkebunan (inti atau plasma) dan sektor ekonomi yang akan dilakukan. Investasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh kepada seberapa besar manfaat kegiatan perkebunan memberi tetesan pada masyarakat sekitarnya. Kebijakan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan perkebunan sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha. Rataan pendapatannya dari masyarakat pedesaan dari kelapa sawit sebesar 87,64% dan 12,36% bersumber dari pendapatan di luar perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Apabila dikaji dari struktur biaya pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Pendekatan penciptaan *multiplier effect* pada kegiatan perkebunan kelapa sawit digunakan formula sebagai berikut (Almasdi Syahza, 2004).

$$K = \frac{1}{1 - (MPC \times PSY)}$$

Keterangan: K adalah pengaruh ekonomi wilayah (*multiplier effect*); MPC merupakan proporsi pendapatan petani yang dibelanjakan di daerah tersebut; dan PSY adalah bagian dari pengeluaran petani yang menghasilkan pendapatan di daerah tersebut atau persen kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi oleh wilayah setempat. Semakin tinggi angka *multiplier effect* kegiatan perkebunan kelapa sawit (K) maka semakin tinggi pula perputaran uang di daerah pedesaan.



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Penelitian Almasdi Syahza (2006), pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi secara berantai, ini ditunjukkan dengan angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa. Nilai-nilai tersebut diperoleh dengan dasar dan asumsi sebagai berikut:

- 1) Persentase pendapatan petani sawit dibelanjakan di wilayah setempat (MPC) sekitar 84,15 %.
- 2) Kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi di wilayah setempat (PSY) sebesar 70,97 %, antara lain:
 - Kebutuhan peralatan pertanian ringan yang digunakan dalam mengelola teknis diproyeksikan mampu dipenuhi oleh wilayah setempat.
 - Pengadaan sarana prasarana penunjang yang disediakan oleh perusahaan perkebunan dan koperasi dapat dipenuhi oleh wilayah setempat.

C. Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Proses *forward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi,



perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (Almasdi Syahza, 2007c). Semua aktivitas ini akan meningkatkan indek kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya.

Dalam perhitungan ekonomi indek kesejahteraan dapat dilakukan dengan formula:

$$G = w_1g_1 + w_2g_2 + \dots + w_ig_i$$

Keterangan: G adalah indek pertumbuhan kesejahteraan (IPK); g_i adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke i ; dan w_i merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i .

Berdasarkan rumus IPK, pertumbuhan indek kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen (Tabel 9.2).

Pada tahun 1998 terjadi penurunan indek kesejahteraan sebesar -1,09. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 9.2. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

	1995		1998		2003		2006		2009	
	w	g	w	g	w	g	w	g	w	g
20 % terendah	0.0805	-0.0084	0.1513	0.0708	0.1169	-0.0344	0.1040	-0.0129	0.1127	-0.0087
20 % terendah kedua	0.1267	0.0090	0.1946	0.0679	0.1583	-0.0363	0.1590	0.0007	0.1547	0.0043
20 % terendah ketiga	0.1438	-0.0056	0.2152	0.0714	0.1831	-0.0321	0.1791	-0.0040	0.1841	-0.0050
20 % terendah keempat	0.1955	-0.0119	0.2010	0.0055	0.2107	0.0097	0.2260	0.0153	0.2197	0.0063
20 % tertinggi	0.4535	0.0167	0.2379	-0.2156	0.3309	0.0930	0.3319	0.0010	0.3288	0.0031
Indek Pertumbuhan Kesejahteraan	0.49		-1.09		1.72		0.18		0.12	

Sumber: Hasil penelitian Almasdi Syahza (1995, 1998, 2003, 2006, dan 2009)



Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 32,8 persen, sedangkan kelompok 60 persen rendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar -15,6 persen. Kemudian pada tahun 2006 memperlihatkan indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% rendah (miskin), ini dibuktikan dengan angka indeks pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,23. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan kesejahteraan. Sampai pada tahun 2009 indeks kesejahteraan masyarakat pedesaan masih bernilai positif.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2003) menunjukkan, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit baik dalam bentuk perusahaan maupun swadaya membutuhkan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
http://ojs.uiriau.ac.id/



Adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat makin tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat. Ini merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

D. Indeks Kesenjangan Ekonomi

Dari segi penanaman investasi yang dilaksanakannya, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan karena investasi pada beberapa daerah kabupaten/kota mempunyai *multiplier effect* yang kecil kecuali untuk sektor industri dan jasa di daerah perkotaan Dumai dan Pekanbaru.

Ada empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. *Pertama*, investasi sektor industri di daerah kabupaten/kota yang menyebabkan disparitas spasial semakin membesar disebabkan oleh industri milik swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta lebih mengutamakan target keuntungan, sementara investasi pemerintah lebih mengutamakan nilai manfaat untuk masyarakat; *Kedua*, kemungkinan industri dengan fasilitas PMDN dan PMA di masing-masing daerah kabupaten/kota ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan *multiplier effect* yang kecil sehingga tidak memperbesar PDRB daerah bersangkutan (seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN, walaupun nilainya kecil di suatu daerah kabupaten/kota tetapi mempunyai *multiplier effect* yang besar sehingga dapat mempertinggi PDRB daerah bersangkutan; *Ketiga*, penanaman investasi pada daerah kabupaten/kota baik PMDN maupun PMA terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan keempat, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik swasta yang bersumber PMDN dan PMA tertanam pada sektor sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

Untuk mengetahui perhitungan disparitas spasial atau *regional inequality* antara Kabupaten/kota di Riau digunakan Indek Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson berarti semakin besar juga disparitas antar daerah (disparitas spasial).

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}{Y}}$$

Keterangan:

- = nilai disparitas spasial atau regional
- = jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten/kota
- = jumlah penduduk Riau
- = pendapatan perkapita di masing-masing Kabupaten/kota
- = pendapatan perkapita Riau

Melalui hasil perhitungan Indeks Williamson pada Tabel 9.3, diketahui bagaimana peran investasi disektor perkebunan dalam mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau. Analisis ketimpangan di daerah Riau selama periode tahun 2004-2008 dilihat dari dua segi yaitu: 1) analisis tanpa subsektor perkebunan; dan 2) analisis memasukkan subsektor perkebunan. Analisis ini berpegang pada beberapa asumsi, antara lain: 1) sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berbasis ekonomi perkotaan; 2) Sektor pertanian berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini subsektor perkebunan memberikan peranan penting terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Ini terbukti dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditi unggulan daerah Riau.

Analisis disparitasl spasial menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang di dalamnya



merupakan akumulasi sumbangan seluruh kegiatan sektor ekonomi di daerah Riau tahun 2004-2010. Besarnya disparitas yang dinyatakan dalam Indeks Williamson disajikan pada Tabel 9.3. Data dasar yang digunakan ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat nilai ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau.

Tabel 9.3 Analisis Ketimpangan Antar Daerah, Tekanan Penduduk, Daya Dukung Lahan

Tahun	Indek Williamson		Tekanan Penduduk		DDL
	Tanpa Perkebunan	Termasuk Perkebunan	Termasuk Perkebunan	Tanpa Perkebunan	
2004	0.6309	0.3429	0.07	6.01	129.30
2005	0.5866	0.3146	0.08	7.57	130.26
2006	0.4211	0.2802	0.14	9.84	121.20
2007	0.4661	0.2527	0.16	10.39	147.68
2008	0.4117	0.2156	0.92	11.04	138.77
2009	0.4021	0.2132	2.13	15.62	152.81
2010	0.4101	0.1993	3.44	17.09	162.34

Sumber: Almasdi Syahza (2011)

Perhitungan tanpa memasukkan subsektor perkebunan, memperlihatkan nilai ketimpangan cukup besar. Selama periode tahun 2004-2010 nilai ketimpangan berkisar 0,4101-06309. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan sedang. Ketimpangan ini disebabkan karena tanpa subsektor perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis perkotaan, yaitu sektor industri dan jasa. Keterikatan sektor industri dan jasa terhadap ekonomi pedesaan sangat kecil. Namun apabila analisis memasukkan data subsektor perkebunan, ketimpangan antar daerah lebih kecil, selama periode tahun 2004-2010 berkisar antara 0,1993-0,3429. Angka indeks ini memperlihatkan ketimpangan rendah.

Berdasarkan angka Indeks Williamson tersebut dapat diberikan interpretasi bahwa hasil pembangunan Daerah Riau yang mengandalkan sektor industri dan jasa selama periode tahun 2004-2010 menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. Akibat ini akan menimbulkan juga ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor industri dan jasa akan mendapatkan porsi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di luar sektor industri (sektor pertanian), karena sektor industri dan jasa mampu memberikan nilai tambah yang tinggi.

Analisis disparitas tanpa sektor industri dan jasa memperlihatkan ketimpangan tidak begitu berat. Tanpa sektor industri menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan dapat mendorong ekonomi pedesaan. Sejak krisis tahun 1998, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Hasil perhitungan pada tahun 2010 menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil pada tahun 2010 sebesar 0,1993. Pengembangan perkebunan cenderung menurunkan angka ketimpangan ekonomi antar daerah kabupaten/kota. Tanpa subsektor perkebunan indeks ketimpangan sebesar 0,4101 pada tahun 2010. Artinya tanpa terlibat ekonomi perkeotaan (industri dan jasa) ketimpangan antar daerah kabupaten/kota semakin kecil.

Dari hasil analisis yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau. Dengan demikian pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Subsektor perkebunan memberikan kontribusi pembangunan di pedesaan, sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penurunan indeks ketimpangan ini lebih banyak disebabkan kegiatan perkebunan menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Kegiatan ini menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; peningkatan



Ekonomi Pembangunan

kesejahteraan masyarakat sekitar; dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

E. Indeks Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk adalah indeks untuk menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan. Semakin tinggi indeks tekanan penduduk memperlihatkan beban lahan terhadap jaminan kehidupan masyarakat semakin tinggi. Apabila tidak dilakukan perubahan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan cara intensifikasi, maka akan terjadi perambahan hutan dan konflik lahan. Ketergantungan penduduk terhadap lahan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi selama satu warsa terakhir ini permintaan lahan terhadap perkebunan sangat tinggi, sehingga terjadi alih fungsi lahan.

Bertambahnya jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan terhadap sumberdaya lahan. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Apabila tidak diikuti dengan pengembangan areal pertanian baru maka rasio populasi penduduk dan areal lahan yang bisa ditanami semakin besar. Artinya, jumlah orang yang harus disokong atau didukung oleh lahan semakin banyak, sehingga intensifikasi menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 9.4. Luas Lahan Menurut Penggunaan Provinsi Riau Periode Tahun 2004-2008

Penggunaan Lahan	2004		2008		+/- (Ha)
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
A Tanaman Pangan					
1 Padi Sawah	123384	1.01	120,849	1.05	-2,535
2 Padi Ladang	27714	0.23	26,947	0.23	-767
3 Jagung	19285	0.16	21,397	0.19	2,112
4 Ubikayu	4445	0.04	4,625	0.04	180
5 Kacang Tanah	3554	0.03	2,412	0.02	-1,142
6 Ubijalar	1269	0.01	1,429	0.01	160
7 Kacang Kedelai	1781	0.01	4,319	0.04	2,538
8 Kacang Hijau	1155	0.01	1,577	0.01	422
Jumlah	182587	1.50	183555	1.60	968
B Perkebunan					
1 Kelapa Sawit	1,340,036	11.01	1,674,845	14.60	334,809
2 Karet	543,783	4.47	528,655	4.61	-15,128
3 Kelapa	550,052	4.52	542,740	4.73	-7,312
4 Kopi	10,894	0.09	7,978	0.07	-2,916
5 Sagu	66,555	0.55	69,917	0.61	3,362
Jumlah	2,511,320	20.64	2,824,135	24.63	312,815
C Kehutanan					
1 Hutan Lindung	397,150	3.26	228,794	2.00	-168,356
2 Hutan Suaka Alam	451,240	3.71	531,853	4.64	80,613
3 Hutan Produksi	3,857,685	31.70	3,421,713	29.84	-435,972
4 Hutan Produksi Konversi (HP)	4,770,085	39.20	4,277,964	37.30	-492,121
Jumlah	9,476,160	77.86	8,460,324	73.77	-1,015,836
Total	12,170,067	100.00	11,468,014	100.00	-702,053

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Lahan yang merupakan faktor produksi utama dalam pertanian ketersediaannya kini semakin terbatas. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk dalam batas-batas geografis tertentu telah menimbulkan tekanan yang berat terhadap sumberdaya lahan yang tersedia. Tanah-tanah subur yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini mulai digarap dan ditanami tanaman untuk memenuhi keperluan hidup. Akibatnya, telah terjadi perubahan penggunaan lahan tidur dan rawa serta hutan negara di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir (2004-2008) seluas 1,015,836 ha (lihat Tabel 9.4).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit menyebabkan perubahan pada tekanan penduduk. Tekanan penduduk adalah indeks yang dimaksudkan untuk menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. Makin besar jumlah penduduk makin besar pula kebutuhan sumberdaya, sehingga tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan adalah ledakan penduduk yang akan berakibat timbulnya permasalahan pemukiman, lapangan kerja, pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan Untuk mengetahui tekanan penduduk di wilayah pembangunan perkebunan kelapa sawit digunakan analisis sebagai berikut (Almasdi Syahza, 2005).

$$TP = Zx \frac{f \cdot P_0(1+r)^t}{L}$$

Keterangan: TP = Indeks tekanan penduduk; Z = luas lahan minimal per petani untuk dapat hidup layak; f = proporsi petani dalam populasi; P₀ = jumlah penduduk pada waktu t=0; r = tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun; t = Rentang waktu dalam tahun; L = total luas wilayah pertanian.

Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sebagai berikut: Jika TP < 1 lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani dan jika TP > 1 tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan

Sebagai catatan, besarnya nilai Z adalah luas lahan yang mampu memberikan hasil yang cukup sebesar 2,75 ha. Setelah tekanan penduduk pada lahan diketahui, maka dapat dipilih kegiatan yang menunjang konservasi tanah.



Dari hasil survei memperlihatkan tekanan penduduk di Daerah Riau cukup tinggi (Tabel 9.5). Pada tahun 2004 tekanan penduduk dengan masuknya subsektor perkebunan masih kecil dari 1 yakni sebesar 0,07. Artinya lahan di daerah Riau masih mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap penduduknya. Berkembangnya subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit, tekanan penduduk terhadap lahan meningkat selama tahun menjadi 0,92. Perhitungan tekanan penduduk tersebut berdasarkan rumus, yaitu: 1) luas lahan untuk hidup layak petani disesuaikan dengan standar pola PIR yang dikeluarkan oleh Departemen Perkebunan, yaitu 2,75 per petani dan untuk tanaman pangan 2,0 ha per petani; 2) lahan yang dapat menjamin hidup layak petani adalah lahan perkebunan dan lahan tanaman pangan beserta palawija.

Analisis tekanan penduduk tanpa subsektor perkebunan sudah melebihi kapasitas kemampuan lahan (>1) yakni sebesar 6,01 pada tahun 2004. Pada tahun 2008 tekanan penduduk selalu mengalami peningkatan yakni sebesar 11,04. Tingginya tekanan penduduk di Daerah Riau memberikan gambaran bahwa lahan pertanian (lahan tanaman pangan) tidak mampu lagi memberikan kehidupan yang layak baik bagi petani maupun sebagai jaminan sumber pangan bagi penduduk secara keseluruhan. Tingginya tekanan penduduk di Daerah Riau dipicu oleh beberapa alasan, antara lain: 1) Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi karena tingginya tingkat migrasi dari daerah lain ke Daerah Riau; 2) permintaan lahan terhadap lahan perkebunan sangat tinggi, karena subsektor perkebunan seperti karet, kelapa sawit sangat memberikan peluang ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 9.5 Perkembangan Tekanan Penduduk di Daerah Riau Tahun 2004-2008

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Petani		Luas lahan Pertanian			Indek T. Penduduk	
		Jiwa	%	Kebun	Pangan	Jumlah	Perkebunan	Perkebunan
2004	4.491.393	549125	12.23	2532092	182857	2714949	0.07	6.01
2005	4.614.930	623403	13.51	2602030	164672	2766702	0.08	7.57
2006	4.764.205	823654	17.29	2701403	167346	2868749	0.14	9.84
2007	5.070.952	931078	18.36	2791153	179282	2970435	0.16	10.39
2008	5.189.152	1013540	19.53	2848060	183555	3031615	0.92	11.04

Catatan: Luas lahan untuk hidup layak (perkebunan 2,75 ha, tanaman pangan 2,0 ha)



Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Daerah Riau (>1), ini berarti lahan pertanian di Riau telah melampaui kemampuannya untuk menjamin kehidupan yang layak bagi keluarga tani atau tekanan penduduk telah melebihi kapasitas lahan. Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan disebabkan karena berkurangnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya disebabkan oleh besarnya lahan perburukkan untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet yang dikelola oleh perusahaan besar swasta.

Indek Daya Dukung Lahan

Guna mengetahui kemampuan lahan dalam menyediakan kehidupan yang layak di Daerah Riau dilakukan dengan analisis daya dukung lahan (DDL). Metode yang digunakan adalah metode survai terpadu. Data yang diperlukan adalah data sosial ekonomi antara lain: jumlah penduduk (jiwa), termasuk tingkat umur, luas lahan garapan, jenis tanaman pangan yang diusahakan, produksi dan produktivitas tanaman, persentase tingkat konsumsi minimum dari semua jenis tanaman pangan yang diusahakan dalam menu makanan penduduk per tahun, serta konsumsi per kapita per hari (kkal).

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan rumus daya dukung lahan murni sebagai berikut (Soemarwoto, 2001):

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n A_{si} \cdot Y_{si}}{\sum_{i=1}^n C_{si}} \times \frac{1}{R}$$

Keterangan: K=daya dukung lahan (orang/ha); ASi=luas lahan yang ditanami dengan jenis tanaman Si (ha); Ysi=produksi bersih tanaman pangan Si (kkal/tahun); Csi=tingkat konsumsi untuk masing- masing jenis tanaman pangan dalam menu penduduk (%kkal/tahun); dan R=kebutuhan kalori rata-rata per orang (kkal/orang/tahun).

Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data luas panen (ha) tanaman-tanaman penghasil

1. Dilarang mengump...
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
https://repository.uiriau.ac.id/



Ekonomi Pembangunan

kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan); 2) Mengumpulkan data-data produksi (ton/ha) tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan); 3) Menghitung produksi bruto/produksi kotor (ton) tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan); 4) Menghitung produksi netto/produksi bersih (kkal/tahun) tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan); 5) Menghitung nilai konversi jumlah kalori i masing-masing tanaman penghasil kalori utama sesuai ketentuan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM); dan 6) Menghitung daya dukung lahan (K) setiap kabupaten.

Perkembangan penduduk yang pesat mengakibatkan tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Seiring dengan itu juga menyebabkan beban lahan untuk mendukung kehidupan juga tinggi. Kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari tidak bisa dilepaskan dengan lahan. Lahan merupakan bagian dari lingkungan sebagai sumberdaya alam yang mempunyai peranan sangat penting untuk berbagai kepentingan bagi manusia. Lahan dimanfaatkan antara lain untuk pemukiman, pertanian, peternakan, pertambangan, jalan dan tempat bangunan fasilitas sosial, ekonomi dan sebagainya.

Pesatnya perkembangan di sektor industri dan pemukiman berdampak pada berkurangnya lahan-lahan yang subur sehingga pembangunan pertanian khususnya pelestarian swasembada pangan menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama terhadap ketersediaan sumberdaya lahan. Tantangan tersebut dapat kita lihat puluhan ribu hektar lahan pertanian yang produktif setiap tahun beralih fungsi menjadi sektor non pertanian. Masalah lahan lebih nyata terlihat di daerah perdesaan karena kurang lebih 80 persen penduduk tinggal di perdesaan, dengan sumber mata pencaharian utama di bidang pertanian. Dengan demikian di perdesaan sangat potensial terjadi konflik sosial atau fisik masalah lahan .

Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan luas lahan garapan cenderung makin kecil, keadaan ini menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan. Kemudian di daerah perladang berpindah kenaikan kepadatan penduduk juga meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan karena naiknya kebutuhan akan pangan akibatnya diperpendeknya masa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

istirahat lahan (Soemarwoto, 2001). Meningkatnya kepadatan penduduk daya dukung lahan pada akhirnya akan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di suatu wilayah tidak mampu lagi mendukung jumlah penduduk di atasnya pada tingkat kesejahteraan tertentu.

Guna mengetahui kemampuan lahan dalam menyediakan kehidupan yang layak di Daerah Riau dilakukan dengan analisis daya dukung lahan (DDL). DDL di Daerah Riau sangat tinggi sekali bila dibandingkan dengan daerah pertanian lainnya (Tabel 9.6).

Tabel 9.6 Produksi tanaman pangan Utama di Riau (kkal/tahun) hasil konversi dan Daya Dukung Lahan (DDL)

Komoditas	2004	2005	2006	2007	2008
Padi-padian	519,538	464,789	535,687	528,714	498,967
Jagung	64,984,383	59,372,277	53,232,117	77,900,210	71,198,225
Ubi-ubian	7,396,944	7,834,944	7,220,576	8,255,424	7,177,360
Kacang-kacangan	25,426,500	31,384,650	33,875,550	28,904,100	29,742,450
Jumlah	98,327,365	99,056,660	94,863,930	115,588,448	108,617,002
Luas Tanam (ha)	182,587	164,672	167,346	179,282	183,555
DDL	129.30	130.26	121.20	147.68	138.77

DDL pada tahun 2004 sebesar 129,3 yang berarti setiap satu hektar lahan tanaman pangan menjamin kehidupan 129,3 orang. Angka DDL selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 DDL sudah mencapai 138,77. Tingginya angka DDL ini disebabkan karena luas lahan pertanian (khususnya tanaman pangan) dibandingkan dengan jumlah penduduk sangat kecil. Sebagian besar lahan pertanian di Daerah Riau diusahakan untuk subsektor perkebunan. Akibat ini Daerah Riau kekurangan sumber pangan. Untuk kebutuhan pangan, maka diekspor dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

G. Indeks Distribusi Pendapatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu proyek pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pengertian pemerataan



Ekonomi Pembangunan

pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan ini umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dilakukan analisis Gini Rasio, dimana Koefisien Gini membandingkan antara persentase pendapatan diantara kelompok-kelompok pendapatan masyarakat yang ada dengan formula sebagai berikut:

$$G_i = 1 - \sum_{i=1}^n (Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan: GR adalah Angka Gini Ratio; f_i adalah proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i ; Y_i adalah proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i .

Pembangunan pedesaan di Daerah Riau melalui pembangunan pertanian, khususnya subsektor perkebunan telah menunjukkan hasil yang lebih baik dari segi pendapatan masyarakat pedesaan di Riau. Pembnguna pertanian melalui subsektor perkebunan baik yang berasal dari penanaman modal perusahaan swasta dan BUMN maupun penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya telah memberikan sumbangan ekonomi pedesaan. Kontribusi masyarakat yang terlibat langsung dengan sektor perkebunan juga telah memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitarnya dengan terbukanya peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya, seperti transportasi, perdagangan, jasa perhotelan dan sebagainya. Dengan demikian daerah di sekitar pengembangan perkebunan telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, tidak saja bagi pengembang subsektor perkebunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

etapi juga sektor ekonomi lainnya seperti industri, industri kecil dan industri

Untuk memperoleh gambaran seberapa besar pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perlu dikaji distribusi pendapatan yang diterima masyarakat pada sektor perkebunan tersebut, terutama petani kelapa sawit. Distribusi pendapatan ini diukur melalui sampel yang diperoleh di lapangan. Untuk itu disusun kelompok masyarakat berdasarkan persentase pendapatannya dalam suatu tabel persentase pendapatan menurut beberapa kategori dari semua sampel. Hasil yang diperoleh kemudian diukur berdasarkan urutan menurut kriteria penilaian sebagai berikut tertantum pada Tabel 9.7.

Tabel 9.7 Kriteria Ratio Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Gini Ratio	Kriteria Penilaian		Tingkat Ketimpangan
	Bank Dunia*		
< 0,30	> 17 %		Rendah
0,30 - 0,40	12 – 17 %		Sedang
> 0,40	< 12 %		Tinggi

*) Untuk 40 persen penduduk berpendapatan terendah
Sumber: Suseno Triyanto W dalam Almasdi Syahza (2004)

Perhitungan distribusi pendapatan petani kelapa sawit di Riau disajikan pada Tabel 9.8. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan di Riau, dimana 20 persen masyarakat berpendapatan terendah tahun 1992 memperoleh 8,89 persen dari total pendapatan atau 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah menikmati pendapatan 20,64 persen. Sementara 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menikmati 43,68 persen dari total pendapatan. Namun pada saat krisis ekonomi tahun 1998 justru masyarakat berpenghasilan terendah menikmati sebesar 15,13 persen dari total pendapatan. Kelompok masyarakat 20 persen tertinggi justru turun menjadi 23,79 persen. Ketimpangan semakin kecil pada tahun 2009, dimana 20% kelompok berpenghasilan terendah menikmati sebesar 11,27% dari total pendapatan. Perbandingan pendapatan antara 40% terendah dengan masyarakat 20% tertinggi sebesar 1,23.



Tabel 9.1 Perkembangan Gini Ratio Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Daerah Riau Periode 1992 –2009

Kelompok Pendapatan	1992 ¹⁾	1995 ¹⁾	1998 ¹⁾	2003 ¹⁾	2006 ¹⁾	2009 ²⁾
20 % terendah	8,89	8,05	15,130	11,69	10.400	11.270
20 % terendah kedua	11,76	12,66	19,460	15,83	15.900	15.474
20 % terendah ketiga	14,94	14,38	21,520	18,31	17.910	18.409
20 % terendah keempat	20,74	19,55	20,100	21,07	22.600	21.967
20 % tertinggi	43,68	45,35	23,790	33,09	33.190	32.880
Gini Ratio	0,3332	0,3327	0,0736	0,2038	0.2091	0.1989
Rasio 20% tertinggi dan 40% terendah	2,12	2,19	0,69	1,20	1.26	1.23

Sumber: 1) Almasdi Syahza (tahun 1993, 1995, 1998, 2004, 2007)
2) Hasil penelitian 2010

Penyebab meningkatnya distribusi pendapatan kelompok miskin ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: *Pertama*, kebutuhan masyarakat miskin pada umumnya dapat disediakan oleh produk lokal. Produk ini pada umumnya berbahan baku lokal sehingga tidak berpengaruh langsung oleh penurunan nilai tukar rupiah. Sementara kelompok kaya sangat tergantung kepada barang yang diproduksi secara modern; *Kedua*, pada masa krisis umumnya masyarakat miskin sangat tergantung kepada hasil pertanian. Produk ini dapat mereka peroleh di pedesaan.

Apabila dihubungkan dengan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia maka ketimpangan pendapatan dipedesaan termasuk rendah. Begitu juga dengan kriteria Gini Ratio, dimana distribusi pendapatan masyarakat pedesaan di daerah Riau termasuk rendah. Jika diamati pada awal krisis ekonomi pada tahun 1998 ternyata distribusi pendapatan di pedesaan malah mendekati relatif merata. Ini disebabkan karena pada masa krisis terjadi tingkat kesejahteraan yang tinggi pada petani kelapa sawit. Pada saat itu harga CPO di pasar internasional meningkat tajam, yang pada hakekatnya membawa dampak terhadap pendapatan petani karena harga TBS meningkat. Namun kondisi ini pada tahun berikutnya menurun karena ada kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor CPO.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
https://repository.uiriau.ac.id



Dari Tabel 9.8 dapat dilihat perbandingan antara pendapatan masyarakat tertinggi dengan pendapatan masyarakat terendah sebelum tahun 1998 (saat krisis ekonomi) di atas 2. Artinya pendapatan dari 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tinggi adalah besar dari 2 kali lipat dari pendapatan 20 persen masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Namun setelah krisis ekonomi justru terjadinya penurunan ketimpangan dan perbandingan pendapatan. Relatif rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan disebabkan pengaruh perkembangan kawasan perkebunan, sehingga petani di luar program pola PIR banyak melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. Akibat itu masyarakat sekitar pengembangan perkebunan juga dapat menikmati efek dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hasil pengamatan di lapangan, mereka yang berhasil melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit adalah masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat tempatan masih mengalami kesulitan untuk pengembangan. Akibat itu terjadi ketidak seimbangan pendapatan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat tempatan di sekitar pengembangan perkebunan (lihat Tabel 5.10). Masyarakat tempatan masih terfokus dengan kegiatan tradisional seperti pertanian, nelayan, pencari kayu, sementara masyarakat pendatang telah terlibat dengan kegiatan perkebunan, industri dan jasa yang memberikan balas jasa yang tinggi dibandingkan sektor pertanian tradisional. Dari sisi lain kemungkinan disebabkan beberapa hal antara lain: *Pertama*, mereka yang terlibat dengan kegiatan perkebunan akan memberikan nilai tambah yang tinggi, pendapatan yang diterima juga tinggi. Sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dengan kegiatan perkebunan masih menerima pendapatan yang relatif lebih rendah; *Kedua*, masyarakat yang berada di sekitar pengembangan perkebunan (terutama pusat pertumbuhan) dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha sampingan seperti, warung, berdagang, transportasi, jasa, sehingga kegiatan sampingan ini juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Di lain pihak masyarakat yang jauh dari pusat pertumbuhan kurang merasakan keberadaan perkebunan tersebut sehingga pendapatan mereka relatif rendah; dan *ketiga*, masih adanya budaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Riau <https://ejournal.unra.ac.id/> Hak cipta © 2014 oleh Universitas Riau



Ekonomi Pembangunan

dalam masyarakat tempatan menerima apa adanya, tidak ada inisiatif untuk mengembangkan usaha lain, produktivitas masih rendah, dan masih mengandalkan hasil yang diperoleh dari alam terutama karet. Hal ini mungkin disebabkan berusahatani karet pekerjaannya lebih mudah dan tidak banyak menguras tenaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAB X

KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN

Perkembangan Ekonomi Wilayah

Pesatnya pembangunan subsektor perkebunan di Daerah Riau berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Riau. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Riau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yakni mencapai 8,54%. Pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2006 yakni mencapai 6,44%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2009 disebabkan karena gejala krisis ekonomi global dan harga minyak sawit dunia. Disamping itu juga disebabkan karena permintaan CPO di pasar dunia melemah yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri terutama bagi petani kelapa sawit. Walau Indonesia merasakan dampak gejala ekonomi global, namun pada pertengahan tahun 2009 sampai tahun 2011 harga kelapa sawit memperlihatkan relatif stabil. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Riau selama periode 2005-2009 disajikan pada Tabel 10.1.

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian Riau cukup signifikan, hal tersebut disebabkan karena subsektor perkebunan secara langsung memperbaiki perekonomian masyarakat di pedesaan.

Tabel 10.1 Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan

Sektor	Pertumbuhan (%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pertanian	6,77	5,97	4,84	4,79	3,64
2. Pertambangan	27,24	28,61	24,57	18,13	13,07
3. Industri	9,08	9,11	11,41	8,98	6,22
4. Listrik dan Air	9,20	5,86	5,62	6,86	3,03
5. Bangunan	7,15	8,27	11,65	11,14	8,62
6. Perdagangan	10,15	11,29	8,94	9,72	8,72
7. Angkutan	10,46	9,62	7,28	10,45	8,11
8. Keuangan	18,18	15,67	13,33	13,65	9,99
9. Jasa-jasa	7,92	9,94	9,71	9,25	8,39
10. Riau	8,54	8,66	8,25	8,06	6,44

Sumber: Riau Dalam Angka Tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Menurut Rusli Zainal (2011), kinerja ekonomi Riau menunjukkan performa membaik. Hal ini dibuktikan dengan positifnya sejumlah indikator ekonomi yakni investasi dan berbagai pembangunan berkelanjutan yang juga terus terjadi di Riau. perekonomian Riau memperlihatkan kondisi yang relatif stabil dan kondusif. Secara kumulatif, laju pertumbuhan ekonomi di Riau Non Migas mencapai 4,17 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau dengan Migas mencapai 4,17 persen. Melalui program K2I telah dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini dibuktikan, dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan di Riau menjadi 8,65 persen, yang pada tahun 2009 lalu mencapai 9,84 persen. Program K2I yang menjadi fokus program Pemprov Riau akan terus berlanjut, seiring dengan positifnya kinerja berbagai program Pemprov Riau. Dengan begitu diharapkan pembangunan yang merata dapat tercapai di Riau.

B. Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, dan Kerapatan Tenaga Kerja

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Riau yang membaik diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selama periode tahun 2000-2010 pertumbuhan penduduk Riau tercatat sebesar 3,97%. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini bukan disebabkan karena tingkat kelahiran yang tinggi, namun lebih disebabkan karena tingginya angka migrasi penduduk dari luar Riau. Propinsi Riau saat ini memperlihatkan kondisi ekonomi yang membaik sebagai dampak dari perkembangan ekonomi pedesaan, maka tidak heran lagi Riau merupakan pusat bisnis dan peluang usaha bagi mereka yang dapat menangkap peluang tersebut. Harapan meraih kehidupan yang lebih baik menyebabkan munculnya migrasi ke Daerah Riau. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk Riau per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 10.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 10.2 Perkembangan Penduduk Propinsi Riau Periode 2000-2010

	Kabupaten/Kota	Penduduk Riau		Pertum (%)
		2000	2010	
1	Kuantan Singingi	216.732	291.044	2,99
2	Indragiri Hulu	247.306	362.961	3,91
3	Indragiri Hilir	555.701	662.305	1,77
4	Pelalawan	152.949	303.021	7,08
5	Siak	238.786	377.232	4,68
6	Kampar	447.157	686.030	4,37
7	Rokan Hulu	265.686	475.011	5,98
8	Bengkalis	520.241	674.755	2,63
9	Rokan Hilir	352.299	552.433	4,60
10	Tekanbaru	585.440	903.902	4,44
11	Dumai	173.188	254.337	3,92
	Riau	3.755.485	5.543.031	3,97

Sumber: BPS Propinsi Riau tahun 2010

Apabila diamati penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 10.3. Dari tabel tersebut terlihat perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selama tahun 2009-2010. Perkebunan kelapa sawit merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak, ini disebabkan karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat Riau karena kelapa sawit cukup memberikan andil terhadap pendapatan petani. Penyerapan tenaga kerja ini paling banyak di daerah pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Yang menarik dari sisi penyerapan tenaga kerja adalah terjadinya penurunan tenaga kerja di subsektor yang lain seperti tanaman pangan. Tenaga kerja lebih banyak berpindah ke aktivitas perkebunan kelapa sawit. Ini terlihat dari tingkat pertumbuhan tenaga kerja di kegiatan perkebunan kelapa sawit sebesar 15,05%, sementara di perkebunan yang lain menunjukkan penurunan. Namun secara menyeluruh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih cukup tinggi yaitu mengalami kenaikan sebesar 6,00% selama periode 2009-2010.



Tabel 10.3 Penyerapan Tenaga Kerja Sub Sektor Perkebunan Tahun 2009-2010

NO	Komoditi	Tahun		% Perubahan
		2009	2010	
1	Kelapa Sawit	602.478	693.123	15,05
2	Karet	200.888	196.260	-2,30
3	Kelapa	221.462	211.039	-4,71
4	Aneka Tanaman	121.028	114.163	-5,67
	Jumlah	1.145.856	1.214.585	6,00

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2011

Terkait dengan angkatan kerja yang berkerja di sektor pertanian maupun subsektor perkebunan dapat memberikan kontribusi ekonomi terhadap wilayah, namun dengan tingginya angka tenaga kerja tidak produktif yaitu penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun merupakan beban bagi tenaga kerja produktif. Dari data yang ada beban tenaga kerja terhadap tenaga kerja yang tidak produktif dihitung dengan menggunakan kerapatan tenaga kerja.

Pada Tabel 10.4. disajikan keadaan luas wilayah pertanian dan kerapatan tenaga kerja agraris maupun geografis. Kerapatan tenaga kerja agraris lebih tinggi dibandingkan kerapatan tenaga kerja geografis. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa angka tanggungan tenaga kerja produktif di Riau terhadap tenaga kerja tidak produktif sebesar 0,68 yang berarti setiap hektar lahan pertanian memberikan tanggungan kehidupan terhadap tenaga kerja tidak produktif sebesar 0,68 jiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lahan pertanian secara keseluruhan masih dapat memberikan kehidupan yang layak di Riau. Tentu saja hal tersebut disebabkan karena berkembangnya subsektor perkebunan. Kalau bukan karena subsektor perkebunan tentu saja kerapatan tenaga kerja di Riau akan lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 10.4 Keadaan Luas Wilayah, Tenaga Kerja, Kerapatan Tenaga Kerja dan Kerapatan Penduduk Riau Tahun 2010

Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)		Kerapatan Tenaga Kerja		Kerapatan Penduduk	
		Pertanian	Geografis	Tidak Produktif	Produktif	Geo-grafis	Agraris
1 Kuantan Singingi	291.044	223.013,6	520.216	100.709	190.335	0,19	0,45
2 Indragiri Hulu	362.961	201.112,8	767.627	136.496	226.465	0,18	0,68
3 Indragiri Hilir	662.305	762.891,0	1.379.837	200.103	462.202	0,15	0,26
4 Pelalawan	303.021	267.646,4	1.240.414	116.125	186.896	0,09	0,43
5 Siak	377.232	295.938,8	823.357	168.919	208.313	0,21	0,57
6 Kampar	686.030	589.749,0	1.092.820	294.783	391.247	0,27	0,50
7 Rokan Hulu	475.011	302.055,7	722.978	209.129	265.882	0,29	0,69
8 Bengkalis	674.755	213.465,1	1.204.423	177.056	497.699	0,15	0,83
9 Rokan Hilir	552.433	132.011,5	896.143	196.815	355.618	0,22	1,49
13 Pekanbaru	903.902	5.301,1	63.301	350.263	553.639	5,53	66,07
15 Dumai	254.337	15.365,0	203.900	95.911	158.426	0,47	6,24
Riau	5.543.031	3.008.550	8.915.016	2.046.309	3.496.722	0,23	0,68

Sumber: Data olahan dari BPS Propinsi Riau Tahun 2010



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

C. Perkembangan Harga dan Kesejahteraan Masyarakat

Penerimaan petani kelapa sawit sangat tergantung kepada umur tanaman. Semakin tinggi umur tanaman (umur optimum) menunjukkan kandungan minyak sawit dan inti sawit semakin tinggi, yaitu 21,87 % untuk minyak sawit dan 5,10 % untuk inti sawit. Tingginya kandungan minyak sawit yang dihasilkan oleh petani akan berpengaruh kepada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima oleh petani. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan inti atau oleh pabrik kelapa sawit (PKS) berpedoman kepada harga CPO di pasar internasional. Untuk daerah Riau, penetapan harga TBS berdasarkan kepada: 1) Permentan, No.395/2006, tentang Pedoman Penetapan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun 2) 2. Pergub Riau, No: 22 Tahun 2006, tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani di Prov. Riau. Pada hakekatnya tujuan tum ini dibentuk adalah menjamin perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi petani dan mencegah persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS).

Dari sisi petani kadang kala tidak mengetahui perkembangan harga sehingga petani kelapa sawit khususnya swadaya sering pada posisi yang lemah (dirugikan), karena itu dasar pembentukan tim penentu harga TBS ini adalah; antara lain: 1) kurang transparannya mekanisme penetapan harga TBS-KS produksi petani; 2) ketidaktahuan masyarakat petani plasma terhadap mekanisme penetapan harga TBS-KS produksi petani; 3) rendemen minyak & inti sawit yg digunakan dalam perhitungan harga TBS-KS dinilai kurang sesuai dengan realisasi pabrik/ rendemen faktual; dan 4) belum diterapkannya manajemen pascapanen secara baik oleh pelaku agribisnis kelapa sawit.

Sebenarnya sistem penetapan harga TBS-KS telah dimulai sejak tahun 2001, setelah adanya Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.531/XI/2001, yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Sejak tahun 2006 hingga sekarang penetapan harga TBS dilakukan setiap minggu setiap bulannya yang dihadiri oleh perwakilan petani, perusahaan dan instansi terkait yang masuk dalam Tim Penetapan Harga TBS. Wakil dari pihak pemerintah yaitu Dinas Perkebunan Propinsi Riau. Formula penetapan harga adalah:



$$H_{TBS} = K \{ (H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} \times R_{is}) \}$$

Keterangan:

- H_{TBS} : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %.
- H_{ms} : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- R_{ms} : Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam %
- H_{is} : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- R_{is} : Rendemen inti sawit (PK) dinyatakan dalam %

Sebagai gambaran rata-rata harga TBS per bulan pada tahun 2010 disajikan pada Tabel 10.5. Harga TBS yang disajikan tersebut berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Petani Propinsi Riau per minggu tahun 2010. Dari tabel tersebut memperlihatkan tingkat harga yang diterima oleh petani berdasarkan umur tanaman kelapa sawit. Karena itu penentuan harga yang ditetapkan oleh tim berpengaruh langsung kepada penerimaan petani kelapa sawit khususnya petani peserta plasma.

Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Riau dilakukan oleh kelompok yang dikelola oleh mitra kerja (petani plasma) dan petani swadaya. Dari dua bentuk kegiatan perkebunan tersebut terjadi perbedaan pendapatan. Petani swadaya, harga yang diterima pada tingkat petani jauh lebih rendah dari harga pada petani plasma. Harga yang diterima oleh petani swadaya bukan didasarkan kepada harga oleh tim PPHP-TBS, melainkan harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul (toke). Toke ini merupakan kaki tangan dari PKS di luar empat perusahaan besar. PKS tersebut pada umumnya memiliki sebagian kebun atau tidak memiliki kebun sebagai pendukung bahan baku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 10.5 Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga Cpo, Karnel, Indeks "K" Dan Harga Tbs Tahun 2010

No	Bulan	HARGA CPO	HARGA KARNEL	IN-DEK "K"	INDEKS TBS/UMUR TANAMAN (TAHUN)/RP									
					3	4	5	6	7	8	9	20		
1	Januari	6.530,11	3.100,74	86,32	979,46	1.094,79	1.171,94	1.222,45	1.251,77	1.290,73	1.331,59	1.429,21		
2	Februari	6.626,62	3.251,58	86,10	995,06	1.112,15	1.190,48	1.224,62	1.271,63	1.311,21	1.352,77	1.390,95		
3	Maret	6.882,86	3.619,91	86,64	1.047,43	1.170,52	1.252,89	1.288,98	1.338,40	1.380,07	1.423,91	1.464,02		
4	April	6.693,83	3.711,17	86,26	1.020,42	1.140,18	1.220,36	1.255,64	1.303,75	1.344,35	1.387,13	1.426,14		
5	Mei	6.736,53	3.783,67	86,70	1.101,20	1.154,98	1.236,20	1.271,96	1.320,69	1.361,82	1.405,18	1.467,17		
6	Juni	6.643,82	3.875,28	86,27	1.018,96	1.138,41	1.218,42	1.253,76	1.301,76	1.342,31	1.385,11	1.423,99		
7	Juli	6.515,10	3.896,82	86,32	1.002,93	1.120,43	1.199,15	1.233,99	1.281,21	1.321,13	1.363,30	1.401,52		
8	Agustus	7.243,52	4.194,94	87,64	1.127,64	1.259,86	1.348,41	1.387,50	1.440,63	1.485,50	1.532,85	1.575,89		
9	September	7.270,78	4.405,38	87,57	1.137,27	1.270,47	1.359,71	1.399,26	1.452,80	1.498,06	1.545,89	1.589,22		
10	Oktober	7.499,10	4.948,59	87,72	1.188,16	1.307,02	1.420,10	1.461,68	1.517,53	1.564,82	1.614,95	1.660,08		
11	November	8.201,92	5.457,97	88,69	1.310,95	1.469,16	1.572,19	1.618,25	1.680,08	1.732,44	1.787,95	1.837,90		
12	Desember	8.538,88	5.878,05	88,81	1.377,81	1.538,66	1.646,51	1.694,88	1.759,59	1.814,44	1.872,66	1.924,90		
Rata-Rata/Tahun		7.115,26	4.177,01	87,09	1.108,94	1.231,39	1.319,70	1.359,41	1.409,98	1.453,91	1.500,27	1.549,25		



Harga TBS di tingkat petani swadaya cenderung ditentukan sepihak, hal ini disebabkan antara petani dengan PKS tidak ada keterikatan kontrak. Hal ini sangat berbeda dengan petani plasma, mereka terikat kontrak dengan perusahaan inti. Rendahnya harga TBS yang diterima oleh petani swadaya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, petani swadaya tidak terikat dengan pihak PKS atau perusahaan inti. Hasil panen petani swadaya tidak ada kepastian oleh pembeli TBS pada saat panen tiba. Kondisi ini menyebabkan kadang-kadang TBS sampai berhari-hari di kebun. Untuk menghindari ini petani terpaksa menjualnya berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh toke; *Kedua*, kurangnya pengetahuan petani swadaya terhadap kualitas TBS mereka. Akibat ini pihak toke juga dapat menekan harga dengan menentukan kualitas TBS (penentuan sepihak); *Ketiga*, untuk menghindari resiko (pembusukan buah, pencurian) di tempat penampungan sementara (TPS), maka petani menjual harga TBS pada saat setelah panen; *Keempat*, petani ingin cepat menerima uang hasil kebun mereka. Kalau ditunggu atau ditawarkan kepada beberapa toke hal ini akan memakan waktu, sehingga menimbulkan resiko terhadap kualitas TBS; dan *kelima*, lokasi kebun petani swadaya berpencaran (tidak dalam satu kawasan), kondisi ini juga merupakan alasan bagi toke untuk menekan harga dengan alasan biaya transportasi dan kondisi jalan yang jelek.

Secara keseluruhan pendapatan petani kelapa sawit memperlihatkan jauh lebih tinggi dari pendapatan petani di komoditi perkebunan lainnya. Sebagai bahan perbandingan pada Tabel 10.6 disajikan tingkat pendapatan antara petani kelapa sawit, kelapa dan karet, Pendapatan petani kelapa sawit kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahun, Karena itu animo masyarakat sangat tinggi untuk berusahatani di komoiti kelapa sawit. Jika diamati hasil survei tahun 2010 pendapatan petani kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 6,27% per tahun.

1. Dilarang mengumpukan atau mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 10.6 Tingkat Pendapatan Petani Perkebunan Tahun 2009-2010

NO	Komoditi	2009 (Rp)		2010 (Rp)		% Peningkatan
		Tahun	Bulan	Tahun	Bulan	
1	Kelapa Sawit	37.793.685	3.149.474	39.526.002	3.293.834	4,58
2	Karet	12.797.010	1.066.418	12.802.263	1.066.855	0,04
3	Kelapa	9.502.305	791.859	9.665.058	805.422	1,71

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau tahun 2011

Catatan: Hasil survei pendapatan petani kelapa sawit per bulan pada tahun 2009 sebesar Rp 3.404.123 dan tahun 2010 sebesar Rp 3.617.574 (naik 6,27%)

D. Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit

Luas perkebunan kelapa sawit sampai tahun 2011 telah mencapai 2.056.008 ha, luas tersebut berdasarkan foto udara oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau. Namun pada perhitungan daya dukung wilayah menggunakan data luas lahan tahun 2009. Sampai tahun 2010 produksi tandan buah segar (TBS) dari daerah Riau telah mencapai 5.932.310 ton per bulan atau 71.187.720 ton per tahun dengan produktivitas 3,08 ton per hektar. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 144 buah dengan kapasitas produksi sebesar 6.091 ton per jam (Dinas Perkebunan Riau, 2010).

Luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu bertambah, karena tingginya animo masyarakat terhadap pengusahaan kelapa sawit. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi TBS. Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan TBS semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahannya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Sampai tahun 2010 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 453.733 ha yang tersebar di duabelas daerah kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku PKS. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 9.7.

Dari hasil perhitungan DDW yang disajikan pada Tabel 10.7, diperlihatkan dua model perhitungan, yakni perhitungan dengan hanya memperhatikan tanaman menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

belum menghasilkan. Dari perhitungan pertama diperoleh angka indeks DDW sebesar 4,854. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Setiap satu satuan kemampuan olah PKS didukung oleh bahan baku TBS sebanyak 4,854 satuan. Untuk masa yang akan datang produksi TBS mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka DDW meningkat menjadi 6,359. Perhitungan tersebut diasumsikan jam kerja PKS 200 jam per bulan. Jika diasumsikan jam kerja PKS per bulan 400 jam (16 jam per hari, 25 hari per bulan) maka DDW sebesar 2,427 dan 3180. Angka ini juga membuktikan bahwa bahan baku untuk PKS masih mengalami kelebihan. Untuk lebih jelasnya DDW setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 10.7.

Tabel 10.7 Hasil Perhitungan Daya Dukung Wilayah (DDW) Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Riau Berdasarkan Luas Kebun Tahun 2009

Kabupaten/kota	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas	PKS, Kapasitas		DDW
				Unit	Ton/jam	
1 Kampar	316.282	1.134.925	3,588	34	1.380	4,112
2 Rokan Hulu	379.969	916.074	2,411	22	966	4,742
3 Pelalawan	183.400	639.609	3,488	16	610	5,243
4 Indragiri Hulu	118.538	388.084	3,274	8	285	6,808
5 Kuantan Singingi	122.731	428.147	3,488	10	450	4,757
6 Bengkalis	162.415	435.122	2,679	8	350	6,216
7 Rokan Hilir	206.173	725.917	3,521	21	965	3,761
8 Dumai	31.022	69.814	2,250	1	60	5,818
9 Siak	186.819	546.936	2,928	15	660	4,143
10 Indragiri Hilir	210.529	617.609	2,934	8	385	8,021
11 Pekanbaru	7.464	30.073	4,029	-	-	
Total	1.925.342	5.932.310	3,081	143	6.091	4,854
DDW, jika jam kerja 400 jam/bulan (16 jam/hari), 25 hari/bulan						2,427
DDW termasuk TBM, jika jam kerja 200 jam/bulan						6,359
DDW termasuk TBM, jika jam kerja 400 jam/bulan						3,180



Tingginya angka DDW ini juga memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Dari sisi lain kelebihan bahan baku yang dipasok dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan PKS). Kondisi ini juga menyebabkan harga TBS ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya murni.

Hasil perhitungan berdasarkan data yang ada, maka Daerah Riau masih kekurangan PKS untuk masa datang. Prediksi ini didasarkan karena luas kebun kelapa sawit ada kecenderungan meningkat dan masih luasnya tanaman yang beklum menghasilkan. Untuk itu ke depan pembangunan pabrik pengolah kelapa sawit masih dibutuhkan. Sebagai bahan pertimbangan hasil prediksi PKS untuk masa datang di Riau disajikan pada Tabel 9.8.

Pertambahan PKS untuk wilayah pedesaan diperlukan sebanyak 63 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam (Tabel 10.8). Namun pembangunan perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan penyebaran kebun petani, terutama petani swadaya. Pada aktivitas kelapa sawit jarak panen dengan pengolahan di PKS perlu menjadi perhatian. Untuk menjamin kualitas dan rendemen minyak sawit, maka dalam waktu 8 jam TBS sudah diolah di PKS. Karena itu kondisi jalan dan jarak antara kebun dengan PKS menjadi pertimbangan untuk menjamin kualitas. Kelemahan perkebunan petani swadaya adalah kebun mereka tersebar secara tidak merata, sedangkan petani plasma kebun kelapa sawit berada dalam satu kawasan. Sehingga dalam perencanaan pembangunan PKS sangat mudah menentukan lokasi PKS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 10.8 Prediksi Kebutuhan Pabrik Pengolah Kelapa Sait di Riau

Indikator Perkiraan	Perkiraan
Luas lahan yang ada (ha) tahun 2010	1.925.342
Produksi (ton TBS/bulan) tahun 2010	5.932.310
Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam) tahun 2010	6.111
Kemampuan olah (ton TBS/bulan) tahun 2010	3.666.600
Jumlah PKS yang sudah terpasang (unit)	144
Kelebihan bahan baku (ton TBS/bulan)	2.265.710
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam) dalam unit	63

Catatan: kemampuan olah PKS jam kerja 600 jam/bulan, 25 hari/bulan

Produk minyak kelapa sawit mempunyai sifat keterkaitan industri ke depan maupun ke belakang yang cukup tinggi. Industri hilir minyak kelapa sawit yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah industri minyak goreng, sehingga pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap struktur pasar domestik minyak goreng. Tetapi serangkaian kebijakan pemerintah tersebut masih terlalu memfokuskan pada CPO dan melupakan seperangkat permasalahan pada struktur industri minyak goreng (Bustanul Arifin, 2001).

Prospek pembangunan agroindustri kelapa sawit di daerah Riau sangat cerah. Hal ini juga diungkapkan oleh Wiwik Suhartiningsih (2003), dengan potensi yang ada Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Selama ini Malaysia merupakan eksportir terbesar di dunia yang pangsa pasarnya mencapai 48,26 %. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. *Pertama*, memperluas areal perkebunan; *Kedua*, membangun infrastruktur yang memadai dan harus terkait dengan unit pengolahannya; *Ketiga*, mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini kurang terfokus; *Keempat*, menemukan teknologi baru untuk diversifikasi produk; dan *kelima*, harus ada deregulasi dalam industri kelapa sawit. Selama ini proses perizinan investasi industri kelapa sawit di Indonesia harus melewati 17 lembaga di pusat dan 25 lembaga di daerah. Sementara di Malaysia, investor cuma bertemu dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB XI MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI KARET ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Potensi Pengembangan Karet Alam

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Demikian juga halnya di Provinsi Riau, pengusaha komoditas karet merupakan salah satu mata pencaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan masyarakat.

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: *Pertama*, produktivitas karet yang rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. *Kedua*, harga karet yang relatif rendah dan berfluktuasi. Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa berada pada *bargaining position* yang lemah. *Ketiga*, alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 20,62% pertahun. Perkembangan ini terjadi di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa daerah antara lain



Ekonomi Pembangunan

Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak justru mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di Riau, namun dari sisi produksi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Perkembangan perkebunan karet dan produksi disajikan pada Tabel 11.1.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan tanaman. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan karet pada wilayah bukaan baru atau pengukuhan areal di sekitar perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan inovasi teknologi.

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi buruknya mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung memperberat timbangan bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan



harapan petani memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut mempengaruhi rendahnya mutu bokar yang dihasilkan petani karet.

Rendahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani karet dengan pedagang ikut membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok tani bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 44.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 44.460 KK. Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengump sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau sejawat lainnya;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 11.1. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet Alam di Propinsi Riau

	2005		2013		Pertumbuhan	
	Luas Produksi	Luas Produksi	Luas Produksi	Luas Produksi	Luas Produksi	Produksi
1 Kampar	83.868	39.111	92.537	60.714	1,24	5,65
2 Rokan Hulu	55.798	40.675	56.039	54.394	0,05	3,70
3 Pelalawan	23.048	18.100	25.856	34.137	1,45	8,25
4 Indragiri Hulu	71.989	38.571	58.627	40.468	-2,53	0,60
5 Kuantan Singingi	158.774	137.809	146.474	71.149	-1,00	-7,93
6 Bengkalis	51.304	52.678	35.000	16.934	-4,67	-13,23
7 Rokan Hilir	36.678	11.135	26.390	24.714	-4,03	10,48
8 Dumai	1.463	845	2.355	1.524	6,13	7,65
9 Siak	16.191	9.276	16.129	7.039	-0,05	-3,39
10 Indragiri Hilir	2.752	1.069	5.369	3.552	8,71	16,19
11 Pekanbaru	-	-	2.926	588	0,00	0,00
12 Kepulauan Meranti	-	-	19.110	9.438	0,00	0,00
Rakyat	112.782	349.269	486.812	324.651	20,06	-0,91
PBN	-	24.975	10.901	16.949	0,00	0,00
PBS	-	22.047	7.551	12.657	0,00	0,00
Jumlah	112.782	396.291	505.264	354.257	20,62	-1,39



Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kelembagaan petani karet di pedesaan belum ada satu kelompokpun yang sudah teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan UPPB oleh petani karet memberikan peluang kepada petani karet untuk memasarkan bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri *rubber*) tanpa melalui pedagang pengumpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari harga penjualan karet di atas labuhan ekspor atau *Free on Board* (FOB).

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim dikenal dengan sebutan *tauke*. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan *patronase* (*patron klien*) antara pedagang pengumpul sebagai *patron* dan petani karet sebagai *klien*. Kelembagaan *patronase* tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak punya pilihan lain akibatnya taraf hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin merosot.

Permentan No. 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. Belum berlakunya Permentan tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet. Kenyataan ini membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun pedagang informal belum tertata dengan

1. Dilarang mengump...
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengump...
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.



baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.

Tabel 11.2. Jumlah Industri Crumb Rubber Dirinci Menurut Kapasitas Pabrik Di Riau

No	Nama Pabrik	Kapasitas Produksi (Ton/Th)	Jenis Produk
1.	PT. Andalas Agro Lestari	40,000	SIR 10, SIR 20
2.	PT. P&P Bangkinang (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
3.	PT. P&P Bangkinang (S)	24,000	
4.	PT. Hervenia Kampar Lestari	60,000	SIR 10, SIR 20
5.	PT. Perkebunan Nusantara V	25,000	RSS 1, SIR 3L, SIR 10, SIR 20
6.	PT. Riau Crumb Rubber Factory (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
7.	Riau Crumb Rubber Factory (S)	30,000	
8.	PT. Tirta Sari Surya	45,000	SIR 10, SIR 20
9.	PT. Mardec Nusa Riau	10,000	Stop operasi
	Jumlah	282,000	

Sumber: List of Member Gapkindo, 2013

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi kelapa sawit. Luas lahan 505.264 ha menghasilkan 354.257 ton per tahun dengan jumlah petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik pengolah yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 282.000 to per tahun. Perusahaan yang melakukan pengolahan karet alam dan kapasitas olah disajikan pada Tabel 11.2. Dari tabel tersebut, jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 354.257 ton per tahun, sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 282.000 to per tahun.

Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet terpasang di Daerah Riau merupakan salah satu faktor penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat petani. Pada tingkat petani terjadi kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku industri karet. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 11.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 11.3 Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam di Riau

Indikator	Kuantitas
Luas Areal (ha), tahun 2014	505.264,00
Produksi (ton), tahun 2014	354.256,63
Industri pengolah sudah ada (unit)	14
Kapasitas terpasang (ton/tahun)	282.000
Kemampuan mesin (ton/tahun)	232.000
Kelebihan bahan baku (ton/tahun)	122.256,63
Daya dukung wilayah (DDW)	1,53
Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)	6

Sumber: Almasdi Syahza, 2015

Hasil perhitungan DDW diketahui indeknya 1,53. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat.

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil analisis *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. Pada hal pada tahun 2010 indek *multiplier effect* ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indek *multiplier effect* ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih disebabkan masyarakat pedesaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Ekonomi Pembangunan

mulai bergeser usahataniya kekomoditi lain yakni kelapa sawit. Pada tahun yang indeks *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan kelapa sawit mencapai 3,43 yang berarti setiap investasi Rp1 akan menyebabkan jumlah uang beredar pada periode berikutnya sebesar Rp 3.43. Di daerah pengembangan kelapa sawit petaninya lebih sejahtera karena meningkatnya jumlah uang beredar di pedesaan. Sementara di daerah pengembangan karet jumlah uang beredar relatif sedikit.

Hasil analisis DDW dan potensi pengembangan industri karet alam, maka indeks *multiplier effect* ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan industri karet. Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan daya saing petani karet. Dari sisi lain diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan, bahwa tanaman karet perlu dipertahankan terutama untuk daerah yang kemiringan lahannya di atas 15%. Jika terjadi alih fungsi lahan dari kebun karet ke kelapa sawit terutama di daerah Riau bagian barat (tingkat kemiringan diatas 15%) akan berdampak terhadap bahaya erosi di bagian hulu.

B. Model Pengembangan Kelembagaan Karet Alam Di Pedesaan

Mencermati kondisi perkembangan industri karet alam di Provinsi Riau dari hulu sampai hilir, maka studi ini merekomendasikan untuk melakukan pengembangan kelembagaan ekonomi karet alam untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembentukan perusahaan patungan. Melalui pengembangan perusahaan patungan diyakini dapat meningkatkan kinerja industri karet alam, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani. Pada bagian ini akan dijelaskan *main idea* dari dasar pembentukan perusahaan patungan dan beberapa model pengembangan industri karet alam yang potensial untuk dikembangkan.

1. Dasar Pembentukan Perusahaan Patungan

Terdapat tiga landasan yang mendorong akan dibentuknya perusahaan patungan (*joint venture*) perkebunan karet alam di Provinsi Riau. *Pertama*, mengacu pada visi dan misi Provinsi Riau yang menyiratkan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, yang pada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, dari aspek teknis maupun dari aspek finansial pengelolaan kebun dan PKA alam layak dilakukan di Provinsi Riau. Hal ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Di samping itu, pengelolaan usaha perkebunan dan PKA alam telah dikenal masyarakat Provinsi Riau sebagai usaha yang memiliki nilai ekonomis. *Ketiga*, adanya komitmen Pemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi) Riau untuk menumbuhkembangkan usaha perkebunan karet alam sebagai salah satu komoditas unggulan di Provinsi Riau.

Sebagai salah satu komoditas potensial, karet alam dan produk turunannya diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, sekaligus mampu meningkatkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja. Pengembangan usaha perkebunan karet alam melalui pembentukan perusahaan patungan memberikan dua efek, yaitu *Pertama*, efek langsung (*direct effect*), yaitu perusahaan patungan perkebunan karet alam memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Para petani pemilik lahan misalnya akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dengan berpartisipasi aktif sebagai petani plasma dan atau pemilik saham pada perusahaan patungan. Pemerintah Provinsi Riau dan perusahaan-perusahaan yang turut serta sebagai investor/kreditur akan memperoleh dividen dari perusahaan patungan yang didirikan. Manfaat langsung lainnya yang sangat penting adalah perusahaan patungan akan membutuhkan banyak tenaga kerja, yang berarti mampu mengurangi angka pengangguran.

Kedua, efek tidak langsung (*indirect effect*), yaitu perusahaan patungan perkebunan karet alam memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan patungan. Beroperasinya perusahaan patungan akan memberikan efek keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Berbagai usaha penyediaan sarana dan prasarana perkebunan karet alam akan berkembang, seperti usaha penyediaan bahan serta alat dan mesin pertanian. Begitu juga usaha-usaha yang berada di sektor hilir akan berkembang seperti jasa transportasi darat dan laut bagi pemasaran produk-produk karet alam yang dihasilkan oleh perusahaan patungan. Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan di



Provinsi Riau akan didirikan perusahaan yang menghasilkan produk hilir karet alam. Efek tidak langsung yang juga sangat berarti dari beroperasinya perusahaan patungan perkebunan karet alam tersebut adalah akan menumbuhkembangkan usaha-usaha sektor informal seperti bengkel mesin, warung-warung, ojek dan usaha-usaha informal lainnya. Dengan kata lain, dengan beroperasinya perusahaan patungan perkebunan karet alam akan memberikan *multiplier effects* (efek pengganda) yang besar bagi perekonomian Provinsi Riau khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Untuk mencapai hasil yang optimal, pembentukan usaha perusahaan patungan perkebunan karet alam yang profesional perlu dirancang dengan baik dan tepat. Keterlibatan berbagai pihak dalam perusahaan patungan perkebunan karet alam di Provinsi Riau berkaitan dengan peranan, hak dan kewajibannya perlu diatur dengan seksama. Oleh karena itu perlu dibangun suatu model perusahaan patungan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek keadilan dari manfaat yang diperoleh berbagi pihak yang terlibat langsung dalam perusahaan tersebut, namun manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Alternatif Model Perusahaan Patungan

Seperti kelembagaan perkebunan pada umumnya, model pembentukan perusahaan patungan dikembangkan dan diberdayakan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Model perusahaan patungan yang akan dibentuk tersebut diupayakan untuk tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan yang mandiri dan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang terlibat. Pada akhirnya, perusahaan patungan tersebut dapat bersaing, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pada dasarnya model-model pengembangan usaha perkebunan sangat beragam dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Berdasarkan pelaku-pelaku utama yang terlibat dalam pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya di Provinsi Riau, yakni petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada kajian ini diusulkan tiga alternatif model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*). Ketiga model tersebut dijelaskan di bawah ini.

Model Perusahaan Patungan I

Model Perusahaan Patungan I merupakan pengembangan dan difikasi dari restrukturisasi usaha pembentukan perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan fasilitas pengolahan pabrik karet alam (PKA). Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri atas petani plasma dan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) (Gambar 11.1). Dengan kerjasama melalui perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA secara terpadu diharapkan dapat terjalin koordinasi dalam pengelolaan kebun yang sinergis sehingga menghasilkan kuantitas, kontinuitas, dan kualitas karet alam sesuai yang diharapkan. Disamping itu, pasokan bahan olahan karet (boka) bagi PKA dari aspek kuantitas dan kualitasnya juga dapat terjaga dengan baik.

Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) dengan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata, yakni membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal.

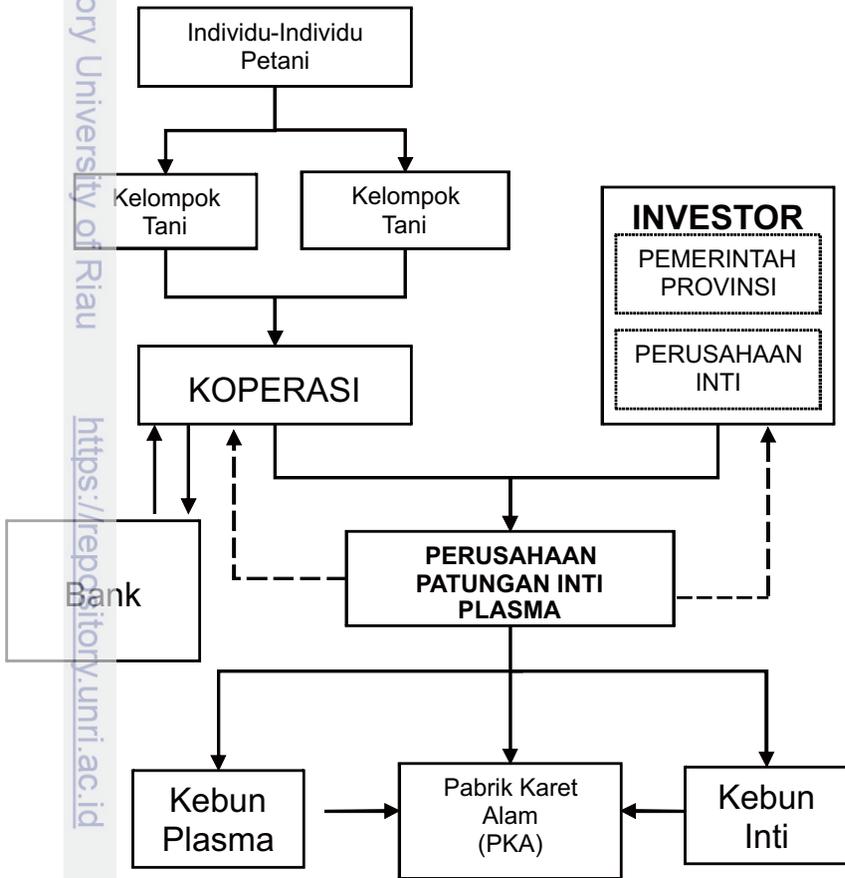
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
https://appsos.uin-riau.ac.id
© Hak cipta milik Universitas Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 11.1 Model Perusahaan Patungan I Kebun Karet Alam dan Produk Turunannya di Provinsi Riau

Pada Model Perusahaan Patungan I tersebut, petani-petani plasma membentuk sejumlah kelompok tani produktif, dan selanjutnya membentuk koperasi. Selanjutnya, koperasi bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti), membentuk perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA. Selain investor Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, kepemilikan saham perusahaan patungan juga dimiliki oleh koperasi, yang dalam hal ini mawadahi para petani. Pemilikan saham oleh koperasi dapat dilakukan dengan pembelian saham. Pembelian saham oleh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

koperasi dapat dilakukan dengan cara meminjam modal dari perbankan atau hasil dari penilaian asset kebun plasma. Secara tidak langsung, dengan masuknya koperasi sebagai pemegang saham tersebut memungkinkan masuknya perwakilan petani dalam susunan keanggotaan manajemen perusahaan patungan.

Perusahaan patungan dalam model di atas bergerak di bidang pengelolaan kebun karet, baik kebun plasma maupun kebun inti, dan pengelolaan PKA. Meskipun demikian, pengelolaan kebun secara teknis masih dilakukan oleh plasma maupun inti, yakni pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh para petani, sedangkan pengelolaan kebun inti dilakukan oleh perusahaan inti. Hal ini menegaskan bahwa para petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Baik kebun inti maupun kebun plasma harus menjual karet alam yang mereka hasilkan ke PKA perusahaan patungan.

Selain akan memperoleh penghasilan dari penjualan karet alam ke perusahaan patungan melalui koperasi, para petani plasma juga memperoleh penghasilan dari deviden atas keuntungan perusahaan patungan berdasarkan besarnya nilai saham yang mereka miliki. Apabila asumsi pembelian saham oleh koperasi dilakukan dengan peminjaman modal dari kredit perbankan, maka para petani plasma akan mengembalikan kredit tersebut melalui koperasi.

Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Model Perusahaan Patungan I

Dalam pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya oleh perusahaan patungan, terdapat keterkaitan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan. Selain itu, pengembangan perkebunan karet alam dengan model perusahaan patungan juga memerlukan koordinasi yang baik diantara lembaga yang terkait. Dalam operasionalnya, pelaksanaan kegiatan Model Perusahaan Patungan I, baik penyelenggaraan kebun karet alam maupun pengelolaan PKA, dilakukan secara terpadu di bawah manajemen perusahaan patungan. Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada Model Perusahaan Patungan I dijelaskan di bawah ini.



Petani Plasma/Kelompok Tani

Para petani plasma diharuskan menjadi anggota kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini:

- Menggunakan lahan yang mereka miliki sesuai dengan tujuan penggunaan lahan yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan.
- Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola pengairan di dalam lahan).
- Menjual seluruh hasil panennya ke perusahaan patungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.
- Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh perbankan melalui koperasi.

Koperasi

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti, Pemerintah Provinsi, investor lainnya dan perbankan). Petani-petani plasma yang bergabung dalam kelompok tani dapat membentuk kelembagaan koperasi tersebut guna meningkatkan posisi tawar petani, sehingga pada setiap kegiatan proses produksi sampai dengan pengolahan dan pemasaran dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Selain mewakili para petani plasma dalam berinteraksi dengan pihak investor, dalam pembentukan dan keanggotaan manajemen perusahaan patungan, koperasi juga berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan. Berkaitan dengan kepentingan para petani tugas dan kewajiban koperasi dijelaskan di bawah ini.

- Bersama-sama dengan investor melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
- Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis.
- Mengkoordinasikan hubungan kerjasama antara petani plasma, kelompok tani dan perusahaan patungan.
- Menyalurkan dan mengelola kredit dan input pada para petani plasma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kesepakatan tentang kualitas produk dan rendemen.

Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyenggarakan pemotongan cicilan kredit petani plasma, dan menyampaikan pendapatan hasil bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi

Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk menambah modal koperasi

Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma.

Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya melaksanakan penyelesaian sertifikat tanah kepada petani plasma.

Perusahaan Inti

Perusahaan inti termasuk salah satu pihak yang juga sangat menentukan keberhasilan atas pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Adapun kewajiban perusahaan inti dalam Model Perusahaan Patungan I adalah melakukan beberapa hal berikut ini:

- Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan

Pemerintah Provinsi Riau

Peranan Pemerintah Provinsi sangat menentukan keberhasilan atas pembentukan perusahaan patungan. Adapun peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Model Perusahaan Patungan I adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- *Sharing* dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan.
- Menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan.



Perusahaan Patungan

Adapun peran Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan I adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, penanaman hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya.
- Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya dan merealisasikan kredit usaha apabila diperlukan.
- Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu guna menangkul penjualan karet alam di luar perusahaan patungan.
- Mengorganisir dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma dan kebun inti
- Mengawasi produktivitas dan kualitas di kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma.
- Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dan hasil jual karet alam perusahaan inti
- Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melalui koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun plasma dan kebun inti.
- Mengelola keuangan untuk mitra dengan baik dan transparan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Keunggulan Model Perusahaan Patungan I

Usaha perkebunan karet alam merupakan salah satu jenis usaha yang membutuhkan modal yang cukup besar. Disamping itu, usaha tersebut juga memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi. Dengan adanya model kerjasama perusahaan patungan, resiko kegagalan usaha dapat ditanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repositori Universitas Riau
http://ojs.uiriau.ac.id
Hak cipta milik Universitas Riau



bersama (*risk sharing*). Selain memerlukan kondisi prasyarat tertentu (*pre-requisite*), Model Perusahaan Patungan I memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan Model Perusahaan Patungan I, adalah pengelolaan kebun dan fasilitas pengolahan PKA terlihat seperti dalam Gambar 6.1, yaitu (1) adanya koordinasi yang terpadu dalam pengelolaan kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma, dan (2) adanya kepemilikan saham melalui koperasi, sehingga petani plasma dapat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup baik dalam perusahaan patungan tersebut.

Model Perusahaan Patungan II

Model Perusahaan Patungan II merupakan pengembangan dan modifikasi dari restrukturisasi usaha pembentukan perusahaan patungan dalam pengelolaan fasilitas pengolahan PKA. Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri atas petani plasma, Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti (Gambar 11.2). Dengan kerjasama membentuk perusahaan patungan dalam pembangunan dan pengelolaan PKA diharapkan dapat terjamin pemasaran karet alam dari kebun inti dan kebun plasma.

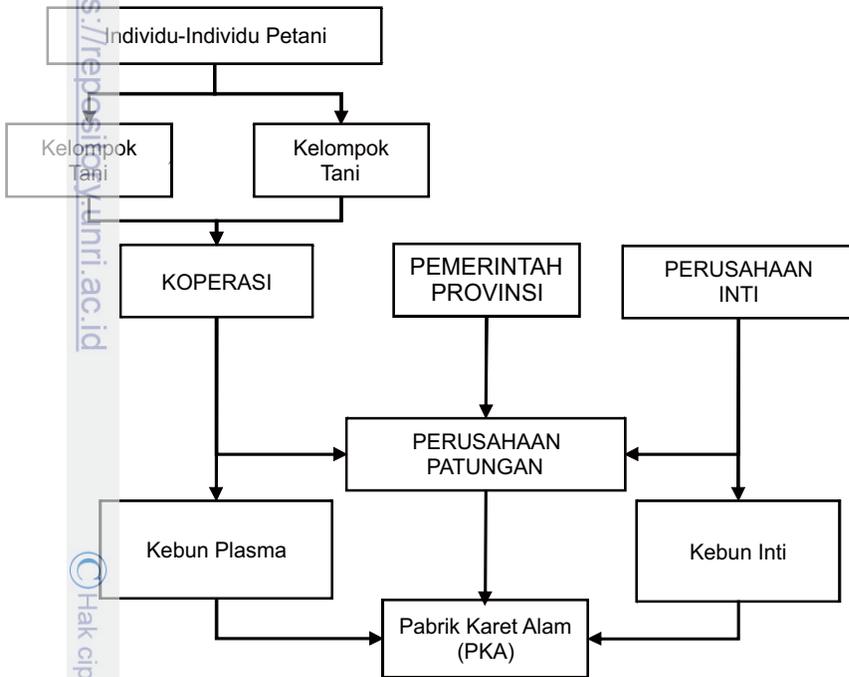
Pada Model Perusahaan Patungan II tersebut, petani-petani plasma membentuk sejumlah kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, koperasi membentuk perusahaan patungan dalam pengelolaan PKA. Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi, perusahaan inti dan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata dengan membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal. Pada mulanya, modal awal 100 persen berasal dari Pemerintah Provinsi dan Perusahaan Inti, yang kemudian sebagian modal tersebut (besarnya persentase sesuai kesepakatan) dijual/diisi/diganti oleh petani. Modal petani dibayar dengan mencicil, dan dipotong dari sebagian hasil penjualan produksinya. Secara tidak langsung, dengan masuknya koperasi sebagai pemegang saham tersebut memungkinkan masuknya perwakilan petani dalam susunan keanggotaan manajemen perusahaan patungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
4. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sejak dari awal, petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan patungan dalam model tersebut hanya bergerak di bidang pengelolaan PKA. Dalam arti, baik petani plasma maupun perusahaan inti, mengelola kebunnya dengan produktif dan efisien. Selanjutnya, baik kebun inti maupun kebun plasma, harus menjual karet alam masing-masing ke PKA perusahaan patungan. Selain akan memperoleh penghasilan hasil penjualan karet alam ke perusahaan patungan melalui koperasi, para petani plasma juga memperoleh penghasilan dari deviden hasil keuntungan perusahaan patungan. Sebagian hasil penjualan dan penghasilan dari deviden dapat digunakan petani plasma untuk membayar modal ke perusahaan patungan.



Gambar 11.2 Model Perusahaan Patungan II Kebun Karet Alam dan Produk Turunannya di Provinsi Riau



Peran dan Tanggung Jawab Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perusahaan Patungan Model II

Keterkaitan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan sangat menentukan keberhasilan pada pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya. Dalam perasionalannya, pelaksanaan kegiatan *on-farm* pada Model Perusahaan Patungan II dilakukan masing-masing oleh petani plasma (kebun plasma) dan perusahaan inti (kebun inti). Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada Model Perusahaan Patungan II dijelaskan di bawah ini.

Petani/Kelompok tani

Peranan petani plasma sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun plasma, petani plasma harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menjadi kelompok tani dan koperasi. Untuk kelancaran kegiatan, para petani diharapkan dapat tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini.

- Mengelola usaha kebun plasma sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan..
- Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola pengairan di kebun plasma).
- Menjual seluruh hasil produksi karet alam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.
- Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh perusahaan patungan/perbankan.

Koperasi

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

harus memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan patungan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan inti adalah:

- Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik.
- Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan.

Perusahaan Patungan

Peranan Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan II adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, pemanenan hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya.
- Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya dan merealisasikan kredit usaha apabila diperlukan
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma.
- Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dan hasil jual karet alam perusahaan inti
- Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melalui koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun plasma dan kebun inti.
- Mengelola keuangan untuk mitra secara transparan dan mudah dimengerti, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.



Pemerintah Provinsi Riau

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Model Perusahaan Patungan II adalah sebagai berikut:

- *Sharing* dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan.
- Menyertakan modal ke perusahaan patungan

Keunggulan Model Perusahaan Patungan II

Keunggulan Model Perusahaan Patungan II, dimana perusahaan patungan hanya bergerak dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA) seperti terlihat pada Gambar 6.2, diantaranya: (1) manajemen perusahaan patungan lebih sederhana karena hanya fokus pada pengelolaan PKA, (2) petani plasma dan perusahaan inti lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan kebunnya, (3) kepemilikan lahan pabrik oleh petani dapat menghindari petani menjual produksinya ke pihak lain dan petani memperoleh *dividen* dari sahamnya.

c. Model Perusahaan Patungan III

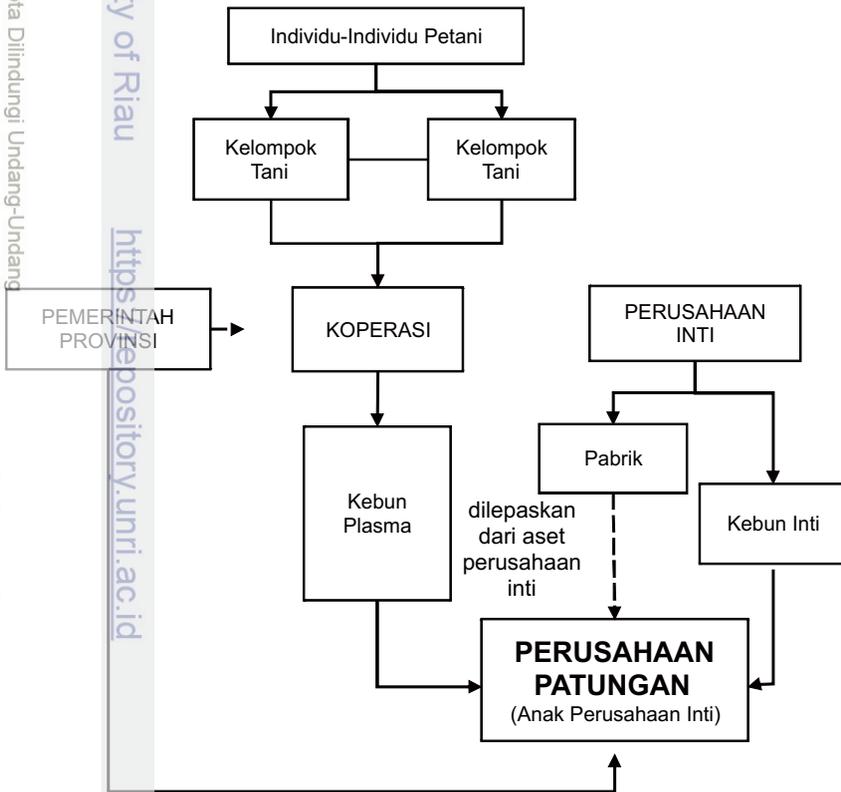
Model Perusahaan Patungan III merupakan pengembangan dan modifikasi dari usaha perkebunan dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Secara tidak langsung, model tersebut merupakan usaha patungan antara petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA). Model di atas bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada petani plasma/koperasi dan Pemerintah Provinsi untuk memiliki saham PKA yang telah dimiliki oleh perusahaan inti (Gambar 11.3).

Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara perusahaan inti, Pemerintah Provinsi dengan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata dengan membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal. Pada tahap awal, perusahaan inti melepaskan pabrik sebagai asset perusahaan inti dan dijadikan sebagai modal/saham bersama pendirian perusahaan patungan yang bergerak dalam pengolahan karet alam. Dalam hal ini perusahaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

patungan berperan sebagai anak perusahaan inti. Selanjutnya, sebagian modal/saham perusahaan patungan tersebut di jual kepada Pemerintah Provinsi dan petani plasma/koperasi (persentase pembagian saham didasarkan atas kesepakatan bersama).



Gambar 10.3 Model Perusahaan Patungan III Kebun Karet alam dan Produk Turunannya di Provinsi Riau

Pembelian saham oleh petani dilakukan dengan cara mencicil dan dipotong dari sebagian hasil penjualan produksi kebun plasma. Dilain pihak, selain menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan kredit kepada petani plasma/koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan kebun plasmanya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pada Model Perusahaan Patungan III, petani-petani plasma membentuk kelompok-kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Para petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Petani plasma menjual produk hasil kebun plasma ke perusahaan patungan tersebut. Sebagian dari hasil penjualan produksinya dipotong untuk mencicil pembelian saham dan pengembalian kredit dari Pemerintah Provinsi. Petani juga akan menerima tambahan penghasilan berupa deviden atau pembagian sebagian dari hasil keuntungan/laba perusahaan patungan.

Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Perusahaan Patungan Model III

Dalam kerjasama perusahaan patungan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat sangat menentukan keberhasilan dalam pembentukan perusahaan patungan tersebut. Peran dan tanggung jawab tersebut harus jelas diantara masing-masing pihak. Seperti halnya dalam Model Perusahaan Patungan II, pelaksanaan kegiatan *on-farm* pada Model Perusahaan Patungan III juga dilakukan masing-masing oleh petani plasma (kebun plasma) dan perusahaan inti (kebun inti). Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada Model Perusahaan Patungan III adalah sebagai berikut.

Petani/Kelompok tani

Peranan petani plasma sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun plasma, petani plasma harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menjadi kelompok tani dan koperasi. Untuk kelancaran kegiatan, para petani diharapkan dapat bergabung dalam kelompok-kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini.

- Mengelola usaha kebun plasma sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola pengairan di kebun plasma).

Menjual seluruh hasil produksi karet alam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.

Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh perusahaan patungan/perbankan.

Koperasi

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi). Koperasi juga berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan dalam aspek yang menyangkut kepentingan para petani dengan tugas dan kaitannya dengan kebun plasma, yaitu:

Bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.

Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas sumberdaya petani plasma.

Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis.

Mengatur hubungan kerjasama dengan petani plasma, kelompok tani dan perusahaan patungan.

Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma.

Mengumpulkan dan mengangkut hasil kebun para petani plasma dengan cara kerjasama kelompok tani dari kebun plasma sampai ke lokasi PKA perusahaan patungan.

Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kesepakatan tentang kualitas dan rendemen.

Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu guna menangkai penjualan karet alam di luar perusahaan patungan.



Ekonomi Pembangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan pemotongan cicilan kredit petani plasma dan seterusnya serta menyampaikan pendapatan hasil bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi
- Menumpuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk menambah modal koperasi
- Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dengan pihak terkait, dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma dan pihak terkait tersebut.
- Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya dalam menyelesaikan sertifikat tanah kepada petani plasma.

Perusahaan Inti

Selain petani plasma, peranan perusahaan inti juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun inti, perusahaan inti harus memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan patungan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan inti adalah:

- Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan
- Mengkoordinasi perusahaan patungan sebagai bagian dari anak perusahaan.

Perusahaan Patungan

Peranan Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan III adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

pemupukan, pemanenan hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya.

Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik

Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya dan merealisasikan kredit kredit usahatani apabila diperlukan

Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma.

Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dari koeprasi melalui kelompok tani dan hasil jual karet alam perusahaan inti

Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melalui koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun plasma dan kebun inti.

Menelola keuangan untuk mitra secara transparan dan mudah dimengerti, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Riau

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Model Perusahaan Patungan III adalah sebagai berikut.

- Sharing dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan.
- Memberikan bantuan kredit kepada petani plasma/koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan kebun plasmanya
- Menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan.

Keunggulan Model Perusahaan Patungan III

Adapun keunggulan Model Perusahaan Patungan III dimana perusahaan patungan hanya bergerak dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA) seperti terlihat pada Gambar 6.3 dengan perusahaan patungan sebagai anak perusahaan inti yaitu (1) pengelolaan perusahaan patungan dapat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Ekonomi Pembangunan

dilaksanakan lebih baik karena pada dasarnya merupakan lanjutan dari PKA milik perusahaan inti sebelumnya yang dilepaskan sebagai aset perusahaan patungan, (2) memberi kesempatan kepada petani plasma/koperasi dan Pemerintah Provinsi untuk memiliki andil dalam kepemilikan saham PKA.

C. Aspek-Aspek Institusional dalam Pembentukan Perusahaan Patungan

Sama halnya dengan bentuk kontrak atau pembentukan usaha bersama lainnya, pembentukan perusahaan patungan juga perlu memperhatikan dan mencantumkan berbagai hal yang berpengaruh penting terhadap kelancaran mekanisme implementasi pembentukan perusahaan patungan selama proses budidaya di kebun karet alam hingga pengolahan karet alam di PKA. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti dijelaskan di bawah ini.

Kerangka Kerja Legal

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka kerja legal.

- Kontrak harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Di dalam kontrak harus dijelaskan mengenai pola arbitrase yang mungkin terjadi.
- Di dalam kontrak harus diterangkan mengenai aktivitas praktis lokal yang akan dijalankan oleh perusahaan patungan, bekerja sama dengan para petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Formula Kontrak

Dalam melakukan kontrak untuk pembentukan perusahaan patungan, sangat perlu diperhatikan aspek-aspek, antara lain: 1) Di dalam spesifikasi pasar harus dijelaskan mengenai standar kualitas yang diinginkan pengusaha/ industri yang disesuaikan dengan permintaan pasar; 2) Di dalam spesifikasi sumberdaya harus dijelaskan mengenai karakteristik produksi secara lengkap dan spesifik; dan 3) Spesifikasi manajemen dan pendapatan merupakan hal yang harus diperhatikan secara lebih intensif, karena melibatkan penentuan



struktur harga, pembaharuan input produksi, serta dukungan teknis dan pengawasan aspek manajerial.

Didalam persetujuan formal harus diperlihatkan adanya legalitas kontrak antara petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan pemerintah provinsi serta pihak lain yang mungkin akan terlibat secara lengkap dan jelas. Dari sisilain untuk registrasi yang sederhana perlu digunakan untuk memudahkan petani plasma memahami bentuk persetujuan yang dilakukan dengan perusahaan dan Pemerintah Provinsi.

Perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan kontrak. Beberapa spesifikasi kontrak yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan, antara lain: waktu kontrak, standar kualitas produk yang diinginkan perusahaan patungan, kuota produksi petani plasma dan perusahaan inti, praktek kultivasi yang diinginkan oleh perusahaan patungan, pola distribusi karet alam yang dibudidayakan, cara mengkalkulasikan harga jual komoditas, prosedur pembayaran petani plasma dan perusahaan inti dan pembaharuan klaim kredit, dan perencanaan asuransi proses budidaya karet alam di lahan.

Heri Cahyadi, Jilid ke-1, Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
https://ojs.umsida.ac.id/index.php/Pharos

BAB XII STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KARET ALAM DI PERDESAAN

Analisis SWOT Kelembagaan Karet Alam

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Analisa SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau rencana proyek. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

Sementara masing-masing faktor dijelaskan sebagai berikut: (1) *Strength*; faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara buyer dengan supplier. (2) *Weakness*; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan citra perusahaan. (3) *Opportunity*; faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan supplier dan buyer. (4) *Threat*; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat,



Ekonomi Pembangunan

meningkatkan bargaining power daripada supplier dan buyer utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru. Bentuk analisis SWOT tersebut disajikan pada Tabel 12.1.

Tabel 12.1. Analisis Matriks SWOT

	INTERNAL	EKSTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
	STRENGTH		<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
	WEAKNESS		<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Keterangan :

- Sel A: *Comparative Advantages*. Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
- Sel B: *Mobilization*. Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumberdaya yang merupakan kekuatan organisasi untuk meminimalkan ancaman dari luar bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
- Sel C: *Divestment/Investment*. Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
- Sel D: *Damage Control*. Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *damage control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository University of Riau
<https://repository.uin-sriharam Pekanbaru.ac.id>
 Hak Cipta Dilindungi Universitas Riau



Strategi Pemberdayaan Petani Karet Alam di Pedesaan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi petani karet alam di pedesaan Provinsi Riau dalam rangka pengembangan komoditi karet alam, antara lain:

- Tersedianya luas lahan, nomor dua setelah luas lahan sawit
- Daya dukung lahan sangat memadai
- Keadaan iklim sesuai untuk karet
- Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten
- Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan
- Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha
- Pemeliharaan kebun karet masih tradisional
- Penyiapan karet masih tradisional
- Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua
- Masih banyak petani karet berstatus penyadap bukan sebagai pemilik
- Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas
- Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP
- Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih
- Pengendalian gulma pada kebun karet tidak maksimal
- Pemasaran terbatas
- Kelompok petani karet belum berkembang
- Koperasi petani karet tidak berkelanjutan
- Kuatnya ketergantungan petani dengan tauke (pedagang) karet
- Petani karet tidak memiliki akses kepada industri pengolahan karet.
- Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008
- Terdapatnya industri karet di Propinsi Riau
- Permintaan getah karet dunia semakin meningkat
- Bibit karet klon unggul makin tinggi produksinya
- Peningkatan penampung hasil produksi karet
- Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim
- Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet
- Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit)
- Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas.
- Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis.
- Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Berdasarkan internal dan eksternal, dapat disusun matrik internal-eksternal petani karet di pedesaan yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 12.2 Matriks Internal–Eksternal Petani Karet Alam di Pedesaan

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya luas lahan, No. 2 setelah sawit • Daya dukung lahan • Keadaan iklim sesuai untuk karet • Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten • Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan • Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha • Pemeliharaan kebun karet masih tradisional • Penyadapan karet masih tradisional • Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua • Produksi karet belum maksimal dan rendah kualitas • Pemasaran terbatas • Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas • Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP • Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih • Kelompok petani karet belum berkembang • Koperasi petani karet tidak berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008 • Terdapatnya industri karet di Propinsi Riau • Permintaan getah karet dunia semakin meningkat • Bibit karet klon unggul makin tinggi produksinya • Peningkatan penampung hasil produksi karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim • Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi • Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas • Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit) • Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun



Informasi yang disajikan pada Tabel 12.2, selanjutnya dianalisis berdasarkan kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 12.3. Dari Tabel tersebut dapat ditentukan beberapa alternatif strategi pemberdayaan petani karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di pedesaan Provinsi Riau, yaitu:

Strategi S-O

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberdayaan petani karet di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan petani karet alam tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Membangun kemitraan dalam pengelolaan karet, maknanya petani karet akan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan apabila dapat membangun kemitraan dengan cara mengintensifkan peran dan fungsi kelembagaan sesama petani karet baik dalam bentuk kelompok petani karet maupun melalui koperasi karet, kemudian dari kelembagaan yang ada tersebut dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait langsung (*stake holders*) baik dengan lembaga pedagang pengumpul, industri karet, perbankan maupun instansi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan karena petani memiliki lahan yang memadai dan sudah sangat berpengalaman dalam bertani karet, disisi lain permintaan karet dunia semakin meningkat dan juga tersedianya industri karet di Provinsi Riau.
- b. Pendampingan SDM Petani karet, untuk dapat memanfaatkan peluang permintaan karet yang cenderung meningkat dan juga agar hasil karet alam yang dihasilkan oleh petani karet dapat diterima dengan harga yang layak atau harga pasar, diperlukan persyaratan terutama kualitas dan kesinambungan hasil. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh petani apabila dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti dari Dinas Perkebunan atau melalui program CSR Industri karet, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk *technical assistency* atau dalam bentuk kegiatan lain yang lebih bersifat membantu petani tapi bukan dalam bentuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
https://ojs.uin-suka.ac.id/



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

penyuluhan, mulai dari proses pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai kepada sistem penyadapan dan pasca penyadapan.

2) Strategi W-O

Selini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Melaksanakan pendidikan dan latihan SDM Petani, serta pembinaan kepada kelompok tani, seperti halnya pada strategi S – O point b yaitu diharapkan kepada Dinas Perkebunan atau melalui program CSR Industri karet, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk **technical assistency** atau dalam bentuk kegiatan lain yang lebih bersifat membantu petani tapi bukan dalam bentuk penyuluhan, mulai dari proses pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai kepada sistem penyadapan dan pasca penyadapan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena sebahagian besar petani karet dalam melakukan pemeliharaan dan penyadapan kebun karet masih bersifat tradisional, banyaknya umur pohon karet yang sudah tua, produksi karet belum maksimal dan rendah kualitas, pemasaran terbatas, jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas, pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama **JAP**, perilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih, ditambah lagi dengan tantangan yang dihadapi cukup berat yaitu sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, tingginya persaingan produksi karet dan kualitas, kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet dan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit).
- b. Pemberian bantuan bibit karet unggul dan permodalan bagi petani, strategi berikutnya adalah adanya upaya terutama dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemberian bantuan bibit karet unggul kepada petani dikarenakan saat ini banyaknya umur pohon karet



petani yang sudah tua, diamping itu diharapkan juga bantuan permodalan untuk melaksanakan kegiatan peremajaan tanaman karet dengan klon unggul oleh petani termasuk pemeliharannya dalam bentuk bantuan kredit lunak dari perbankan. Selain itu diperlukan adanya penyediaan dan pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana pertanian yang memadai.

Strategi S –T

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian untuk mengubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet baik dalam bentuk kelompok tani maupun juga dalam bentuk Koperasi petani karet. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka memperkuat *bargaining position* petani karet itu sendiri baik yang berkaitan dengan posisi tawar harga jual hasil petani, maupun juga dalam memperluas akses pasar sehingga pada akhirnya akan memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitasnya serta menjaga kualitas produknya. Strategi lain yang bisa dilakukan adalah melaksanakan intensifikasi tanaman karet pada lahan yang dimiliki petani karet alam tersebut.

4) Strategi W -T

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah memberdayakan kelompok tani untuk memantau perkembangan produk, harga dan tingkat persaingan, membentuk kembali Koperasi Petani Karet yang dikelola secara profesional, dan pemerintah diharapkan membuat regulasi dalam rangka cegah alih fungsi lahan dari lahan karet menjadi lahan sawit.



Tabel 12.3. Analisis SWOT Pemberdayaan Petani Karet Alam Propinsi Riau

INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya luas lahan, No. 2 setelah sawit • Daya dukung lahan • Keadaan iklim sesuai untuk karet • Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten • Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan • Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha • Pemeliharaan kebun karet masih tradisional • Penyesuaian karet masih tradisional • Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua • Produksi karet belum maksimal dan rendah kualitas • Pemasaran terbatas • Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas • Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP • Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih • Kelompok petani karet belum berkembang • Koperasi petani karet tidak berkelanjutan
EKSTERNAL	PELUANG (O)	STRATEGI S - O
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dalam pengelolaan karet • Pendampingan SDM Petani karet 	STRATEGI W - O
	STRATEGI S - T	STRATEGI W - T
TANTANGAN (T)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet • Pengembangan akses pemasaran • Intensifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan kelompok tani untuk memantau perkembangan produk, harga dan tingkat persaingan • Membentuk kembali Koperasi Petani Karet yang dikelola secara Profesional • Regulasi cegah alih fungsi lahan • Peremajaan dengan klon unggul
<ul style="list-style-type: none"> • Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim • Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi • Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas • Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit) • Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun 		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan petani karet alam dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 1) Pendampingan petani karet dalam bentuk *technical assistency* oleh Pemerintah atau Industri melalui program **CSR**, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM petani dalam hal pemeliharaan, sistem penyadapan, pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet perilaku petani karet mendorong menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih; 2) Pemberian bantuan bibit karet unggul dan bantuan modalan bagi petani; 3) Bantuan peremajaan kebun karet dengan bibit unggul serta subsidi biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (BM); 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet yaitu kelompok petani karet dan Koperasi Petani Karet; 5) Regulasi dalam rangka cegah alih fungsi lahan dari lahan karet menjadi lahan sawit oleh Pemerintah; 6) Bantuan sertifikasi lahan perkebunan petani agar petani memiliki akses ke lembaga keuangan; 7) Membangun kelembagaan petani karet di Riau (Apkarindo) yang berfungsi menyalurkan aspirasi petani karet ke pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dan pusat.

2. Strategi Pemberdayaan Pedagang Karet Alam di Pedesaan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pedagang karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet di pedesaan, antara lain:

- Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai
- Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank)
- Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet
- Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase
- Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet
- Pedagang karet cenderung membeli bokar basah dan bokar kotor
- Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah
- Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga tinggi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian bokar petani
- Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet
- Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang
- Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet
- Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet
- Regulasi Pedagang karet Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* Yang diperdagangkan
- Permintaan getah karet dunia semakin meningkat
- Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai
- Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang.
- Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Berdasarkan faktor-faktor strategi Strategi Pemberdayaan Pedagang Karet Alam di Pedesaan dapat disusun matrik internal–eksternal pedagang karet di pedesaan Provinsi Riau seperti pada Tabel 12.4.



Tabel 12.4 Matriks Internal – Eksternal Pedagang Karet Alam di Pedesaan

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai • Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank) • Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet • Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase • Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet • Pedagang karet cenderung membeli bokar basah dan bokar kotor • Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah • Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga tinggi • Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian bokar petani • Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang • Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet • Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Pedagang karet Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor <i>Standard Indonesian Rubber</i> Yang Diperdagangkan • Permintaan getah karet dunia semakin meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Data yang disajikan pada Tabel 12.4 selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Dari hasil analisis selanjutnya ditabulasi kedalam tabel SWOT yang disajikan pada Tabel 12.5. Analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi pemberdayaan pedagang karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di pedesaan Provinsi Riau, antara lain:

1) Strategi S–O

Sebenarnya ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberdayaan pedagang karet di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan pedagang karet alam tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan harmonisasi dengan industri karet dalam menjamin pasokan produk yang berkualitas demi keberlangsungan proses produksi pada industri karet. Keberlangsungan usaha pedagang karet juga sangat tergantung kepada industri karet, artinya karet yang dibeli oleh pedagang kepada petani akan di jual kepada industri karet, industri karet akan membeli dari pada pedagang apabila karet yang dijualnya tersebut memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh insutri, dan industri akan merasa lebih nyaman apabila pedagang juga dapat menjamin keberlangsungan pasokan karet dari pedagang sebagai in put dalam proses produksi industri karet secara terus menerus. Oleh karena itu diperlukan adanya kemitraan dengan industri karet dengan prinsip saling menguntungkan, sehingga bagi pedagang karet produk yang dibeli dari petani mempunyai pasar yang jelas untuk dijualnya berdasarkan harga pasar. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila pedagang karet sebagai salah satu institusi kelembagaan karet dapat memelihara hubungan yang harmonis dengan industri karet.
- b. Meningkatkan kemitraan dengan petani karet dengan prinsip saling menguntungkan, selain memelihara hubungan yang harmonis dengan industri karet, pedagang karet juga meningkatkan kemitraan dengan petani karet agar pasokan dari petani tetap terjamin. Hanya saja kesan



selama ini bahwa petani karet tidak mempunyai posisi tawar dalam hal penentuan harga jual dan terkesan selalu pihak yang dirugikan mesti dihilangkan, mestinya pedagang karet mempunyai prinsip bila kita ingin sukses sukseskan dulu orang lain (petani karet) apalagi dalam sistem pasar terbuka, semua orang bisa melakukan transaksi dengan siapa saja. Petani karet tidak akan selamanya dia bisa menerima keterbatasannya dan apabila petani menyadari dan berusaha untuk bangkit dengan memperkuat kelompok petani karet serta membentuk koperasi karet dengan menggunakan manajemen yang profesional maka tidak tertutup kemungkinan pedagang karet akan kehilangan pasar.

Meningkatkan SDM Petani agar hasil getah karet memenuhi standar kualitas, adanya kecenderungan perilaku petani karet yang mengabaikan kualitas produksinya serta adanya sebahagian petani karet yang memiliki perilaku cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih, kemudian ditambah lagi produksi karet oleh petani yang juga masih rendah, hal ini tentu saja tidak hanya merugikan petani itu sendiri akan tetapi juga sangat berpengaruh kepada pedagang sewaktu menjual produk tersebut kepada industri. Oleh karena itu pedagang karet juga mesti memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas SDM petani karet melalui usaha bersama yang dilakukan antara pedagang, industri, pemerintah secara bersama-sama mensupport program peningkatan kualitas SDM petani melalui program *technical assistency* atau dalam bentuk program kegiatan lainnya.

2) Strategi W-O

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Menjadikan status pedagang informal menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan data yang ada ternyata masih banyak pedagang karet yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi, hal bermakna bahwa status pedagang karet masih bersifat informal atau belum memiliki legalitas, pada hal dalam regulasi yang ada semua pedagang karet mesti memiliki STR. Apabila strategi ini diabaikan oleh pedagang karet tidak tertutup kemungkinan pada suatu waktu pedagang tersebut tidak dibolehkan lagi melakukan transaksi jual beli karet.
- b. Membentuk Asosiasi Pedagang Karet, strategi lain adalah memperkuat posisinya agar juga mempunyai posisi tawar yang lebih kuat terutama terhadap industri karet, maka perlu dibentuk asosiasi yang dikenal dengan Asosiasi Pedagang karet.

3) Strategi S-T

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan maka strategi yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan dengan petani dan industri karet.

4) Strategi W-T

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan adalah melakukan strategi mendorong pemerintah untuk membuat regulasi cegah alih fungsi lahan, strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi yang dilakukan oleh petani karet dan industri karet. Hal ini dilakukan salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan



karet makin berkurang, di satu sisi lahan karet yang ada sekarang sudah memiliki umur yang tua, akibatnya apabila tidak dilakukan regulasi cegah alih fungsi lahan dan pola peremajaan tanaman karet juga tidak terlaksana. Cara optimal sudah pasti keberlangsungan usaha pedagang karet otomatis juga terancam.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pedagang karet alam dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 1) Membangun kelembagaan pedagang karet dalam bentuk asosiasi yang berfungsi menyalurkan aspirasi pedagang karet ke berbagai pihak pemangku kepentingan terutama pemerintah; 2) Meningkatkan status pedagang karet menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi Pedagang; 3) Membangun kemitraan dengan petani karet dan industri karet dengan prinsip saling menguntungkan; 4) Secara bersama-sama dengan industri dan pemerintah meningkatkan kualitas SDM petani karet

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 12.5. Analisis SWOT Pemberdayaan Pedagang Karet Alam Propinsi Riau

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai • Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank) • Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet • Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase • Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet • Pedagang karet cenderung membeli boker basah dan boker kotor • Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah • Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga tinggi • Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian boker petani • Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang • Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet • Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet
	<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Pedagang karet Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor <i>Standard Indonesian Rubber</i> Yang Diperdagangkan • Permintaan getah karet dunia semakin meningkat 	<p>STRATEGI S - O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin hubungan harmonisasi dengan industri karet dalam menjamin pasokan produk yang berkualitas demi keberlangsungan proses produksi pada industri karet. • Meningkatkan kemitraan dengan petani karet dengan prinsip saling menguntungkan • Meningkatkan SDM Petani agar hasil getah karet memenuhi standar kualitas
<p>TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun 	<p>STRATEGI S - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dengan petani dan industri karet 	<p>STRATEGI W - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi cegah alih fungsi lahan



3. Strategi Pemberdayaan Industri Karet Alam di Provinsi Riau

Hasil pengamatan di lapangan dan pembuat kebijakan diperoleh informasi yang terkait dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi industri karet alam di Provinsi Riau dalam rangka pengembangan komoditi karet, antara lain:

Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga buruh mencapai 2500 orang buruh

Industri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet

Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat modal dan teknologi canggih

Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo Cabang Riau

Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional dan trust yang baik dengan para importir manca negara

Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, Singapura, Thailand)

Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani karet

- Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan pedagang karet
- Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi
- Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan
- Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet
- Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet
- Adanya permintaan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat
- Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan
- Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang.
- Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dari faktor yang sudah teridentifikasi tentang faktor internal–eksternal industri karet alam, maka indikator tersebut dikelompokkan berdasarkan empat kriteria. Keempat kriteria tersebut disajikan pada Tabel 12.6.

Tabel 12.6 Matriks Internal–Eksternal Industri Karet Alam

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga buruh mencapai 2500 orang buruh • Indutri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara • Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet • Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat modal dan teknologi canggih • Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo Cabang Riau • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional dan trust yang baik dengan para importir manca negara • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, Singapura, Thailand) • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani karet • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan pedagang karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi • Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan • Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet • Adanya permintaan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun



Tabel 12.7 Analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau

<p>INTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga buruh mencapai 2500 orang buruh • Industri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara • Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet • Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat modal dan teknologi canggih • Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo Cabang Riau • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional dan trust yang baik dengan para importir manca negara • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, Singapura, Thailand) • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani karet • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan pedagang karet 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi • Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan • Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet
	<p>EKSTERNAL</p>	<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar karet alam terus bertumbuh • Permintaan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat • Industri hilir berbahan baku karet alam makin banyak • Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet
<p>STRATEGI W - O</p>	<p>STRATEGI S - T</p>	<p>STRATEGI W - T</p>
<p>TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun 	<p>STRATEGI S - O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet • Diversifikasi produk dengan harga yang lebih stabil 	<p>STRATEGI W - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi SDM Industri untuk pengolahan dalam rangka peningkatan mutu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau yang disajikan pada Tabel 12.7, selanjutnya dijelaskan hasil bentuk kolaborasi strategi. Hasil analisis menentukan beberapa alternatif strategi pemberdayaan industri karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di pedesaan.

1) Strategi S – O

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan industri karet alam tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Peningkatan produksi karet alam, strategi ini sangat perlu dilakukan mengingat saat ini sebahagian besar umur tanaman karet sudah tua, adanya ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang, SDM petani karet masih rendah sekalipun dia sudah mempunyai pengalaman yang lama. Sementara di sisi lain terdapat peluang adanya tumbuh dan berkembangnya pasar karet alam. Oleh karena itu industri karet yang ada perlu merumuskan strategi untuk melakukan peningkatan produksi karet alam.
- b. Penyerapan untuk industri hilir, selain peningkatan produksi karet alam, Industri karet yang ada sekarang juga perlu merumuskan strategi untuk melakukan penyerapan untuk industri hilir.

2) Strategi W – O

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: (a) Perbaikan proses untuk peningkatan mutu, dan (b) penerapan teknologi untuk industri hilir. Strategi ini berkaitan dengan strategi S –O yaitu peningkatan produksi karet alam dan penyerapan untuk industri hilir.

Strategi S – T

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian rubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah

Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet, seperti hal dalam mata rantai bisnis, bahwa antara satu dengan pihak lainnya tidak dapat dipisahkan. Petani karet sangat tergantung kepada pedagang karet untuk membeli produknya, sebaliknya pedagang karet juga memerlukan petani, tanpa petani karet mustahil pedagang melakukan usahanya, begitu juga antara pedagang karet dengan industri karet. Oleh karena itu demi keberlangsungan usaha agar lebih terjamin diperlukan adanya kemitraan baik dengan pedagang maupun dengan petani karet dengan prinsip saling menguntungkan. Salah satu bentuk realisasi kemitraan tersebut adalah industri bersama pedagang karet dan pemerintah secara bersama-sama meningkatkan kualitas SDM petani karet.

- b. Diversifikasi produk dengan harga yang lebih stabil, sesuai dengan perkembangan pasar dan keanekaragaman kebutuhan industri dan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, maka industri karet juga mesti menyusun strategi untuk melakukan diversifikasi produk.

4) Strategi W -T

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang



diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi SDM Industri untuk pengolahan dalam rangka peningkatan mutu. Strategi ini sangat perlu untuk dilakukan karena dalam konsep penjaminan mutu apabila in putnya berkualitas dan diproses secara berkualitas (didukung oleh SDM yang berkualitas) maka dapat dipastikan bahwa hasilnya juga akan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan adanya SDM yang berkualitas pada industri karet alam. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM ini dapat dilakukan salah satu diantaranya adalah melalui *in service training*.

Berdasarkan analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan industri karet alam dapat dilakukan dengan cara: 1) Peningkatan produksi karet alam dan diversifikasi produk; 2) Penyerapan untuk industri hilir; 3) Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet; 4) Peningkatan kompetensi SDM Industri karet; 5) Melakukan deregulasi peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat iklim investasi di industri karet dan industri hilir karet; 6) Meningkatkan efisiensi di industri karet agar memiliki daya saing dipasar internasional

B. Model Tataniaga Karat Alam di Pedesaan dan Pasar Internasional

Pada bagian ini dipaparkan tentang kondisi terkini mengenai tataniaga karet alam di pedesaan Provinsi Riau dan Model Penawaran dan Permintaan Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Analisis tataniaga karet alam di pedesaan Provinsi Riau meliputi analisis saluran tataniaga, margin dan efisiensi pemasaran. Sementara itu analisis model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar respon penawaran dan permintaan karet alam Indonesia terhadap perubahan-perubahan instrumen pasar seperti harga karet alam dan harga karet sintetis dunia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Tataniaga Karet Alam di Pedesaan

Analisis tataniaga karet alam di pedesaan dilakukan berdasarkan data primer yang dikumpulkan pada dua kabupaten sentra produksi karet alam di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kuantan Singingi maupun di Kabupaten Kampar terdapat (dua) saluran tataniaga yang berlaku. Saluran I, petani menjual produksi karet alamnya berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual ke pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet. Saluran II, petani menjual produksi karet alamnya berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet.

Hasil pengamatan di lapangan, tidak ada petani maupun pedagang pengumpul yang langsung menjual bokar langsung ke pabrik pengolahan karet, hanya pedagang besar yang bisa menjual bokar ke pabrik pengolahan karet. Hal tersebut terjadi karena pabrik pengolahan karet hanya akan membeli bokar dari pedagang yang memiliki *delivery order* (DO), yakni para pedagang besar. Tabel 12.8 menyajikan data jumlah petani menurut saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 12.8. Jumlah Petani Menurut Saluran Tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kuantan Singingi

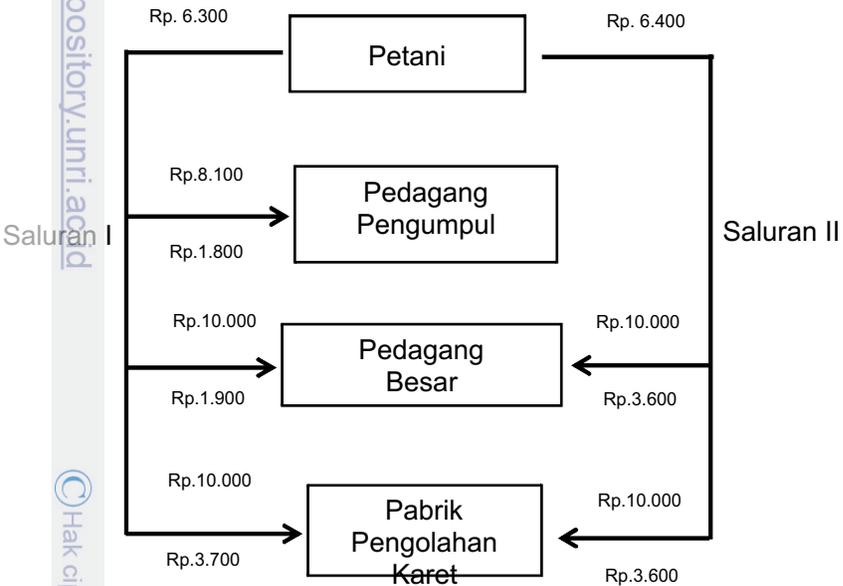
No	Saluran	Petani (jiwa)	Persentase (%)
1	Saluran 1	84	77,5
2	Saluran 2	24	22,5
Jumlah		108	100

Dari tabel dapat dilihat bahwa 77,5% petani memasarkan bokar melalui Saluran I, sedangkan 22,5% sisanya menjual bokar melalui Saluran II. Banyaknya petani yang menjual bokarnya melalui Saluran I dengan pertimbangan kemudahan dalam penjualan karena pedagang pengumpul langsung mendatangi petani untuk membeli bokar. Sementara itu, untuk menjual bokar melalui Saluran II, pedagang bersifat menunggu atau petani yang mendatangi pedagang besar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hasil analisis saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada Gambar 12.1 dan Tabel 12.9. Dari Gambar 12.1 dan Tabel 12.9 dapat dinyatakan bahwa melalui Saluran I, petani menerima harga Rp 6.300 per kg dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menerima harga Rp 8.100 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 10.000 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran I sebesar Rp 3.700 per kg, yang terdiri dari margin pemasaran pedagang pengumpul Rp 1.800 per kg dan margin pemasaran pedagang besar Rp 1.900 per kg. Melalui Saluran II, petani menerima harga Rp 6.400 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 10.000 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran II sebesar Rp 3.600 per kg.



Gambar 12.1. Saluran Tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kuantan Singingi



Tabel 12.9 Analisis Tataniaga Karet Alam Menurut Saluran Tataniaga di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori	Saluran Satu			Saluran Dua		
		Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/Kg)	Persentase (%)	Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/kg)	Persentase (%)
1.	Petani						
	a. Harga Jual	6.300,00			6.400,00		
	b. Biaya						
	-Transportasi		332,26	56,87		389	60,31
	-Penyusutan 4%		252	43,13		256	39,69
	Total biaya		584,26	100,00		645	100,00
	c. Keuntungan	5.715,74			5.755,00		
	Pedagang Pengumpul						
	a. Harga Beli	6.300,00			6.400,00		
	b. Biaya						
	-Bongkar Muat		100	14,49		100	12,58
-Transportasi		41,67	6,04		37,5	4,72	
-Penyusutan 5%		233,33	33,82		337,5	42,45	
-Penyusutan 5%		315	45,65		320	40,25	
Total Biaya		690	100,00		795	100,00	
c. Harga Jual	8.100			10.000			
d. Margin	1.800,00			3.600,00			
e. Keuntungan	1.110,00			2.805,00			
3.	Pedagang Pengumpul Besar						
	a. Harga Beli	8.100					
	b. Biaya						
	-Bongkar Muat		110	13,56			
	-Transportasi		48	5,92			
	-Penyusutan 8%		648	79,90			
	- Retribusi		5				
	Total Biaya		811	100,00			
	c. Harga Jual	10.000					
	d. Margin	1.900					
	e. Keuntungan	1.089					
4	Harga Pembelian Pabrik	10.000			10.000		
5	Total Margin Pemasaran	3.700,00			3.600,00		
6	Total Biaya Pemasaran		2.085,26			1.440,00	
7	Bagian yg diterima Petani	0,63			0,64		
8	Efisiensi Pemasaran			20,85			14,40

Lebih lanjut dari Tabel 12.9 dapat dilihat bahwa total biaya pemasaran Saluran I lebih besar dari total biaya pemasaran Saluran 2, yakni sebesar Rp 2.085,26 per kg untuk Saluran I dan sebesar Rp 1.440,00 per kg untuk Saluran II. Sementara itu bagian yang diterima petani dan nilai efisiensi pemasaran untuk Saluran I lebih kecil daripada Saluran II. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih menguntungkan bagi petani menjual bokar miliknya melalui Saluran II daripada melalui Saluran I. Tataniaga karet alam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

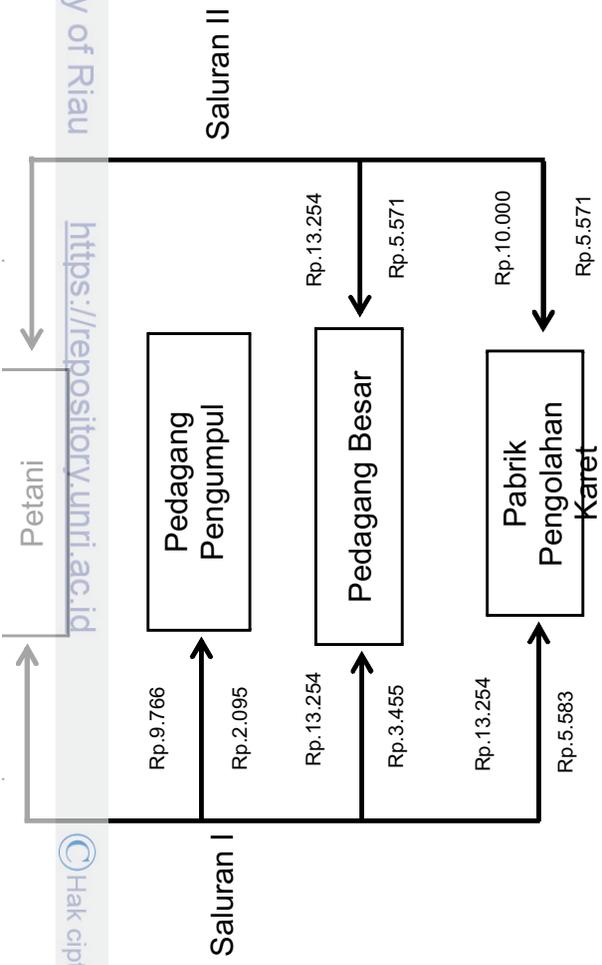
juga lebih efisien melalui Saluran II daripada Saluran I. Hal ini sesuai dengan teori tataniaga yang menyatakan bahwa semakin pendek saluran tataniaga maka pemasaran semakin efisien, sebaliknya semakin panjang saluran tataniaga maka pemasaran semakin tidak efisien.

Tabel 12.10 menyajikan data jumlah petani menurut saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kampar. Dari tabel dapat dilihat bahwa 66,67% petani memasarkan bokar melalui Saluran I, sedangkan 33,33% sisanya menjual bokar melalui Saluran II. Sama dengan di Kabupaten Kuantan Singingi, banyaknya petani di Kabupaten Kampar yang menjual bokarnya melalui Saluran I dengan pertimbangan kemudahan dalam penjualan karena pedagang pengumpul langsung mendatangi petani untuk membeli bokar. Sementara itu, untuk menjual bokar melalui Saluran II, pedagang bersifat menunggu atau petani yang mendatangi pedagang besar.

Tabel 12.10. Jumlah Petani Menurut Saluran tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kampar

No	Saluran	Petani (jiwa)	Persentase (%)
1	Saluran 1	40	66,67
2	Saluran 2	20	33,33
	Jumlah	60	100

Hasil analisis saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada Gambar 4.2 dan Tabel 12.11. Dari Gambar 12.2 dan Tabel 12.11 dapat dinyatakan bahwa melalui Saluran I, petani menerima harga Rp 7.671 per kg dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menerima harga Rp 9,766 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 13,254 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran I sebesar Rp 5,583 per kg, yang terdiri dari margin pemasaran pedagang pengumpul Rp 2,095 per kg dan margin pemasaran pedagang besar Rp 3,455 per kg. Melalui Saluran II, petani menerima harga Rp 7.683 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 13,254 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran II sebesar Rp 5,571 per kg.



Gambar 12.2. Saluran tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 11.11. Analisis Pemasaran Karet Saluran tataniaga Satu dan Dua di Kabupaten Kampar

No	Uraian	Saluran Satu			Saluran Dua			
		Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/Kg)	Persentase (%)	Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/kg)	Persentase (%)	
1.	Petani							
	a. Harga Jual	7.671,00			7.683,00			
	b. Biaya							
	-Transportasi		100,00	24,58		120,00	28,08	
	-Penyusutan 4%		306,84	75,42		307,32	71,92	
	Total biaya		406,84	100,00		427,32	100,00	
	c. Keuntungan	7.264,16			7.255,68			
2.	Pedagang Pengumpul							
	a. Harga Beli	7.671,00			7.683,00			
	b. Biaya							
	-Bongkar		100,00			30,00	5,14	
	-Muat		41,67	6,51		70,00	11,98	
	-Transportasi		115,00	17,96		100,00	17,12	
	-Penyusutan 5%		383,55	59,91		384,15	65,76	
		Total Biaya		640,22	100,00		584,15	100,00
		c. Harga Jual	9.766,00			13.254,00		
		d. Margin	2.095,00			5.571,00		
	e. Keuntungan	1.454,78			4.986,85			
3.	Pedagang Pengumpul Besar							
	a. Harga Beli	9.766,00						
	b. Biaya							
	-Bongkar Muat		35,00	3,22				
	-Transportasi		75,00	6,89				
	-Penyusutan 10%		976,60	89,71				
	-Retribusi		2,00					
		Total Biaya		1.088,60	100,00			
		c. Harga Jual	13.254,00					
		d. Margin	3.488,00					
	e. Keuntungan	2.399,40						
4.	Harga Pembelian Pihak	13.254,00			13.254,00			
5.	Total Margin Pemasaran	5.583,00			5.571,00			
6.	Total Biaya Pemasaran		2.135,66			1.011,47		
7.	Bagian yg diterima Petani	0,58			0,58			
8.	Efisiensi Pemasaran			16,11			7,63	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Selanjutnya dari Tabel 12.11 dapat dilihat bahwa total biaya pemasaran Saluran I lebih besar dari total biaya pemasaran Saluran 2, yakni sebesar Rp 2.135,66 per kg untuk Saluran I dan sebesar Rp 1.011,47 per kg untuk Saluran II. Bagian yang diterima petani sama dengan Saluran II. Sementara nilai efisiensi pemasaran Saluran I lebih besar daripada Saluran II. Hal ini mengindikasikan bahwa tataniaga karet alam lebih efisien melalui Saluran II daripada Saluran I.

Model Penawaran dan Permintaan Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional

Model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menganalisis respon penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional. Dalam membangun dan menganalisis model memasukkan Thailand dan Malaysia sebagai negara yang juga termasuk sebagai produsen karet alam yang besar di dunia.

Pada studi ini digunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1980-2014. Data sekunder yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi data produksi karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, luas lahan karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, ekspor karet alam ke negara tujuan yaitu Amerika Serikat, Cina dan Jepang, harga karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, indeks harga produsen Indonesia, Malaysia dan Thailand, indeks harga konsumen Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Cina dan Jepang, harga karet alam dunia, harga karet sintetis dunia, nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, nilai tukar Bath terhadap US Dolar, nilai tukar ringgit terhadap US Dolar, nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, nilai tukar Yen terhadap US Dolar. Data diperoleh dari berbagai sumber meliputi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, Bank Indonesia (BI), *Index Mundi Rubber*, dan Bank Dunia.

Tahapan pertama penelitian dengan menggunakan pendekatan ekonometrika adalah spesifikasi model. Pada tahapan ini digambarkan hubungan antara peubah-peubah yang dimasukkan ke dalam model, kemudian diformulasikan dalam sejumlah persamaan struktural dan persamaan identitas (Koutsoyannis, 2001). Persamaan struktural diformasikan yaitu persamaan penawaran karet alam Indonesia, permintaan karet alam Indonesia, ekspor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
https://ojs.uin-suka.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ekonomi Pembangunan

karet alam Indonesia, harga karet alam Indonesia, penawaran karet alam Thailand, permintaan karet alam Thailand, ekspor karet alam Thailand, harga karet alam Thailand, penawaran karet alam Malaysia, permintaan karet alam Malaysia, ekspor karet alam Malaysia, harga karet alam Malaysia, impor karet alam Amerika Serikat, Cina, Jepang dan harga karet alam dunia.

Penawaran karet alam Indonesia dipengaruhi oleh harga karet alam Indonesia, pertumbuhan luas areal karet alam Indonesia, penambahan luas kelapa sawit Indonesia dan penawaran karet alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$SIR_t = a_0 + a_1 PIR_t + a_2 GARI_t + a_3 PAPI_t + a_4 SIR_{t-1} + U_{1t} \dots \dots \dots (1)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $a_1, a_2 > 0$; $a_3 < 0$ dan $0 < a_4 < 1$.

Permintaan karet alam Indonesia dipengaruhi oleh variabel penambahan harga karet alam Indonesia, harga karet sintetis dunia, dan permintaan karet alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$DIR_t = b_0 + b_1 PPIR_t + b_2 PSWR_t + b_3 DIR_{t-1} + U_{2t} \dots \dots \dots (2)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $b_1 < 0$; $b_2 > 0$; dan $0 < b_3 < 1$.

Ekspor karet alam Indonesia dipengaruhi oleh variabel nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar, penambahan harga karet alam dunia, permintaan karet alam Indonesia dan ekspor karet alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$XIR_t = c_0 + c_1 ERIR_t + c_2 PPWR_t + c_3 DIR_t + c_4 XIAR_{t-1} + U_{3t} \dots \dots \dots (3)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah, $c_2 > 0$; $c_1, c_3 < 0$ dan $0 < c_4 < 1$.

Harga karet alam Indonesia dipengaruhi harga karet alam dunia, rasio penawaran dan permintaan karet alam Indonesia dan harga karet alam Indonesia peubah tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Indonesia



tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PIR_t = d_0 + d_1 PPWR_t + d_2 XIR_t + d_3 PIR_{t-1} + U_{4t} \dots \dots \dots (4)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $d_1, d_2 > 0$ dan $0 < d_3 < 1$.

Penawaran karet alam Thailand dipengaruhi oleh penambahan harga karet alam Thailand, luas areal karet alam Thailand, penambahan luas areal kelapa sawit Indonesia dan penawaran karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$$R_t = e_0 + e_1 PPTR_t + e_2 ART_t + e_3 PAPT_t + e_4 STR_{t-1} + U_{6t} \dots \dots \dots (5)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $e_1, e_2 > 0$; $e_3 < 1$ dan $0 < e_4 < 1$.

Permintaan karet alam Thailand dipengaruhi oleh variabel harga karet alam dunia, penambahan harga karet alam Thailand, kendaraan bermotor Thailand dan permintaan karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$$DTR_t = f_0 + f_1 PWR_t + f_2 PPTR_t + f_3 VT_t + f_4 DTR_{t-1} + U_{7t} \dots \dots \dots (6)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $f_1, f_2 < 0$; $f_3 > 0$ dan $0 < f_4 < 1$.

Ekspor karet alam Thailand dipengaruhi oleh variabel nilai tukar Bath terhadap US Dolar, harga karet alam Thailand, harga sintetis dunia, permintaan karet alam Thailand dan ekspor karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$$XTR_t = g_0 + g_1 ERTR_t + g_2 RPWSR_t + g_3 DTR + g_4 XTR_{t-1} + U_{8t} \dots \dots \dots (7)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $g_1, g_3 < 0$; $g_2 > 0$ dan $0 < g_4 < 1$.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Harga karet alam Thailand dipengaruhi pertumbuhan harga karet alam dunia, penawaran karet alam Thailand, permintaan karet alam Thailand dan harga karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$$PTR_t = h_0 + h_1 GPWR_t + h_2 STR_t + h_3 DTR_t + h_4 PTR_{t-1} + U_{21t} \dots \dots \dots (8)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $h_{1,2,3} > 0$ dan $0 < h_4 < 1$.

Penawaran karet alam Malaysia dipengaruhi oleh harga karet alam Malaysia, penambahan luas areal karet alam Malaysia, harga pupuk Malaysia dan penawaran karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$$SMR_t = i_0 + i_1 GPMR_t + i_2 GARM_t + i_3 APM_t + i_4 SMR_{t-1} + U_{11t} \dots \dots \dots (9)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $i_1, i_2 > 0$; $i_3 < 0$ dan $0 < i_4 < 1$.

Permintaan karet alam Malaysia dipengaruhi oleh variabel penambahan harga karet alam Malaysia, rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, pertumbuhan pendapatan perkapita Malaysia, pertumbuhan penduduk Malaysia dan permintaan karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$$DMR_t = j_0 + j_1 RPMWR_t + j_2 DTR_{t-1} + U_{12t} \dots \dots \dots (10)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $j_1 > 0$; dan $0 < j_2 < 1$.

Ekspor karet alam Malaysia dipengaruhi oleh variabel penambahan nilai tukar Ringgit terhadap US Dolar, harga karet alam dunia, pertumbuhan harga karet sintetis dunia, permintaan karet alam Malaysia dan ekspor karet alam tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$$XMR_t = k_0 + k_1 PERMR_t + k_2 PWR_t + k_3 GPSWR_t + k_4 DMR_t + k_5 XMR_{t-1} + U_{13t} \dots \dots (11)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $k_2, k_3 > 0$; $k_1, k_4 < 0$ dan $0 < k_5 < 1$.



Harga karet alam Malaysia dipengaruhi harga karet alam dunia, penawaran karet alam Malaysia, permintaan karet alam Malaysia dan harga karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$$MR_t = I_1 PWR_t + I_2 PXMR_t + I_3 PMR_{t-1} + U_{22t} \dots \dots \dots (12)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $I_2 < 0$; $I_1 > 0$ dan $0 < I_3 < 1$.

Impor karet alam Amerika Serikat dipengaruhi oleh variable penambahan harga karet alam dunia, pendapatan per kapita Amerika Serikat dan impor karet alam Amerika Serikat tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Amerika Serikat dirumuskan sebagai berikut:

$$MAR_t = m_0 + m_1 PPWR_t + m_2 GDPAR_t + m_3 MAR_{t-1} + U_{16} \dots \dots \dots (13)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $m_2 > 0$; $m_1 < 0$ dan $0 < m_3 < 1$.

Impor karet alam Cina dipengaruhi oleh variable pertumbuhan nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, harga karet alam dunia, kendaraan bermotor Cina dan impor karet alam Cina tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Cina dirumuskan sebagai berikut:

$$MCR_t = n_0 + n_1 ERRCR_t + n_2 RPWSR_t + n_3 MCR_{t-1} + U_{17} \dots \dots \dots (14)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $n_1, n_2 > 0$ dan $0 < n_3 < 1$.

Impor karet alam Jepang dipengaruhi oleh variable nilai tukar Yen terhadap US Dolar, rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, dan impor karet alam Jepang tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Jepang dirumuskan sebagai berikut:

$$MJR_t = o_0 + o_1 ERJR_t + o_2 PWR_t + o_3 GDPJR_t + o_4 MJR_{t-1} + U_{18} \dots \dots \dots (15)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $o_2 < 0$; $o_1 < 0$ dan $0 < o_4 < 1$.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Harga karet alam dunia dipengaruhi rasio ekspor karet alam dunia dan impor karet alam dunia, pendapatan per kapita dunia dan harga karet alam dunia tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam dunia dirumuskan sebagai berikut:

$$PWR_t = p_0 + p_1 RSDWR_t + p_2 GDPWR_t + p_3 PWR_{t-1} + U_{19t} \dots \dots \dots (16)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $p_1, p_2 > 0$ dan $0 < p_3 < 1$.

Tahapan kedua adalah identifikasi model. Wooldridge, Kennedy (2008) mengemukakan bahwa untuk dapat diduga paramaternya, suatu model persamaan simultan harus teridentifikasi. Rumus identifikasi model berdasarkan *order condition* sebagai berikut:

$$(K-M) \geq G-1 \dots \dots \dots (17)$$

dimana: K= total variabel dalam model yaitu *endogenous variables* dan *predetermine variables*; M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model; G= Total persamaan dalam model, yaitu jumlah variabel endogen dalam model. Jika $(K-M) > (G-1)$, maka persamaan teridentifikasi berlebih (*overidentifikasi*); jika $(K-M) = (G-1)$, maka persamaan teridentifikasi berlebih (*exactly identified*); Jika $(K-M) < (G-1)$, maka persamaan tidak teridentifikasi (*unidentified*). Dilihat dari persamaan ekspor karet alam Malaysia, $K = 18$, $M = 5$, $G = 5$, maka persamaannya teridentifikasi berlebih.

Berdasarkan hasil identifikasi model, seluruh persamaan struktural dalam model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar dunia teridentifikasi berlebih (*overidentifikasi*), oleh karena itu metode estimasi yang sesuai digunakan adalah *Two Stage Least Square*. Untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas secara individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen pada masing-masing persamaan digunakan uji statistik t dengan taraf nyata yang digunakan sampai pada batas toleransi 20 persen.

Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai elastisitas. Nilai elastisitas digunakan untuk mendapatkan nilai kuantitatif dari respon suatu fungsi



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendugaan model yang diperoleh, maka dihitung elastisitas peubah-peubah yang memiliki nilai dugaan yang berbeda nyata sama dengan nol pada taraf sampai dengan 20 persen. Hal ini untuk melihat apakah peubah-peubah yang mempengaruhi pada model berpengaruh secara positif atau negatif dan apakah peubah-peubah yang mempengaruhi pada model bersifat responsif atau tidak terhadap peubah yang dipengaruhinya. Jika nilai elastisitas yang diperoleh besar dari satu maka peubah yang dipengaruhi bersifat responsif terhadap perubahan peubah yang mempengaruhinya, tetapi jika nilai elastisitas yang diperoleh kecil dari satu maka peubah yang dipengaruhi bersifat tidak responsif terhadap perubahan peubah yang mempengaruhinya, untuk menghitung nilai elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Pindyck, Hayashi, Stock 2012):

$$E_{SR} = \frac{\partial Y_t}{\partial X_t} \frac{X_t}{Y_t} = b \dots \dots \dots (18)$$

$$E_{LR} = \frac{\partial Y_t}{\partial X_t} \frac{X_t}{Y_t} \dots \dots \dots (19)$$

dimana : E_{SR} = elastisitas jangka pendek peubah endogen Y_t terhadap peubah penjelas X_t ; E_{LR} = elastisitas jangka panjang peubah endogen Y_t terhadap peubah penjelas X_t ; a = koefisien dugaan dari peubah eksogen; b = koefisien dugaan dari peubah lag; X_t = nilai rata-rata peubah eksogen; Y_t = nilai rata-rata peubah endogen.

Hasil pendugaan model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional pada penelitian ini cukup baik sebagaimana terlihat dari koefisien determinasi (R^2) dari setiap model persamaan. Nilai koefisien determinasi pada model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional berkisar antara 0,43 sampai 0,98 dengan nilai statistik uji F berkisar antara 7,62 sampai 370,18 dan berbeda nyata dengan nol pada taraf 1 persen. Secara umum peubah-peubah eksogen yang dimasukkan pada setiap persamaan model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia mampu menjelaskan dengan baik peubah endogennya.

Besaran nilai statistik R^2 pada persamaan penawaran karet alam Indonesia adalah 0,9807 artinya 98,07 persen peubah harga karet alam Indonesia, pertumbuhan luas lahan karet alam Indonesia, penambahan kelapa



Ekonomi Pembangunan

sawit Indonesia dan penawaran karet alam Indonesia tahun sebelumnya menjelaskan variasi peubah penawaran karet alam Indonesia sedangkan 1,93 persen sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Variasi ini signifikan pada taraf nyata 1 persen yang dilihat dari F hitung sebesar 370,18 dan probabilitas kecil 0,0001.

Hasil pendugaan model yang meliputi empat persamaan struktural yang dibangun dapat dilihat Lampiran 1. Hasil pendugaan persamaan penawaran karet alam Indonesia menunjukkan bahwa harga karet alam Indonesia berpengaruh positif terhadap penawaran karet alam Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa apabila harga karet alam Indonesia meningkat maka penawaran karet alam Indonesia cenderung meningkat. Perhitungan elastisitas harga karet alam Indonesia terhadap penawaran karet alam Indonesia tidak responsif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan nilai masing-masing 0,0885 dan 0,3613. Nilai elastisitas tersebut memiliki arti apabila harga karet alam Indonesia meningkat sebesar 1 persen maka produksi karet alam Indonesia meningkat sebesar 0,91 persen dalam jangka pendek dan meningkat sebesar 0,7363 persen dalam jangka panjang.

Hasil dugaan persamaan permintaan karet alam Indonesia berhubungan negatif dengan penambahan harga karet alam Indonesia dengan berbeda nyata pada taraf 10 persen. Permintaan karet alam Indonesia tidak responsif terhadap penambahan harga karet alam Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan nilai masing-masing 0,0895 dan 0,1782. Nilai elastisitas tersebut memiliki arti penambahan harga karet alam Indonesia meningkat 1 persen maka permintaan karet alam Indonesia sebesar 0,0895 persen dalam jangka pendek dan meningkat 0,1782 persen dalam jangka panjang.

Penawaran karet alam Thailand berhubungan negatif dan tidak responsif terhadap penambahan luas lahan kelapa sawit Thailand sedangkan hasil dugaan permintaan karet alam Thailand berhubungan positif dan tidak responsif dengan jumlah kendaraan Thailand. Hasil dugaan ekspor karet alam Thailand berhubungan negatif dengan harga karet alam Thailand dan berhubungan positif dengan harga sintetis dunia dan harga karet alam dunia.

Hasil dugaan penawaran karet alam Malaysia berhubungan positif dan tidak responsif terhadap penambahan luas lahan karet alam Malaysia



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Sedangkan harga pupuk Malaysia berhubungan negatif dan tidak responsif terhadap penawaran karet alam Malaysia. Hasil permintaan karet alam Malaysia berhubungan positif dengan rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, dalam jangka panjang responsif. Pertumbuhan jumlah penduduk Malaysia berhubungan positif dan responsif terhadap permintaan karet alam Malaysia. Hasil dugaan ekspor karet alam Malaysia berhubungan negatif terhadap permintaan karet alam Malaysia

Hasil dugaan impor karet alam Amerika Serikat berhubungan positif dan responsif terhadap kendaraan bermotor Amerika dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dugaan impor karet alam Cina berhubungan negatif dan responsif dalam jangka panjang terhadap harga karet alam dunia tetapi berhubungan positif dengan kendaraan bermotor Cina dan responsif dalam jangka panjang. Hasil dugaan impor Jepang tidak responsif terhadap nilai tukar Yen terhadap US Dolar maupun rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia.

Hasil dugaan persamaan harga karet alam dunia berhubungan positif dan responsif dalam jangka panjang terhadap rasio ekspor karet alam dunia dan impor karet alam dunia serta pendapatan perkapita dunia. Hasil dugaan persamaan harga karet alam Indonesia berhubungan positif dengan harga karet alam Indonesia dan responsif dalam jangka panjang. Hasil dugaan persamaan harga karet alam Thailand berhubungan positif dan tidak responsif terhadap pertumbuhan harga karet alam dunia sedangkan hasil dugaan harga karet alam Malaysia berhubungan positif dan responsif dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap harga karet alam dunia sedangkan penawaran karet alam Indonesia berhubungan negatif dan tidak responsif dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional adalah harga karet alam Indonesia, penambahan luas lahan kelapa sawit Indonesia, kendaraan bermotor Thailand, rasio harga karet alam dunia terhadap harga karet sintetis dunia, penambahan ekspor karet alam Thailand, harga karet alam Malaysia, permintaan domestik karet alam Malaysia, pendapatan per kapita Amerika Serikat dan Jepang, nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, nilai tukar Yen terhadap US Dolar,



pendapatan perkapita dunia. Faktor yang paling besar pengaruh terhadap penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional adalah harga karet alam dunia.

Dalam rangka pengembangan karet alam di Indonesia perlu menerapkan kebijakan peningkatan harga. Indonesia harus berupaya meningkatkan kualitas produksi karet alam dan pengembangan industri hilir. Perlu adanya kebijakan pemerintah terkait nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang stabil. Adanya upaya untuk mendirikan industri hilir karet alam Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam negeri.

C. Prospek dan Potensi Pengembangan Karet Alam

1. Perkembangan Komoditi Karet Alam di Riau

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Demikian juga halnya di Provinsi Riau, pengusahaan komoditas karet merupakan salah satu matapecaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan masyarakat.

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: *Pertama*, produktivitas karet yang rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. *Kedua*, harga karet yang relatif rendah dan berfluktuasi. Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa berada pada *bargaining position* yang lemah. *Ketiga*, alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 62% pertahun. Perkembangan ini terjadi di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa daerah antara lain kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di Riau, namun dari sisi produksi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan tanaman. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal di sekitar perkebunan karet pada wilayah bukaan baru atau penguatan areal dengan menggunakan inovasi teknologi.

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyiapan yang tidak tepat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi buruknya



Ekonomi Pembangunan

mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung memperberat timbangan bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan harapan petani memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut mempengaruhi rendahnya mutu bokar yang dihasilkan petani karet (Bakce, 2014)

Rendahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani karet dengan pedagang ikut membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok usaha bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 244.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 245.460 KK. Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit.

Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kelembagaan petani karet di pedesaan, belum ada satu kelompokpun yang sudah teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan UPPB oleh petani karet memberikan peluang kepada petani karet untuk memasarkan bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb rubber) tanpa melalui pedagang pengumpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor atau *Free on Board* (FOB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan ini beli bokar antara petani karet dengan pedagang pengumpul, tidak hanya terbatas hubungan ekonomi semata, melainkan membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (*patron klien*) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak memilihnya karena pilihan lain akibatnya taraf hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin merosot.

Permentan No. 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. Belum berlakunya Permentan tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet. Kenyataan ini membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun pedagang informal belum tertata dengan baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.

2. Potensi Pengembangan Industri Karet

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi kelapa sawit. Luas lahan 484.551 ha menghasilkan 337.185 ton per tahun dengan jumlah petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik pengolah yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 265.000 ton per tahun (Gapkindo, 2016). Jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 337.185 ton per tahun, sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 265.000 to per tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet terpasang di Daerah Riau merupakan salah satu faktor penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat petani. Pada tingkat petani terjadi kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku industri karet. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 12.12.

Tabel 12.12. Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam di Riau

Indikator	Kuantitas
Luas Areal (ha), tahun 2016	484.551,00
Produksi (ton), tahun 2016	337.185,00
Industri pengolah sudah ada (unit)	9
Kapasitas terpasang (ton/tahun)	265.000
Kemampuan mesin (ton/tahun)	232.000
Kelebihan bahan baku (ton/tahun)	105.185,00
Daya dukung wilayah (DDW)	1,45
Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)	5

Sumber: Data olahan dari Gapkindo Riau, 2016

Hasil perhitungan DDW diketahui indeksnya 1,45. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekanan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat.

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil



Ekonomi Pembangunan

karet alam dunia masih dapat diraih kembali dengan memperbaiki teknik budidaya dan pasca panen/pengolahan, sehingga produktivitas dan mutu hasil akan dapat ditingkatkan secara optimal.

Perkembangan cara penyajian karet alam ternyata sangat menarik. Timbulnya industri karet dengan spesifikasi teknis merupakan perkembangan yang sangat positif sebagai jawaban yang sangat nyata. Demikian pula adanya cara pengepakan yang baik akan membuka era baru penyajian karet alam. Kondisi kemajuan seperti ini menyebabkan para konsumen mulai berpaling lagi ke karet alam.

Selain hal tersebut di atas, kemajuan lain yang terjadi pada industri karet alam di antaranya: 1) Pembuatan karet secara kimia yang menghasilkan karet tanah minyak pelumas; 2) Penemuan karet termo-plastik yang berasal dari campuran karet alam dan polipropilen; 3) Perluasan penggunaan karet alam untuk pembuatan barang bukan ban; 4) Penemuan teknik pencangkakan dari lateks; 5) Perbaikan teknik eksploitasi seperti penggunaan stimulan dan penyempurnaan alat sadap.

Melalui inovasi teknologi tersebut secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin usaha ini akan memberikan dampak pada kenaikan harga jual dan menurunkan biaya produksi. Oleh karena terdapat kecenderungan konsumen akan kembali pada karet alam maka diperkirakan akan terjadi kekurangan penawaran karet alam. Jika berpijak pada asumsi ini maka dapat disimpulkan masa depan karet alam memiliki prospek yang cukup baik.

Masa lalu tanaman karet lebih dikenal sebagai penghasil lateks. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, kayu karet pun sudah mulai dimanfaatkan. Kayu karet yang sudah berumur 20—30 tahun dapat ditebang kemudian dimanfaatkan dalam pembuatan *rubber smoked sheet*. (RSS). Alur pembuatan RSS sebagai berikut: 1) lateks dimasukkan ke tangki penampungan dan dicampur dengan asam formic; 2) kemudian lembaran karet dikeringkan di ruang asap dengan suhu sekitar 120- 140 derajat selsius; dan 3) Kayu karet yang sudah tua dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengasapan tersebut.

Ditinjau dari sifat alaminya, kayu karet ini dapat dijadikan sebagai barang substitusi dengan kayu rami, agathis, meranti putih, dan pinus sebagai bahan baku kayu olahan. Berdasarkan asas manfaat dan kegunaan kayu karet,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



maka prospek tanaman karet sebagai penghasil kayu pada masa mendatang cukup baik. Peluang pengembangan industri karet alam dan industri turunannya dapat dilihat pada Gambar 12.3.

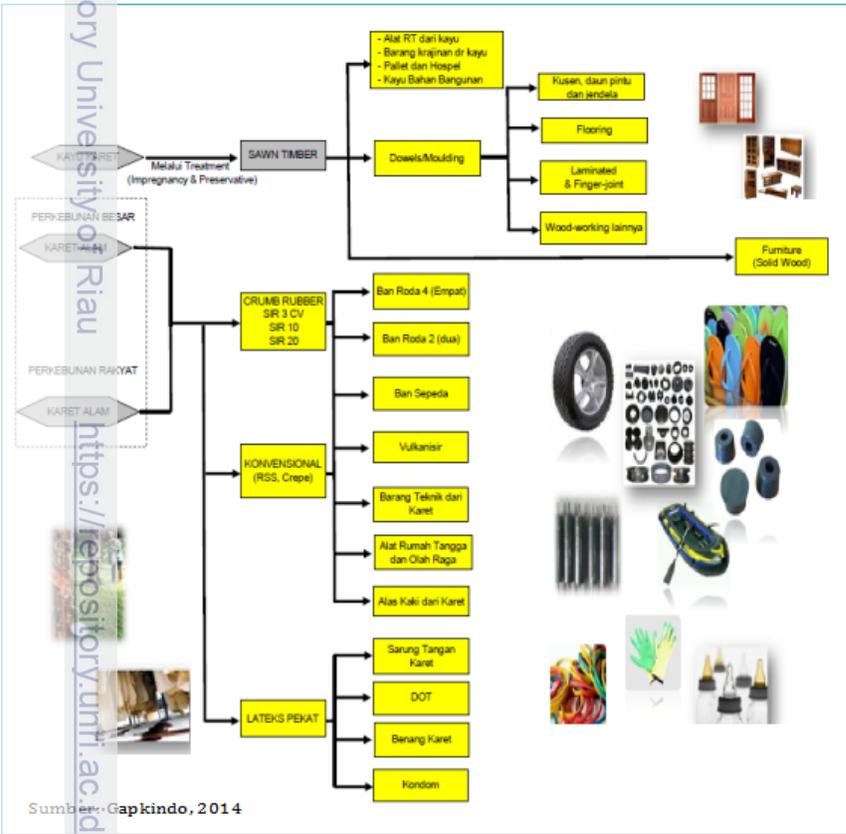
Selanjutnya bibit atau klon unggul dipilih yang benar-benar menghasilkan kayu berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Sedikitnya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh klon unggul, baik dalam bentuk benih, stum mata tidur, maupun bibit dalam polybag. Kriteria tersebut adalah: 1) Mempunyai pertumbuhan awal yang cepat sehingga mampu berkompetisi dengan gulma dan tanaman lain; 2) Mampu beradaptasi dengan keadaan lahan terutama padang alang-alang dan lahan gundul; 3) Mempunyai batang yang besar, lurus, dan mutu kayu baik; 4) Mampu memproduksi lateks yang tinggi; dan 5) Tidak sensitif terhadap penyadapan dan perubahan lingkungan fisik atau biologis.

Produksi puncak dicapai pada umur tahun sadap antara 8 - 9 tahun. Setelah itu produksi lateks menunjukkan kecenderungan menurun. Bila di rata-rata produksi karet kering pada lima tahun pertama antara 1.200 - 1.500 kg per hektar per tahun. Produksi karet kering rata-rata pada umur 10 tahun antara 1.600 - 1.800 kg per hektar per tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 12.3. Pohon Industri Karet Alam

Dalam kebijakan pengembangan tanaman karet ditetapkan empat pola pengembangan yang dikenal dengan program Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu pola PIR, pola UPP, pola swadaya, dan pola perkebunan besar. Menerapkan keempat pola ini diharapkan produktivitas karet, khususnya perkebunan karet rakyat yang masih berada pada tingkat yang rendah, dapat ditingkatkan. Pengembangan ditentukan banyak ketersediaan bahan tanam, tenaga pembina dan dukungan perbankan.

Menurut Hardjoamidjojo (2002), melalui analisis prospektif ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan, yaitu : 1) Menentukan faktor-faktor kunci untuk masa depan sistem yang dikaji; 2) Menentukan tujuan strategis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan kepentingan pelaku utama; 3) Mendefinisikan/mendesripsikan hasil evaluasi kemungkinan masa depan; 4) Menentukan nilai faktor yang mempengaruhi.

Kebutuhan karet alam terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia dan mobilitas manusia serta barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, *conveyor belt*, sabuk transmisi, sepatu dan sandal karet. Secara fundamental harga karet alam dipengaruhi oleh permintaan (konsumsi) dan penawaran (produksi) serta stock/cadangan dan masing-masing faktor. Menurut *International Rubber Study Group* (IRSG) diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam pada periode dua dekade ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi hak konsumen, terutama pabrik-pabrik ban mobil seperti Bridgestone, Goodyear dan Michelin.

Asosiasi negara-negara produsen karet alam atau the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) telah merevisi perkiraan pasokan karet alam dunia tahun 2016 dan memperkirakan harga kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan untuk beberapa waktu kedepan. ANRPC membuat laporan itu berdasarkan produksi bulanan di sejumlah negara produsen utama dalam lima bulan terakhir hingga Mei 2016. Revisi prediksi itu menyatakan bahwa total pasokan kemungkinan tumbuh lebih lambat pada tingkat 0,3% selama 2016 ketimbang 0,8% pada tahun 2015 dan 5% pada tahun 2014. Asosiasi yang negara-negara anggotanya memproduksi 90% dari total pasokan karet alam dunia itu menyebutkan pasokan karet alam tahun 2016 kemungkinan mencapai 11,075 juta ton, sedikit lebih tinggi dari 11,042 juta ton pada tahun sebelumnya. Sebelumnya, pada bulan Mei 2015 ANRPC memprediksikan pasokan karet alam dunia tahun 2016 akan menyentuh 11,166 juta ton, 1,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkiraan produksi yang lebih rendah itu didasarkan pada realisasi produksi karet alam di negara-negara anggota yang sampai akhir Mei 2016 mencapai 4,080 juta ton, hanya 0,3% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun ada sentiment negatif yang muncul dari kemungkinan lemahnya permintaan, namun diperkirakan hal itu mampu diredam dengan pertumbuhan pasokan yang nyaris 0%, prospek minyak bumi yang tidak menentu, dan melemahnya nilai mata uang negara-negara eksportir karet



Ekonomi Pembangunan

alam utama. Kondisi tersebut mengakibatkan sentiment negatif itu terus tertekan. “Kesimpulannya, harga karet alam akan kekurangan sentiment pendukung yang solid dari faktor fundamental permintaan-pasokan ataupun faktor non fundamental setidaknya dalam kurun waktu kedepan. Selain itu tren yang menggembirakan di tengah semua ketidakpastian itu diantaranya adalah terjadinya peningkatan konsumsi domestik di negara-negara eksportir karet utama dunia. Thailand adalah negara penghasil karet terbesar di dunia dengan pangsa produksi 36% dari produksi dunia, sedangkan Indonesia dengan 26% pangsa produksi menjadi negara produsen terbesar kedua. India saat ini berada di urutan keenam produsen karet alam dunia setelah Vietnam, China dan Malaysia.

Oleh karena itu pada tahun 2004, IRSG melakukan studi tentang permintaan dan penawaran karet alam dan sintetis dunia. Hasil studi menyatakan bahwa permintaan karet alam dan sintetis adalah sebesar 31,3 juta ton pada tahun 2035 untuk industri ban dan non ban dimana 15 juta diantaranya adalah karet alam. Produksi karet alam pada tahun 2005 sebesar 8,5 juta ton. Berdasarkan studi ini diproyeksikan pertumbuhan produksi karet Indonesia akan mencapai 3% pertahun, sedangkan Thailand hanya 1% dan Malaysia 2% (IRSG, 2004). Pertumbuhan produksi Indonesia ini dapat dicapai melalui peremajaan atau penanaman baru karet yang cukup luas dengan perkiraan produksi pada tahun 2020 sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2035 sebesar 5,1 juta ton (Anwar Chairil, 2006).

Penawaran karet dunia meningkat lebih dari tiga persen per tahun dalam dua dekade terakhir, dimana mencapai 8,81 juta ton pada tahun 2005 (Chairil Anwar, 2006). Pertumbuhan tersebut berasal dari negara produsen Thailand, Indonesia, Malaysia, India, China dan lainnya. Sejak tahun 1991 Malaysia tidak lagi menjadi produsen utama karet alam dunia tetapi digeser oleh Thailand, sementara Indonesia tetap sebagai negara produsen kedua. Thailand memproduksi lebih dari 33% karet alam dunia pada tahun 2005. Sementara Indonesia dengan pangsa produksi 26% dan Malaysia tinggal 13%. Menurut Susila, W, R (2010) proyeksi yang berkaitan dengan karet alam Indonesia dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario optimis (SO), skenario pasimis (SP) dan skenario moderat (SM) dengan pertumbuhan produksi untuk SO, SP dan SM adalah masing-masing 3,5%, 2,0% dan 2,2% per tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Secara teoritis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan (*imbalance*) penawaran dan permintaan akan bereaksi terhadap harga. Dimana kenaikan harga terjadi karena defisit penawaran dan turunnya harga karena surplus penawaran. Berdasarkan data IRSG (2004), ketidakseimbangan penawaran dan permintaan karet alam mulai terlihat sejak tahun 1990 an dan berpengaruh terhadap cadangan (stock) karet alam dunia.

Target pengembangan karet harus didukung dengan berbagai factor, antara lain: 1) Seluruh sentra produksi mempunyai komitmen untuk pengembangan karet pada wilayahnya masing-masing; 2) Penyediaan benih/bibit karet sesuai permintaan setiap wilayah pengembangan; 3) Petugas penyuluh perkebunan yang menangani karet; 3) Sumber daya manusia dan sarana petani untuk pemeliharaan kebun dan penanganan pasca panen; 4) Dukungan perbankan berupa dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan kebun.

Pengembangan perkebunan karet dilakukan secara tradisional dan masih memegang kuat ketentuan-ketentuan adat khususnya terkait dengan konservasi sumberdaya alam. Hal ini mereka lakukan karena mereka hidup di lingkungan alam pegunungan dengan kemiringan yang cukup tajam dan membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi bencana. Karena itu penentuan lokasi kebun karet dan cara pengelolaan oleh petani dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga pengembangan perkebunan karet dapat dikatakan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang berarti. Lebih lanjut, pengembangan perkebunan karet di Indonesia hampir seluruhnya diusahakan oleh petani (PR) seluas 2.935.081 ha (84,75 %), kemudian perkebunan besar nasional seluas 239.132 ha(6,97 %), dan 275.931 ha (8,28 %) yang dikelola oleh perkebunan besar swasta (Statistik Perkebunan, Karet 2015), sehingga permasalahan sosial khususnya yang terkait dengan lahan tidak pernah terjadi. Kehadiran tanaman karet sebagai tanaman perkebunan telah memberikan manfaat sosial yang positif khususnya dalam menyediakan kesempatan kerja dan berusaha. Oleh karena itu biaya dan manfaat lingkungan maupun biaya dan manfaat sosial dalam pengembangan perkebunan karet bernilai positif.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kebutuhan karet alam walaupun agak melambat tapi pasti masih tetap dibutuhkan dalam pengembangan industri karet. Di Provinsi Riau terdapat 6 perusahaan industry

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau
https://ojs.uin-suka.ac.id/



karet dengan total produksi crumb rubber pada tahun 2015 mencapai 165,962,046 kg seperti terlihat pada Tabel 12.13.

Tabel 12.13. Jumlah Produksi Crumb Rubber Provinsi Riau Tahun 2015 (dalam kg SIR)

No	Bulan	Jumlah Produksi (kg)
1	Januari	11,806,105
2	Februari	11,951,815
3	Maret	15,008,775
4	April	14,871,534
5	Mai	14,518,735
6	Juni	15,478,625
7	Juli	13,298,810
8	Agustus	14,762,125
9	September	14,272,200
10	Oktober	14,080,080
11	November	13,079,330
12	Desember	12,833,912
	Jumlah	165,962,046

Sumber: Gapkindo Riau, 2016

Tabel 12.13 memperlihatkan bahwa produksi industry crumb rubber Riau tahun 2015 memperlihatkan kecenderungan penurunan secara fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain, harga karet yang cenderung turun sehingga tidak menarik minat petani karet untuk menyadap kebunnya sehingga industry karet mengalami kelangkaan bahan baku. Selain itu banyaknya alih fungsi lahan kebun karet menjadi kebun kelapa sawit juga mempengaruhi menurunnya pasokan bahan baku ke industry karet yang pada akhirnya menyebabkan produksi crumb rubber makin turun. Dilihat dari sisi ini pengembangan industry karet alam sangat ditentukan oleh pasokan bahan baku karet. Pasokan bahan baku sangat dipengaruhi oleh musim, produktivitas tanaman, dan kinerja petani karet. Dengan demikian pengembangan industry karet sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman karet dan peningkatan kinerja petani karet. Peningkatan kinerja petani karet dipengaruhi oleh harga karet. Semakin rendah harga karet ditingkat petani, maka makin banyak petani karet yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

meninggalkan kebunnya dan beralih profesi ke mata pencaharian lain. Oleh karena itu perlu ada strategi untuk meningkatkan harga karet ditingkat petani sehingga memotivasi petani untuk meningkatkan produksi sadapannya.

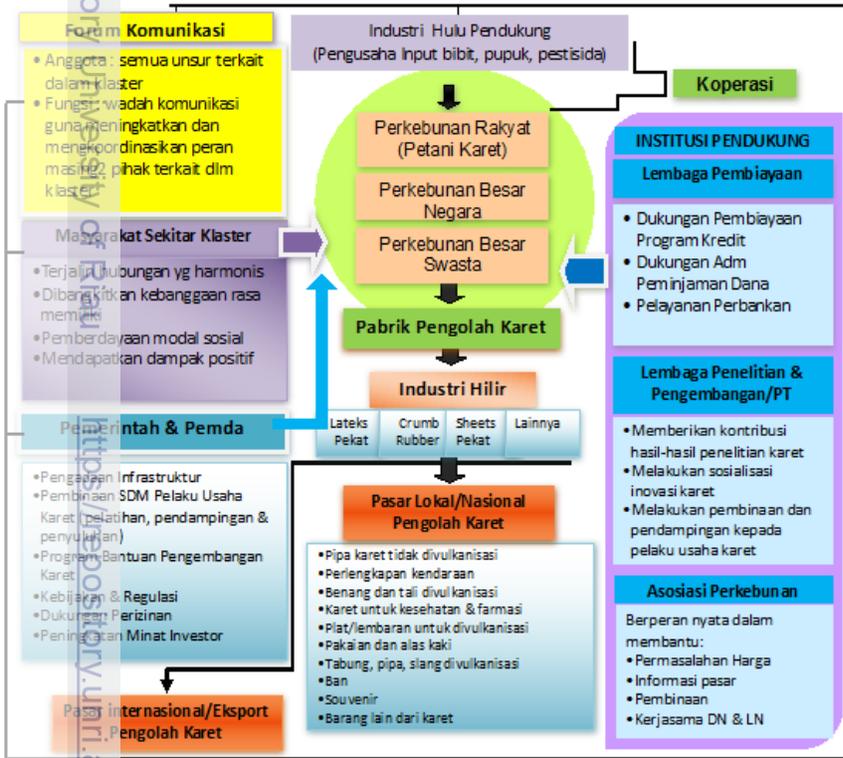
Untuk meningkatkan harga karet ditingkat petani dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 1) Membentuk unit pengolah dan pemasaran bokar (PPB) di tingkat desa yang berbasis kelompok petani yang dapat menjual bahan baku karet langsung ke pabrik karet, sehingga rantai pemasaran karet melalui pedagang pengumpul (tauke) dapat dikurangi; 2) Mengembangkan pasar lelang karet di tingkat desa; 3) Dalam jangka panjang melakukan pembinaan remajaan karet yang tidak produktif dengan tanaman karet unggul agar di masa yang akan datang produktivitas petani makin meningkat; 4) Perlu ada upaya meningkatkan pemasaran crumb rubber dalam negeri dengan melaksanakan hilirisasi industry karet, sehingga ketergantungan pemasaran crumb rubber ke pasar internasional dapat dikurangi.

Pengembangan industri hilir karet di perdesaan pada dasarnya tidak hanya industri ban kendaraan saja melainkan sangat banyak produk barang jadi karet yang dapat diproduksi di perdesaan yang tidak memerlukan padat modal dan padat teknologi seperti industry sarung tangan karet, benang karet, alas kaki karet, alat teknik karet, alat rumah tangga dan alat olah raga dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu untuk pembangunan inprastruktur hasil karet alam dapat pula dipergunakan sebagai campuran aspal untuk pembangunan jalan, pintu-pintu air pada saluran irigasi, bantalan rel kereta api dan vendor kapal.

Pengembangan hilirisasi industri karet selama ini tidak berkembang karena beberapa hal antara lain: 1) Kualitas bahan baku karet alam yang rendah; 2) Kompon sebagai bahan baku industry barang jadi karet masih harus dibeli dari luar Riau bahkan dari luar negeri misalnya karet sintetis; 3) Pengetahuan tentang industry barang jadi karet masih rendah; 4) Kurangnya pengetahuan mengenai pasar barang jadi karet; 5) Ketidaksiapan infrastruktur pendukung industry; 6) Jaminan ketersediaan bahan baku karet dari pabrik karet di Riau, karena sebagian besar industry karet telah terikat kontrak dengan pemasaran dalam bentuk SIR. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dikembangkan kluster dengan pola sebagaimana terlihat pada Gambar 12.4.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 12.4. Pola Pengembangan Kluster Karet di Riau

Kluster Karet Riau perlu diawali dengan mendirikan Pusat Inovasi Barang Jadi Karet (PIBJK). PIBJK merupakan tempat/wadah untuk melakukan kegiatan perekayasaan dan transfer IPTEK yang dihasilkan oleh lembaga litbang, universitas, dinas dan instansi terkait. Tujuannya untuk meningkatkan penguasaan IPTEK dan keterampilan SDM, UKM, calon wirausaha dan masyarakat untuk mengembangkan dan membangun industri hilir barang jadi karet berdaya saing tinggi. Untuk itu fungsi PIBJK dapat diilustrasikan sebagaimana terlihat pada Gambar 12.5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 12.5. Fungsi Pusat Inovasi Barang Jadi Karet (PIBJK)

Penyebab rendahnya peran perguruan tinggi dalam penelitian hilirisasi karet, antara lain: 1) Pentingnya industri pengolahan barang jadi karet belum menjadi isu/fokus utama peneliti teknis dan kelembagaan PT (lebih banyak dibidang kelapa sawit); 2) Sumberdaya operasional untuk mendukung penelitian teknis/teknologi hilirisasi produk karet belum memadai; 3) Permintaan penembangan industri hilir oleh para investor dan orientasi komersialnya masih rendah; 4) Terdapat kendala birokrasi dan komitmen politik pembangunan di Riau yang lebih menitik beratkan kepada kelapa sawit.

Dalam upaya pengembangan industri hilir karet di perdesaan sangat diperlukan komitmen antara lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi. Komitmen tersebut disesuaikan dengan peran masing-masing institusi, antara lain: 1) Perguruan Tinggi mulai memperhatikan penelitian terapan pengembangan industri hilir karet (produk perkebunan lainnya); 2) Kerjasama dalam Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Karet Kementerian Perindustrian melalui PIBJK Riau memulai kegiatan operasional bekerjasama dengan instansi/institusi terkait lainnya; 3) Pemerintah menggerakkan kelompok kecil investor



yang berminat tinggi dalam hilirisasi karet dengan menerapkan prinsip Akademisi (A) Bisnis Society (B) Governmen (G).

E. Model Pengembangan Kelembagaan dan Tataniaga Karet Alam di Pedesaan

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa terjadi pergeseran usahatani karet ke kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan karena potensi dan peluang pasar kelapa sawit lebih terjamin dibandingkan pasar karet. Petani karet di pedesaan cenderung menghadapi pasar monopsoni seentara petani kelapa sawit pasarnya lebih kompetitif. Dari sisi lain harga penghasilan kelapa sawit lebih memberikan peluang kesejahteraan yang tinggi dibandingkan karet. Dampak kondisi ini terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman karet ke kelapa sawit. Bagi industri karet alam juga merasakan dampak tersebut melalui kekurangan bahan baku untuk industri.

Berdasarkan diskusi dengan pelaku bisnis karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi yakni pihak industri dan pedagang perantantara maupun pedagang besar memberikan informasi bahwa industri karet alam di daerah mengalami kekurangan bahan baku. Salah satu industri tersebut justru mendatangkan bahan baku dari luar daerah seperti dari Sumatera Selatan dan Lampung. Dari sisi lain petani karet dan pedagang besar disekitar industri justru menjual karetnya ke pedagang dari luar daerah (Jambi). Hal tersebut lebih disebabkan harga jual ke tingkat pedagang pengumpul lebih tinggi, bahkan selisih harganya mencapai Rp 2.000 per kg karet mentah.

Beberapa informasi yang diperoleh dari pelaku bisnis karet alam di daerah survei yaitu PT Andalas Agro Lestari (PT AAL), antara lain: 1) Kapasitas produksi terpasang sebesar 4.000 ton per bulan, karena kekurangan bahan baku kegiatan hanya bisa dipenuhi sebesar 62,5 % yaitu 2.500 Ton / bulan; 2) Sebagian besar petani pemasok bahan baku sudah bergeser ke komoditi kelapa sawit; 3) Kompetitor mampu membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi, sehingga masuk pedagang-pedagang dari luar daerah (Medan dan Jambi), bahkan pemerka mampu membuat gudang penampungan di lokasi Kuantan Singingi; 4) Fluktuasi harga yang sangat cepat dan cenderung selalu menurun; 5) Penentuan harga berdasarkan pasar internasional SGX.com yaitu harga 100% karet yang nantinya harga notering baku karet



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

mentah ke petani hanya menjadi 50-60% (contoh pada tgl 14 Nov 2016; harga di SGX.com Rp. 17.500/ kg namun harga Notering bahan karet mentah ke petani hanya menjadi Rp. 8.000 sd 9.000 / kg); 6) PT AAL tidak mempunyai kebun karet sendiri, akibatnya ketergantungan bahan baku sepenuhnya dari petani atau pemasok; 7) untuk mempertahankan aktivitas industri PT AAL menerima karet alam yang berasal dari Lampung; 8) Biaya perizinan yang bersifat rutin dari pemerintah daerah dirasakan tinggi (contohnya HO sampai mencapai ratusan juta rupiah).

Permasalahan yang dihadapi pedagang pengumpul di pedesaan (yang dikenal Toke) maupun pedangan besar, antara lain: 1) Harga jual standar kepada pabrik karet alam (PKA) berkisar sebesar Rp. 10.000 per kg, dengan kesempatan keuntungan sebesar Rp. 1.000 per kg maka harga ditingkatkan petani menjadi sekitar Rp 8.000-Rp 9.000; 2) Pedagang pengumpul sering tidak dapat bahan karet alam dikarenakan kalah bersaing dengan pengumpul lainnya terutama dari luar daerah dikarenakan selisih harga sampai mencapai Rp. 2.000/kg; 3) Masih adanya pungutan liar walaupun masih dalam batas kewajaran.

Dari sisi petani karet alam di pedesaan, kegairahan berusaha tani sangat ditentukan oleh harga bahan baku. Bahkan saat harga karet alam tidak pada kewajaran menurut mereka, maka petani tidak melakukan panen (sadap). Hal tersebut disebabkan biaya bagi hasil tidak menguntungkan pemilik kebun.

Kendala yang dihadapi oleh petani di pedesaan, antara lain: 1) Harga yang tidak memadai sehingga petani lebih memilih menjadi buruh; 2) Sortiran yang terlalu ketat oleh PKA dibebankan kepada petani oleh pedagang; 3) Banyak petani memilih tidak di deres karena harga rendah sehingga tidak dapat hasil karena dana bagi hasil dengan pemanen habis untuk perawatan kebun ketanya; 4) Banyak petani yang belum menjadi anggota Gapoktan (gabungan kelompok tani) bahkan ada yang tidak tahu tentang adanya Gapoktan tersebut; 5) Gapoktan yang ada juga belum dapat memberi solusi yang dibutuhkan oleh petani; 6) Petani karet tertarik untuk beralih kepada usahatani kelapa sawit yang lebih menjanjikan peningkatan ekonominya, karena terjamin harga dan pasarnya; 7) Tidak adanya kelembagaan yang dapat berperan aktif menangani permasalahan di lapangan, seharusnya kelembagaan tersebut berprinsip " dari petani untuk petani" agar efisiensi



Ekonomi Pembangunan

tercipta; 8) Ketidak aktifan Gapoktan-Gapoktan yang sudah ada untuk menjadi leader menggantikan fungsi para pemodal perantara (toke); 9) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur produksi lokal mesti wajib jual kepada PKA lokal atau kebijakan yang melarang/membatasi penjualan karet lokal keluar dari kabupaten.

Berbagai pendapat untuk menyimpulkan alasan-alasan mengapa sampai terjadi kondisi tersebut, tentunya aktivitas ekonomi karet alam tidak ingin terjebak dengan hal-hal yang tidak terkait dengan substansi penelitian. Pada penelitian tahun pertama sudah ditawarkan tiga model bentuk mitra usaha karet alam melalui model perusahaan patungan guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani karet yang akan berpengaruh pada tingkat ekonomi keluarga, percepatan ekonomi pedesaan, maupun ditingkat kabupaten dan propinsi.

Dalam upaya memacu percepatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usahatani karet alam, maka dirancang model yang memberikan nilai tambah terhadap aktivitas usahatani karet alam. Dari alasan-alasan tersebut seharusnya terjadi suatu ikatan kerja dari tiga unsur yang terlibat yaitu petani, investor dan pembuat kebijakan. Ikatan kerja bersama ini memberikan daya guna atau keuntungan yang diperlukan oleh masing masing unsur. Ikatan kerja bersama (mitra kerja) dimaksud adalah suatu kelembagaan dalam bentuk Perusahaan Patungan, masing-masing unsur memiliki saham dalam PKA-nya. Secara sederhana dayaguna ataupun keuntungannya bila terjadi mitrakerja berupa perusahaan patungan dapat memberikan keuntungan pada masing-masing anggota mitra, antara lain:

1. Keuntungan Petani antara lain adalah :
 - a. Pasar terjamin;
 - b. Harga akan bersaing karena fungsi toke dapat tidak peranan penting;
 - c. Akan mendapatkan keuntungan dari hasil PKA;
 - d. Mendapat tambahan ilmu pengetahuan baik dalam hal keorganisasian maupun management perusahaan;
 - e. Tingkat kemampuan ekonomi petani dan keluarga serta masyarakat akan meningkat.
2. Keuntungan Investor antara lain adalah :
 - a. Pasokan terjamin sehingga taraf produktifitas PKA bisa optimal,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Repository of Universitas Riau
<https://ojs.uin-suka.ac.id>
 Hak Cipta dilindungi Universitas Riau

- maka akan terjadi efisiensi dan margin keuntungan yang besar;
- b. Kenyamanan berusaha di peroleh karena seluruh rakyat sekitar merasa memiliki;
- c. Mampu memenuhi kewajiban terhadap negara dengan baik dan benar;
- d. Mendapat kemudahan dari pemerintah daerah karena sama sama bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam hal ini petani karet.
- e. Dapat mengembangkan kapasitas PKA karena masih tersedia supply karet alam

Keuntungan Pemerintah Daerah adalah

- a. Berpeluang menarik investor baru, yang berakibat akan meningkatnya pendapatan daerah, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya stabilitas keamanan daerah;
- b. Menurunnya penjarahan hutan akibat dijadikan kebun kelapa sawit yang selama ini menjadi penyebab carut marutnya tata ruang kabupaten serta terjadinya bencana kebakaran hutan.
- c. Dapat memiliki saham di PKA yang diwakili oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa (BUMDES).

Sinergi usaha antara tiga unsur ini akan berjalan dengan baik apabila semua unsur menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Berikut dapat dijelaskan langkah-langkah terkait peran masing-masing unsur terkait peran yang diperlukan sebagai berikut:

Petani Karet

Petani melalui Gapoktan mempunyai visi medapatkan keuntungan bersama yang dikelola secara kelembagaan, maka petani karet mesti memulai langkah-langkah persiapannya, antara lain:

- 1. Membuat kelompok-kelompok tani yaitu, 1 (satu) kelompok tani per desa atau kelurahan, dengan organ organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
- 2. Diarakan oleh camat dibentuk 1 (satu) buah koperasi per kecamatan dengan anggotanya adalah kelompok tani-kelompok tani per desa



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

- komisaris perusahaan dan lainnya;
- d. Menyusun program kerja pembangunan PKA, dimulai dari pendirian perusahaan.

Membuat surat pernyataan akan menjalankan perusahaan secara profesional dengan azas kejujuran dan keterbukaan demi mencapai tujuan bersama.

Membantu biaya pengurusan kelembagaan koperasi (asumsinya petani/koperasi tidak memiliki dana awal).

Pemerintah Daerah

Menyiapkan tim khusus untuk mediasi dan fasilitator terciptanya perusahaan patungan;

Menandatangani MoU tentang komitmen pemerintah daerah untuk melayani perijinan dengan asas cepat dan biaya murah sejauh tidak melanggar perundangan yang berlaku, serta MoU tentang konsistensi pemda sebagai pengawas dan pembina perusahaan patungan;

3. Menunjuk BUMD/BUMDES representative pemerintah daerah sebagai pemegang saham apabila pemerintah daerah berkeputusan untuk memiliki saham pada perusahaan patungan;

4. Membantu biaya pengurusan kelembagaan koperasi (asumsinya petani/koperasi tidak memiliki dana awal).

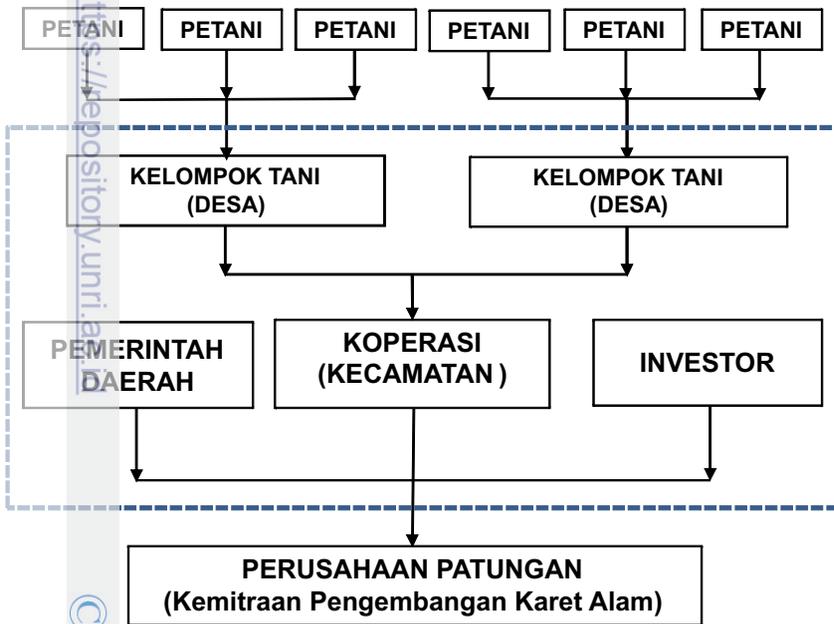
Percepatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan komoditi karet alam di pedesaan dilakukan dengan cara pembentukan kemitraan usaha antara petani (melalui kelompok tani), koperasi petani, pemerintah daerah, dan investor. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani melalui kelompok tani, antara lain: 1) Setiap kelompok tani (KT) memiliki organ pengurus ketua, sekretaris dan bendahara; 2) Kelompok tani sudah terekam jumlah luasan kebun anggota dan total luasan per kelompok taninya; 3) Petani harus membuat surat pernyataan tentang status kepemilikan lahan yang akan dikuasainya; 5) Petani harus membuat surat kuasa kepada ketua KT atas nama pengurus KT dalam hal mewakilinya untuk perundingan– perundingan terkait pembangunan perusahaan patungan; 6) Setiap koperasi yang terbentuk wajib dilegalkan sebagai badan hokum resmi; 7) Setiap koperasi wajib memiliki



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

organisasi koperasi yang sesuai perundangan; dan 8) Koperasi kecamatan adalah representative dari semua kelompok tani untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan investor dan pemda.

Apa yang diungkapkan merupakan kesimpulan sederhana langkah-langkah agar realisasi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat petani karet melalui penataan kelembagaan model perusahaan patungan. Rencana program tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Secara garis besar bagan alur langkah-langkah pembangunan perusahaan patungan (mitra kerja) usahatani karet alam di pedesaan disajikan pada Gambar 12.6.



Gambar 12.6. Bagan Alur Pembangunan Perusahaan Patungan di Pedesaan

Cara Kepemilikan Saham Petani dalam Perusahaan Patungan

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan petani sebagai pemegang saham dalam perusahaan patungan, yaitu: Pertama: Melalui pemotongan hasil jual karet alam. Cara ini tidak dianjurkan karena memiliki



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kelemahan yang tidak sebanding dengan tingkat kesabaran petani dalam hal menyaksikan hasil keuntungan bila memiliki saham dalam sebuah perusahaan patungan tersebut. Karena prinsip investor sebelum dananya cukup untuk memenuhi kewajiban setor sejumlah saham maka investor belum dapat membagi devidennya. Sementara petani pendapatannya akan menurun karena hasil jual karetnya dipotong untuk pemenuhan setor saham. Hal ini akan menjadi masalah di tingkat petani dengan menurunnya tingkat kepercayaan bahwa model ini akan berhasil meningkatkan ekonomi mereka. Hal karena waktunya yang lama. Keunggulannya, bahwa petani tidak mempunyai beban hutang yang memaksa diluar kemampuannya. Kendala dapat dicari solusinya dengan suatu presentasi yang menerangkan optimasi perhitungan oleh investor yang kesimpulan akhirnya adalah tentang perkiraan waktu dimulainya pembagian deviden kepada petani. Artinya dari awal sudah dipersiapkan mental petani dengan menggunakan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga secara tidak langsung kesabaran petani terbina.

Kedua, melalui kredit bank. Cara ini perlu MoU antara petani dengan pemerintah daerah (Pemda) karena Pemda akan berperan sebagai penjamin disamping investor, namun keuntungannya adalah dengan setor saham sekaligus dari dana kredit perbankan tersebut. Petani serta merta langsung berhak menerima pembagian deviden PKA, sedangkan kemampuan bayarnya dapat disesuaikan dengan pengaturan jangka waktu kredit.

Untuk melaksanakan rencana tersebut, maka surat-surat hukum yang akan terjadi adalah, antara lain: 1) Surat pernyataan petani tentang kepemilikan lahan; 2) Surat kuasa petani kepada kelompok tani yang diwakili oleh ketuaanya; 3) Surat kuasa kelompok tani kepada koperasi tentang perwakilan koperasi sebagai pemegang saham pada perusahaan patungan (Notaril); 4) MoU koperasi dengan investor; dan 5) MoU perusahaan patungan dengan Pemda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

